



Laporan Perekonomian

Provinsi Banten

Mei 2022





LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI BANTEN

Mei 2022

Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Banten



Tim Penyusun

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten

Penanggung Jawab

Imaduddin Sahabat
Gunawan

Editor

Purwanto
Elvira Junita I

Tim Penulis

Elvira Junita I
Astari Nandhiasa
Fajar Setiawan
Miryam Riena Kartika Diana
Retno Khoirunnisa
Muhammad Faaruq
Suci Rahmadeni
Rifqi Andi Febrianto

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI BANTEN

Jl. Raya Serang - Pandeglang No.KM.7, Sindangsari, Kec. Pabuaran
Kabupaten Serang, Banten 42173

Visi, Misi & Nilai Strategis

Visi

“Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara emerging markets untuk Indonesia Maju”

Misi

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional proaktif.

Nilai-Nilai Strategis

Trust & Integrity



Professionalism



Excellence



Public Interest



Coordination & Teamwork





Kata Pengantar

Puji serta syukur kami panjatkan atas berkat rahmat Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sehingga “Laporan Perekonomian Provinsi Banten Mei 2022” dapat kami susun dan dipublikasikan. Buku Laporan Perekonomian yang terbit setiap triwulan ini berisi data, informasi, dan analisis terkait kondisi perekonomian Provinsi Banten kini serta prospek perekonomian ke depan.

Perekonomian global terus menuju ke pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Hal ini juga dapat terlihat pada perekonomian Nasional yang terus melanjutkan tren perbaikan. Sejalan dengan Nasional, proses pemulihan perekonomian Provinsi Banten juga terus berlangsung dengan stabilitas yang terjaga. Pertumbuhan ekonomi Banten terus membaik dan meningkat kembali pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 4,97% secara *year on year*. Dari sisi eksternal, perbaikan permintaan global dan kenaikan harga komoditas ekspor utama menopang perekonomian. Sejalan dengan kondisi tersebut, konsumsi rumah tangga terus meningkat disertai dengan berbagai indikator yang menunjukkan perbaikan daya beli masyarakat. Momentum HBKN Natal dan Tahun Baru juga semakin mengakselerasi kinerja berbagai sektor yang menjadi economic driver bagi Provinsi Banten.

Hingga akhir tahun triwulan I, inflasi tetap terjaga dan mendukung stabilitas perekonomian. Indeks Harga Konsumen (IHK) Pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 3,00% (yoy), atau meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 1,91% (yoy). Inflasi yang meningkat mengindikasikan perekonomian yang kembali bergeliat dan tetap terjaga di tengah permintaan domestik yang mulai meningkat. Hal ini tetap didukung oleh pasokan yang terkendali dan nilai tukar yang stabil. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Ketahanan sistem keuangan Provinsi Banten tetap terjaga dan fungsi intermediasi perbankan mengalami perbaikan secara bertahap. Permintaan kredit membaik seiring dengan meningkatnya aktivitas dunia usaha dan konsumsi masyarakat. Aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihipung oleh perbankan juga tercatat terus meningkat.

Kata Pengantar

Bank Indonesia mempercepat digitalisasi Sistem Pembayaran (SP) untuk mendukung akselerasi ekonomi dan keuangan digital. Berbagai program digitalisasi SP seperti perluasan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) terus diakselerasi. Transaksi ekonomi dan keuangan digital tumbuh signifikan seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat Banten untuk berbelanja daring, serta perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital.

Selanjutnya, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menyediakan data dan informasi untuk mendukung penyusunan buku ini, khususnya kepada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Banten, perusahaan/asosiasi di Provinsi Banten serta pihak-pihak lainnya.

Kami berharap koordinasi dan sinergitas yang selama ini telah terjalin baik dapat terus ditingkatkan. Selanjutnya, kami mengharapkan saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas buku kajian ini sehingga dapat lebih bermanfaat bagi pengembangan perekonomian Provinsi Banten dan perekonomian Nasional.

Banten, Mei 2022
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI BANTEN

ttd

Imaduddin Sahabat
Direktur



Daftar Isi

II	Tim Penyusun
III	Visi, Misi & Nilai Strategis
IV	Kata Pengantar
VI	Daftar Isi
VIII	Daftar Tabel
IX	Daftar Grafik
XIV	Ringkasan Eksekutif
95	Daftar Istilah

1 Bab I Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

4	1.1 SISI PENGELUARAN
5	1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga
6	1.1.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
7	1.1.3 Ekspor – Impor
10	1.2 SISI PENAWARAN / LAPANGAN USAHA
11	1.2.1 Industri Pengolahan
12	1.2.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
12	1.2.3 Konstruksi
13	1.2.4 Transportasi dan Pergudangan
14	1.2.5 Real Estate

17 Bab II Keuangan Pemerintah

19	2.1 KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN & KABUPATEN/KOTA
19	2.2 KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
19	2.2.1 Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Banten
22	2.2.2 Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Banten
23	2.3 KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN & KOTA DI PROVINSI BANTEN
25	2.4 APBN DI PROVINSI BANTEN

29 Bab III Perkembangan Inflasi Daerah

29	3.1 INFLASI BANTEN TRIWULAN I 2022
30	3.2 INFLASI BANTEN BERDASARKAN KELOMPOK PENGELUARAN
34	3.3 INFLASI SPASIAL
36	3.4 Program Pengendalian Inflasi Triwulan I 2022
37	3.5 Inflasi Triwulan Berjalan

39 Bab IV Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

41	4.1 PERKEMBANGAN KINERJA PERBANKAN
41	4.1.1 Kondisi Umum
41	4.1.2 Perkembangan Dana Pihak ketiga (DPK)
42	4.1.3 Perkembangan Kredit/Pembiayaan
43	4.1.4 Tingkat Intermediasi dan Risiko Perbankan Umum
44	4.2 Kinerja Keuangan Sektor Korporasi dan Rumah Tangga
44	4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi
46	4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga
48	4.3 PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM
48	4.3.1 Perkembangan Pembiayaan UMKM
49	4.3.2 Program Pengembangan UMKM Bank Indonesia
53	BOKS 1 Penguatan Sinergi untuk Mendorong Komoditas Kopi Banten Menjadi Komoditas Unggulan di Level Nasional

59 Bab V Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

61	5.1 Perkembangan Sistem Pembayaran Non tunai
61	5.1.1 Perkembangan Transaksi BI- Real Time Gross Settlement
61	5.1.2 Perkembangan Transaksi Kliring
62	5.1.3 Perkembangan Transaksi Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU)
63	5.1.4 Perkembangan Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)
63	5.1.5 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik
64	5.1.6 Elektronifikasi Bantuan Sosial
66	5.1.6 Perkembangan QRIS
67	5.2 PERKEMBANGAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
68	5.3 PERKEMBANGAN TRANSAKSI PENUKARAN VALUTA ASING
71	BOKS 2 Prioritas Akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

75 Bab VI Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat

77	6.1 KETENAGAKERJAAN
80	6.2. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
80	6.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
82	6.2.2 Nilai Tukar Petani (NTP)
83	6.2.3 Tingkat Kemiskinan
84	6.2.4. Perkembangan <i>Gini Ratio</i>

87 Bab VII Prospek Perekonomian Daerah

89	7.1 PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI 2022
91	7.2 PERKEMBANGAN INFLASI 2022
93	7.3 FAKTOR PENDORONG DAN PENAHAN TAHUN 2022

Daftar Tabel

Tabel I.1	PDRB Provinsi Banten ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) Menurut Pengeluaran (Rp miliar)	3
Tabel I.2	PDRB Provinsi Banten Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)	4
Tabel I.3	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Menurut Pengeluaran (% , yoy)	5
Tabel I.4	PDRB Provinsi Banten Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Berdasarkan Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)	10
Tabel I.5	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Lapangan Usaha (% , yoy)	11
Tabel II.1	Perkembangan dan Realisasi APBD Pemerintah Daerah se-Banten	19
Tabel II.2	Perkembangan dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Banten	20
Tabel II.3	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Banten per Komponen	20
Tabel II.4	Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Banten	21
Tabel II.5	Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Banten	22
Tabel II.6	Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Banten	23
Tabel II.7	Perkembangan dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Banten	23
Tabel II.8	APBN di Provinsi Banten Per Jenis Belanja	25
Tabel II.9	Alokasi Dana Desa di Provinsi Banten	25
Tabel III.1	Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Provinsi Banten (yoy)	30
Tabel III.2	Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (yoy)	30
Tabel III.3	Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga (yoy)	31
Tabel III.4	Komoditas Penyumbang Inflasi Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (yoy)	32
Tabel III.5	Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (yoy)	32
Tabel III.6	Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki (yoy)	33
Tabel III.7	Komoditas Penyumbang Inflasi Deflasi Kelompok Transportasi (yoy)	33
Tabel III.8	Komoditas Penyumbang Inflasi Kelompok Kesehatan (yoy)	34
Tabel III.9	Komoditas Penyumbang Inflasi dan Deflasi Kota Tangerang (yoy)	35
Tabel III.10	Komoditas Penyumbang Inflasi dan Deflasi Kota Serang (yoy)	36

Daftar Grafik

Grafik I.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten dan Nasional	3	Grafik I.22	Perkembangan Impor Barang Konsumsi	12
Grafik I.2	Pertumbuhan Ekonomi Spasial Jawa Triwulan I 2022 (% ,yoy)	4	Grafik I.23	Realisasi Pengadaan Semen Provinsi Banten	13
Grafik I.3	Mobilitas Masyarakat Provinsi Banten	5	Grafik I.24	Pertumbuhan Omset Subkelompok Perlengkapan Rumah Tangga	13
Grafik I.4	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	6	Grafik I.25	Data Penumpang Pesawat di Bandara Soekarno Hatta	14
Grafik I.5	Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)	6	Grafik I.26	Data Pengiriman Barang Menggunakan Moda Angkutan Udara di Bandara Soekarno-Hatta	14
Grafik I.6	PMA dan PMDN di Provinsi Banten	6	Grafik I.27	SBT Kegiatan Usaha <i>Real Estate</i> Provinsi Banten	15
Grafik I.7	Investasi PMA dan PMDN Provinsi Banten Berdasarkan Kabupaten/kota	6	Grafik I.28	Pertumbuhan Kredit Properti Provinsi Banten	15
Grafik I.8	Tujuan Investasi PMA (kiri) dan PMDN (kanan) Provinsi Banten Berdasarkan Kabupaten/kota	7	Grafik II.1	Realisasi Pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Banten	21
Grafik I.9	Ekspor dan Impor Barang Non Migas Provinsi Banten	7	Grafik II.2	Realisasi Pendapatan per Jenis Pendapatan1	21
Grafik I.10	Purchasing Managers Index (PMI) Negara Mitra Dagang Provinsi Banten	8	Grafik II.3	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Provinsi Banten	22
Grafik I.11	Pangsa 5 Negara dan Kawasan Mitra Dagang Provinsi Banten	8	Grafik II.4	Realisasi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Banten	22
Grafik I.12	Pertumbuhan Ekspor Negara Tujuan Provinsi Banten	8	Grafik II.5	Proporsi Pagu Pendapatan dan Belanja Pemda Kab./Kota	24
Grafik I.13	Pertumbuhan Ekspor Komoditas Utama Provinsi Banten	8	Grafik II.6	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kab./Kota	24
Grafik I.14	Pangsa Ekspor Komoditas Utama Provinsi Banten	9	Grafik II.7	Persentase Realisasi APBD Kab./Kota	24
Grafik I.15	Pertumbuhan Nilai Impor Provinsi Banten Menurut Negara Asal Utama	9	Grafik II.8	Pangsa Pagu APBN Per Pemerintah Daerah (%)	24
Grafik I.16	Nilai Impor Provinsi Banten Menurut Kelompok Barang	9	Grafik II.9	Pangsa Pagu APBN Per Jenis Belanja (%)	25
Grafik I.17	Impor Luar Negeri Bahan Baku Penolong Provinsi Banten	10	Grafik III.1	Inflasi Banten dan Nasional (yoy)	29
Grafik I.18	Impor Luar Negeri Barang Modal Provinsi Banten	10	Grafik III.2	Inflasi Banten dan Provinsi Se-Jawa (yoy)	29
Grafik I.19	SBT Realisasi dan Perkiraan Industri Pengolahan	11	Grafik III.3	Inflasi Kelompok Pengeluaran Provinsi Banten (% ,yoy)	29
Grafik I.20	Perkembangan Harga Komoditas Utama Provinsi Banten	11	Grafik III.4	Andil Inflasi yoy Kelompok Pengeluaran Provinsi Banten (%)	29
Grafik I.21	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang Provinsi Banten	12	Grafik III.5	Inflasi Kota Sampel IHK Banten (yoy)	30



Daftar Grafik

Grafik III.6	Andil Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (yoy)	30	Grafik IV.10	Perkembangan Impor Provinsi Banten	43
Grafik III.7	Andil Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga (yoy)	31	Grafik IV.11	Perkembangan Harga Komoditas	44
Grafik III.8	Andil Inflasi Kelompok Transportasi (yoy)	32	Grafik IV.12	Perkembangan Kredit Korporasi Sektoral	45
Grafik III.9	Andil Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (yoy)	32	Grafik IV.13	Pangsa Kredit Korporasi Banten	45
Grafik III.10	Andil Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (yoy)	33	Grafik IV.14	Pertumbuhan KMK sektor Korporasi (%yoy)	45
Grafik III.11	Andil Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (yoy)	33	Grafik IV.15	Pertumbuhan KI sektor Korporasi (%yoy)	45
Grafik III.12	Realisasi dan Historis Inflasi Kota Tangerang	34	Grafik IV.16	Perkembangan Pertumbuhan Kredit dan DPK Rumah Tangga	46
Grafik III.13	Realisasi dan Historis Inflasi Kota Serang	35	Grafik IV.17	Perkembangan Pertumbuhan DPK Rumah Tangga	46
Grafik III.14	Realisasi dan Historis Inflasi Kota Cilegon	36	Grafik IV.18	Perkembangan Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga	46
Grafik III.15	Harga Minyak Bumi (USD/Barrel) dan Harga minyak kelapa sawit (USD/MT)	38	Grafik IV.19	Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga	46
Grafik III.16	Harga Kedelai dan Gandum Global (USD/bushel), Harga Emas Global (\$/OZ)	38	Grafik IV.20	Pertumbuhan KPR/KPA/Ruko Berdasarkan Tipe Rumah	47
Grafik III.17	Peta Prakiraan Daerah Potensi Banjir Provinsi Banten Mei 2022	38	Grafik IV.21	Pertumbuhan KKB Berdasarkan Jenis Kendaraan	47
Grafik IV.1	Perkembangan Aset, DPK, dan Kredit Perbankan	41	Grafik IV.22	Perkembangan Kredit UMKM	48
Grafik IV.2	Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Jenis Simpanan	41	Grafik IV.23	Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha	48
Grafik IV.3	Struktur Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Golongan Nasabah	42	Grafik IV.24	Perkembangan Suku Bunga Kredit dan NPL UMKM	48
Grafik IV.4	Pertumbuhan DPK Berdasarkan Lokasi Penghimpunan	42	Grafik IV.25	Pangsa Kredit UMKM secara Spasial	48
Grafik IV.5	Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	42	Grafik V.1	Transaksi RTGS di Provinsi Banten Berdasarkan Nominal	61
Grafik IV.6	Pertumbuhan Kredit Spasial Berdasarkan Lokasi Proyek	42	Grafik V.2	Transaksi RTGS di Provinsi Banten Berdasarkan Volume	61
Grafik IV.7	Struktur Kredit Lokasi Proyek Berdasarkan Golongan Debitur	43	Grafik V.3	Nominal Transaksi Kliring di Provinsi Banten Berdasarkan Jenis	61
Grafik IV.8	Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Non Performing Loan (NPL)	43	Grafik V.4	Volume Transaksi Kliring di Provinsi Banten Berdasarkan Jenis	61
Grafik IV.9	PMI Manufaktur Negara Mitra Dagang Utama Banten	43	Grafik V.5	Nominal Transaksi Kliring Harian di Wilayah Provinsi Banten	62
			Grafik V.6	Volume Transaksi Kliring Harian di Wilayah Provinsi Banten	62

Daftar Grafik

Grafik V.7	Nominal Transaksi KUPU di Provinsi Banten	62	Grafik VI.2	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Banten	77
Grafik V.8	Volume Transaksi KUPU di Provinsi Banten	62	Grafik VI.3	Angkatan Kerja dan TPAK Provinsi Banten	77
Grafik V.9	Nominal Transaksi Kartu Kredit di Wilayah Provinsi Banten	63	Grafik VI.4	Penduduk Bekerja dan TPT Provinsi Banten	77
Grafik V.10	Volume Transaksi Kartu Kredit di Wilayah Provinsi Banten	63	Grafik VI.5	TPT Provinsi di Jawa dan Nasional	78
Grafik V.11	Nominal Transaksi Kartu Debit di Wilayah Provinsi Banten	63	Grafik VI.6	Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja per Provinsi Banten	78
Grafik V.12	Volume Transaksi Kartu Debit di Wilayah Provinsi Banten	63	Grafik VI.7	Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan	78
Grafik V.13	Nominal Transaksi Uang Elektronik di Wilayah Provinsi Banten	64	Grafik VI.8	Perkembangan Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan	78
Grafik V.14	Volume Transaksi Uang Elektronik di Wilayah Provinsi Banten	64	Grafik VI.9	Pangsa Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi	79
Grafik V.15	Program Sembako per Kabupaten/ Kota	64	Grafik VI.10	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota posisi Agustus 2021	79
Grafik V.16	Nominal Penyerapan Program Sembako Di Provinsi Banten	65	Grafik VI.11	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan Tertinggi	79
Grafik V.17	Penyerapan KPM Program Sembako di Provinsi Banten	65	Grafik VI.12	IPM Banten dan Nasional	80
Grafik V.18	Nominal Penyaluran PKH Di Provinsi Banten	65	Grafik VI.13	IPM Provinsi di Jawa	80
Grafik V.19	Penyerapan KPM PKH Di Provinsi Banten	65	Grafik VI.14	IPM per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten	80
Grafik V.20	Perkembangan NMR	66	Grafik VI.15	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Di Jawa	81
Grafik V.21	Sebaran Merchant	66	Grafik VI.16	Rata-rata Lama Sekolah per Kabupaten Kota di Provinsi Banten	81
Grafik V.22	Perkembangan NMR TW IV 2021	66	Grafik VI.17	Nilai Tukar Petani Provinsi Banten	82
Grafik V.23	Perkembangan Perputaran Uang di Provinsi Banten	67	Grafik VI.18	Nilai Tukar Petani Berdasarkan Subsektor	82
Grafik V.24	Total Temuan Uang yang Diragukan Keasliannya di Provinsi Banten	67	Grafik VI.19	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan NTP Provinsi Banten	82
Grafik V.25	Sebaran KUPVA di Provinsi Banten	68	Grafik VI.20	Nilai Tukar Petani Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional	82
Grafik V.26	Rekapitulasi Transaksi KUPVA BB di Provinsi Banten	68	Grafik VI.21	Garis Kemiskinan di Provinsi Banten	83
Grafik V.27	Pangsa Mata Uang Yang Ditransaksikan	69	Grafik VI.22	Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Banten	84
Grafik V.28	Pangsa Mata Uang Yang Dominan Ditransaksikan	69	Grafik VI.23	Persentase Kemiskinan per Provinsi di Pulau Jawa	84
Grafik VI.1	Pertumbuhan PDRB dan Jumlah Penduduk Bekerja di Provinsi Banten	77			

Daftar Grafik

Grafik VI.24	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Banten dan Nasional	84
Grafik VI.25	Perkembangan Gini Ratio berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal	85
Grafik VI.26	Perkembangan Gini Ratio per Provinsi di Pulau Jawa	85
Grafik VII.1	Mobilitas Masyarakat Provinsi Banten	89
Grafik VII.2	Indeks Keyakinan Konsumen Provinsi Banten	89
Grafik VII.3	<i>Purchasing Managers Index</i> (PMI) Negara Mitra Dagang Provinsi Banten	90
Grafik VII.4	Ekspor Komoditas Utama Banten	90
Grafik VII.5	SKDU Industri Pengolahan	94
Grafik VII.6	Perkembangan Likert Scale Realisasi Investasi dan Perkiraan 1 Tahun	94



Ringkasan Eksekutif

Perekonomian Provinsi Banten melanjutkan pertumbuhan positif pada triwulan I 2022 yaitu sebesar 4,97% (yoy) atau sebesar 0,48% (qtq). Sinyal perbaikan ekonomi terindikasi dari berbagai sektor utama penopang perekonomian Banten. Dari sisi permintaan, keyakinan masyarakat akan kondisi perekonomian dan mobilitas yang semakin kuat menjadi key driven berlanjutnya pertumbuhan ekonomi di awal tahun 2022. Dibandingkan regional Jawa maupun Nasional, pertumbuhan ekonomi Banten triwulan I 2022 memang tercatat lebih rendah. Adapun perekonomian di regional Jawa maupun nasional masing-masing tumbuh sebesar 5,07% (yoy) dan 5,01% (yoy).

Secara umum, nominal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk wilayah Banten mengalami peningkatan di tahun 2022. Pendapatan mengalami peningkatan sementara dari sisi Belanja mengalami penurunan. Pada APBD Pemprov Banten, dominasi PAD dalam komponen pendapatan mencapai 73,2% yang didominasi oleh PKB dan BBNKB dengan realisasi mencapai 19,3%. Persentase realisasi belanja Pemprov Banten juga meningkat menjadi 14,5%. Di sisi lain, persentase realisasi APBN triwulan I 2022 di Provinsi Banten terpantau meningkat menjadi 16,0% dibandingkan 14,4% pada triwulan I 2021. Persentase realisasi didorong pada jenis DAK dan belanja pegawai.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Banten pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 3,00% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,91% (yoy). Laju inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan historis 3 tahun terakhir yaitu sebesar 2,41% (yoy) serta realisasi inflasi Nasional dan regional Jawa yang masing-masing tercatat sebesar 2,64% (yoy) dan 2,49% (yoy). Secara spasial, inflasi Provinsi Banten pada triwulan I 2022 terjadi pada seluruh kota sampel IHK di Provinsi Banten. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Serang sebesar 3,87% (yoy) diikuti oleh Kota Cilegon sebesar 3,13% (yoy) dan Kota Tangerang sebesar 2,81% (yoy).

Intermediasi perbankan di Provinsi Banten tetap baik dan mendukung pemulihan ekonomi dengan stabilitas keuangan yang terjaga. Penyaluran kredit, asset, dan DPK tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Dari sisi Penyaluran Kredit/pembiayaan, berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Banten pada triwulan I 2022 tercatat Rp385,18 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 12,43% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,18% (yoy). Secara nominal, DPK yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Banten sampai dengan triwulan I 2022 sebesar Rp245,93 triliun atau tumbuh sebesar 10,51% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,33% (yoy) atau sebesar Rp242,60 triliun. Aset perbankan di Provinsi Banten pada triwulan I 2022 tercatat sebesar Rp 274,82 triliun atau tumbuh sebesar 9,53% (yoy). Capaian ini meningkat dibandingkan triwulan IV 2021 yang tumbuh sebesar 8,5% (yoy).

Membbaiknya perekonomian Provinsi Banten pada triwulan I 2022 serta masih berlangsungnya pandemi menjadi semakin meningkatkan preferensi masyarakat dalam bertransaksi secara nontunai. Secara nominal, transaksi melalui RTGS mencapai nilai Rp232,15 triliun, berkontraksi -0,23% (yoy). Nominal transaksi pada triwulan I 2022 tercatat sebesar Rp11,15 triliun atau tumbuh sebesar 0,85% (yoy). Sementara total perputaran uang melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten tercatat mengalami net outflow sebesar Rp1,46 triliun menurun dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat *net outflow* sebesar Rp4,02 triliun

Seiring dengan mulai pulihnya perekonomian Banten, kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Banten mengalami perbaikan, sebagaimana ditandai dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi sebesar 8,53%. Hal ini didorong oleh peningkatan jumlah angkatan kerja disertai dengan menurunnya jumlah pengangguran dibandingkan posisi sebelumnya. Namun demikian, kesejahteraan hidup masyarakat di Provinsi Banten tercatat masih belum pulih. Pandemi Covid-19 memicu kenaikan Garis Kemiskinan yang meningkat pada September 2021 sebesar 3,23% dibandingkan Maret 2021.

Melihat dinamika perekonomian sampai sejauh ini, pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sejalan dengan progress vaksinasi yang akan mendorong Konsumsi Rumah Tangga, Investasi, baik swasta maupun Pemerintah, dan kinerja ekspor baik antar daerah maupun luar negeri. Pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2022 diperkirakan akan berada pada kisaran 5% - 6%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tersebut akan tampak juga pada peningkatan tekanan inflasi pada tahun 2022. Namun, dengan koordinasi yang baik antar TPID dalam menjaga pasokan pangan, maka inflasi Provinsi Banten 2022 diperkirakan tetap berada dalam target pemerintah yaitu di kisaran $3,0 \pm 1\%$ (yoy).

Tabel Indikator

Indikator	2020				2020	2021				2021	2022
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		
PDRB (%yoy)	3,12	(7,26)	(5,32)	(3,91)	(3,39)	(0,46)	8,92	4,51	5,19	4,44	4,97
Berdasarkan Sektor Ekonomi:											
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,93	4,16	4,08	2,05	3,55	6,98	(0,52)	(1,28)	(2,86)	0,56	1,00
2. Pertambangan dan Penggalian	2,57	(1,21)	(16,93)	(17,70)	(8,36)	(18,87)	(5,37)	13,51	18,65	0,61	15,09
3. Industri Pengolahan	0,33	(9,14)	(6,56)	(3,35)	(4,68)	(0,40)	10,21	5,58	4,85	4,93	4,58
4. Pengadaan Listrik dan Gas	(6,86)	(18,45)	(12,55)	(7,42)	(11,25)	2,22	22,18	17,98	10,63	12,76	6,94
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,33	6,34	8,27	8,79	7,45	7,26	4,55	5,43	2,95	5,01	1,99
6. Konstruksi	6,12	(6,35)	(5,69)	(4,67)	(2,87)	5,81	14,36	12,62	10,72	10,81	7,66
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,04	(5,10)	(3,92)	(6,42)	(2,91)	(3,06)	4,26	1,58	4,92	1,84	4,04
8. Transportasi dan Pergudangan	(3,43)	(46,26)	(35,53)	(28,70)	(28,62)	(22,13)	43,05	4,33	15,01	5,61	16,98
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,67	(11,80)	(8,77)	(6,03)	(5,09)	(4,61)	13,21	4,88	5,15	4,30	4,22
10. Informasi dan Komunikasi	8,70	9,81	9,11	8,95	9,14	9,42	4,12	3,81	4,91	5,50	5,22
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,22	3,01	2,77	2,90	2,72	4,39	6,82	5,48	5,78	5,61	3,95
12. Real Estate	8,26	(0,18)	(0,21)	1,07	2,15	1,32	5,86	2,41	2,54	3,00	4,98
13. Jasa Perusahaan	8,48	(9,22)	(6,59)	(9,71)	(4,42)	(12,19)	4,74	(1,70)	5,33	(1,34)	4,51
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,66	(3,14)	(1,68)	(0,27)	(0,65)	(2,69)	0,36	(3,02)	2,00	(0,83)	(0,62)
15. Jasa Pendidikan	3,03	(1,66)	2,02	1,98	1,33	0,11	0,73	(3,00)	(1,78)	(1,02)	(1,78)
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,63	3,43	5,48	12,33	7,50	11,59	15,38	10,69	3,02	9,95	1,70
17. Jasa lainnya	7,97	(11,76)	(8,71)	(8,63)	(5,43)	(8,22)	9,19	3,07	3,23	1,42	3,22
Berdasarkan Pengeluaran:											
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,15	(5,30)	(4,03)	(2,68)	(2,01)	(1,76)	5,85	2,62	3,17	2,40	2,92
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,17	(10,01)	(14,66)	(11,12)	(8,28)	(11,96)	0,16	4,29	1,95	(1,73)	1,74
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,51	(3,88)	(6,22)	(22,56)	(9,51)	(0,07)	0,03	0,32	3,12	0,99	(2,48)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,05	(2,76)	(1,16)	(1,07)	(0,53)	3,44	6,38	3,39	2,42	3,87	2,68
5. Perubahan Inventori	63,60	(120,02)	(108,36)	(109,48)	(83,25)	(87,76)	(5,43)	0,25	(217,62)	(96,03)	194,41
6. Net Ekspor Total	(4,40)	(48,01)	(32,32)	(12,01)	(23,89)	(5,93)	92,63	36,41	46,79	33,28	36,78
a. Ekspor Total	1,46	(10,97)	(9,71)	(5,96)	(6,32)	(0,43)	13,78	12,76	13,32	9,62	10,74
b. Impor Total	2,14	(7,38)	(7,30)	(5,44)	(4,55)	0,17	9,48	10,91	10,69	7,72	8,08
Ekspor¹⁾											
Nilai Ekspor Non-Migas (USD juta)	2.154	2.486	2.641	2.867	10.148	3.008	3.277	3.431	3.726	13.441	3.743
Volume Ekspor Non-Migas (juta ton)	2.010	2.869	3.087	2.877	10.844	3.010	2.944	2.713	2.869	11.536	2.803
Impor²⁾											
Nilai Impor Non-Migas (USD juta)	5.440	4.641	5.249	1.768	17.098	7.196	6.954	7.826	8.908	30.883	8.788
Volume Impor Non-Migas (juta ton)	5.904	5.701	5.405	6.198	23.209	6.755	6.216	6.236	6.440	25.648	7.637
Indeks Harga Konsumen³⁾											
Kota Cilegon	105,56	106,27	106,17	107,42	107,42	108,02	108,45	108,39	109,43	109,43	111,40
Kota Serang	106,48	106,97	106,95	107,08	107,08	108,24	108,79	108,82	109,82	109,82	112,43
Kota Tangerang	104,40	104,86	104,62	105,04	105,04	105,66	105,82	105,94	106,94	106,94	108,63
Provinsi Banten	104,83	105,32	105,13	105,61	105,61	106,28	106,53	106,60	107,62	107,62	109,47
Laju Inflasi Tahunan (%yoy)											
Kota Cilegon	3,99	3,46	2,60	2,62	2,62	2,33	2,05	2,09	2,19	2,19	3,13
Kota Serang	3,26	2,10	1,85	1,91	1,91	1,75	1,70	1,75	2,23	2,23	3,87
Kota Tangerang	2,78	2,42	1,45	1,18	1,18	1,65	0,92	1,26	1,81	1,81	2,81
Provinsi Banten	2,99	2,49	1,64	1,45	1,45	1,39	1,15	1,39	1,91	1,91	3,00

Tabel Indikator

Indikator	2020				2021				2022
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total Aset	238.756	231.772	241.746	251.551	250.906	256.808	260.051	272.935	274.822
Dana Pihak Ketiga (DPK)	207.083	198.486	210.718	221.887	222.556	227.981	228.829	242.599	245.938
Giro	58.073	49.007	52.940	56.995	58.681	59.291	59.771	65.255	68.718
Tabungan	74.969	76.465	77.844	84.987	81.038	85.254	87.188	91.541	92.389
Deposito	74.041	73.014	79.933	79.904	82.837	83.435	81.870	85.803	84.831
Kredit Berdasarkan Lokasi Bank	149.750	149.571	151.138	152.229	156.553	162.031	165.989	172.780	178.504
Modal Kerja	50.500	51.663	52.262	52.625	54.848	57.732	60.863	64.564	67.405
Investasi	29.431	28.599	28.958	28.684	30.084	30.341	30.282	31.012	32.082
Konsumsi	69.819	69.309	69.918	70.920	71.621	73.958	74.844	77.203	79.017
Kredit Berdasarkan Lokasi Proyek	351.001	347.889	346.857	344.823	342.594	347.875	375.887	376.490	385.181
Modal Kerja	154.980	154.078	153.983	154.035	154.282	154.944	164.877	166.384	167.214
Investasi	77.821	77.499	75.980	71.840	67.959	68.557	84.104	75.379	78.760
Konsumsi	118.201	116.312	116.894	118.948	120.352	124.374	126.905	134.727	139.207
Loan to Deposit Ratio (LDR) (%) Lokasi Proyek	169,5	175,3	164,6	155,4	153,9	152,6	164,3	155,2	156,6
Rasio Non Performing Loan (NPL) Gross	1,91	2,30	2,52	2,26	2,59	3,76	4,31	3,94	4,02
Kredit UMKM (Lokasi Proyek)	48.721	46.493	46.282	46.164	45.387	46.438	47.732	50.771	51.096
Modal Kerja	35.496	33.786	33.961	34.165	33.458	34.273	35.414	37.947	36.678
Investasi	13.225	12.706	12.321	11.999	11.929	12.165	12.317	12.824	14.419

Indikator	2020				2021				2022
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Transaksi Kliring									
Nominal (Triliun)	11,41	8,99	10,96	12,03	11,05	11,63	10,90	13,26	10,38
Volume transaksi	266.026	222.015	270.351	292.925	235.043	274.331	273.118	323.228	226.541
Transaksi RTGS									
Nominal (Triliun)	194,31	161,42	195,72	199,73	232,58	257,78	238,18	248,87	232,15
Volume transaksi	38.162	40.534	53.903	59.710	56.553	58.564	58.047	67.533	61.207



BAB I

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Provinsi Banten mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan I 2022 yaitu sebesar 4,97% (yoy) atau sebesar 0,48% (qtq). Pertumbuhan ini melanjutkan pertumbuhan positif dari triwulan sebelumnya walaupun melambat dibandingkan triwulan IV 2021 yang sebesar 5,19% (yoy).

Dari sisi permintaan, walaupun tetap tumbuh positif, mayoritas komponen mengalami perlambatan kecuali komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Kondisi Pasca HBKN Natal dan Tahun baru di tengah meningkatnya kasus covid-19 varian omicron, menahan Konsumsi Rumah Tangga. Sementara itu, kinerja ekspor luar negeri terdeselerasi seiring tingkat PMI negara mitra dagang yang melandai, kenaikan harga bahan baku dipicu oleh dampak konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Kondisi ini selanjutnya berdampak pada melambatnya impor terutama barang konsumsi. Sementara itu, komponen pengeluaran pemerintah tercatat mengalami kontraksi. Di sisi lain, kenaikan kinerja PMTB seiring realisasi investasi yang lebih tinggi.

Dari sisi penawaran, kinerja 3 (tiga) sektor utama Banten yaitu sektor Industri, sektor Perdagangan, dan sektor Konstruksi di Provinsi Banten juga tetap tumbuh walau mengalami perlambatan. Hal ini dipengaruhi adanya penurunan utilisasi kapasitas dan maintenance rutin pabrik petrokimia, aktivitas MICE yang melandai, serta telah selesainya berbagai stages proyek hingga akhir 2021 dan realisasi proyek PSN yang masih terbatas. Sektor Transportasi dan Sektor *Real Estate* tumbuh positif didorong lalu lintas penerbangan di Bandara Soekarno Hatta yang lebih tinggi. Pada triwulan I 2022, pertumbuhan ekonomi Banten berada di bawah pertumbuhan ekonomi regional Jawa dan nasional masing-masing sebesar 5,07% (yoy) dan 5,01% (yoy).



PERTUMBUHAN EKONOMI

4,97%

Triwulan I 2022

5,19%

Tw IV 2021



KONSUMSI RUMAH TANGGA

2,92%

Triwulan I 2022

3,17%

Tw IV 2021



KONSUMSI PEMERINTAH

-2,48%

Triwulan I 2022

3,12%

Tw IV 2021



INVESTASI

2,68%

Triwulan I 2022

2,42%

Tw IV 2021



EKSPOR

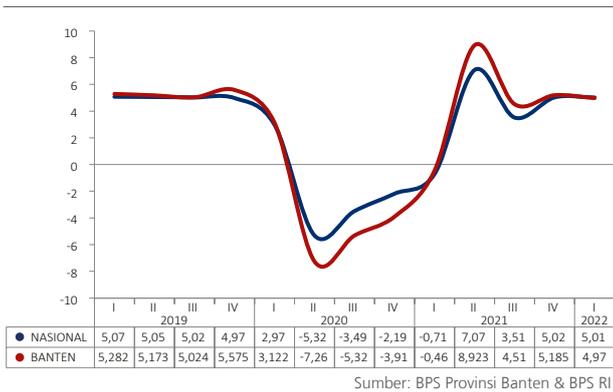
10,74%

Triwulan I 2022

13,32%

Tw IV 2021





Grafik I.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten dan Nasional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) triwulan I 2022 (tabel I.1) mencapai Rp177,29 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2021 sebesar Rp174,75 triliun. Struktur PDRB sisi pengeluaran Provinsi Banten didominasi oleh konsumsi rumah tangga (RT) sebesar Rp94,13 triliun atau dengan pangsa 53,09% terhadap total PDRB. Selanjutnya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat sebesar Rp59,59 triliun atau memiliki pangsa 33,61%, serta Net Ekspor senilai Rp16,82 triliun atau dengan pangsa 9,49%. Di samping itu, Konsumsi Pemerintah tercatat senilai Rp5,97 triliun atau memiliki pangsa sebesar 3,37%.

Perekonomian Provinsi Banten tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Banten pada triwulan I 2022 (tabel I.2) tercatat sebesar Rp119,27 triliun atau tumbuh 4,97%

(yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2021 sebesar 5,19% (yoy) atau senilai Rp118,71 triliun. Perlambatan kinerja ekonomi Banten terjadi pada hampir seluruh komponen PDRB sisi pengeluaran kecuali PMTB dipengaruhi moderasi permintaan domestik pasca kondisi HBKN Natal dan Tahun Baru pada triwulan sebelumnya. Selain itu, meluasnya covid-19 varian omicron kembali meningkatkan status PPKM dan membuat mobilitas menurun. Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi Banten tercatat menurun menjadi sebesar 0,48% (qtq), dibandingkan 3,68% (qtq) pada triwulan IV 2021.

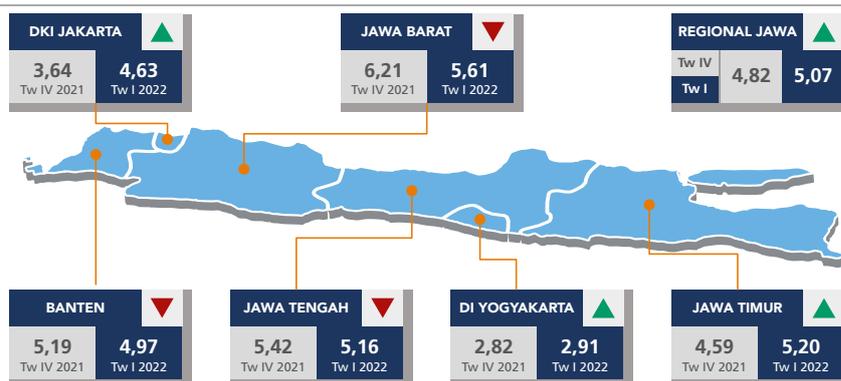
Dari sisi pengeluaran, melambatnya pertumbuhan ekonomi terutama dipengaruhi oleh moderasi komponen konsumsi rumah tangga dan net ekspor serta pengeluaran pemerintah yang mengalami kontraksi. Dari sisi penawaran atau Lapangan Usaha (LU), mayoritas lapangan usaha tumbuh positif kecuali LU Administrasi Pemerintahan dan LU Jasa Pendidikan yang berkontraksi. Pada LU utama Banten, yaitu LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, dan LU Konstruksi tercatat tetap tumbuh positif walaupun melambat. Di sisi lain, LU Transportasi dan LU Real Estate mengalami peningkatan kinerja pada triwulan I 2022.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Banten tercatat lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional dan regional Jawa yang masing-masing sebesar 5,01% (yoy) dan 5,07% (yoy). Adapun pertumbuhan ekonomi tertinggi di regional Jawa dicatatkan oleh Jawa

Tabel I.1 PDRB Provinsi Banten ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) Menurut Pengeluaran (Rp miliar)

KOMPONEN PENGELUARAN	2020					2021					2022	PANGSA (%)
	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL	I	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	89,440	83,213	85,424	87,311	345,389	88,738	89,151	94.131	91,604	358,093	94,131	53,09
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,774	0,708	0,697	0,744	2,923	0,732	0,758	764	0,774	3,016	0,764	0,43
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,741	6,633	6,851	8,119	27,343	5,892	6,866	5,970	8,761	28,653	5,970	3,37
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	53,529	52,385	54,748	56,472	217,135	56,383	56,636	59,594	59,356	229,897	59,594	33,61
5. Perubahan Inventori	0,023	-0,003	-0,003	-0,003	0,014	0,003	-0,003	10	0,004	0,001	0,010	0,01
6. Net Ekspor Total	15,542	3,111	6,618	7,904	33,175	10,250	10,472	16.825	14,255	46,263	16,825	9,49
a. Ekspor Total	111,822	94,177	100,506	107,059	413,564	112,359	114,602	133.580	129,334	477,273	133,580	75,34
b. Dikurangi Impor Total	96,280	91,066	93,888	99,155	380,389	102,109	104,130	116.755	115,079	431,010	116,755	65,85
PDRB	165,049	146,047	154,335	160,548	625,979	161,998	163,880	177.294	174,753	665,922	177,294	

Sumber : BPS Provinsi Banten



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik I.2 Pertumbuhan Ekonomi Spasial Jawa Triwulan I 2022 (yoy)

Barat sebesar 5,61% (yoy) dan Jawa Timur sebesar 5,20% (yoy). Sementara itu, DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2022 terendah di regional Jawa sebesar 2,91% (yoy). Berdasarkan kontribusinya, DKI Jakarta masih menjadi penyumbang pertumbuhan dominan yakni sebesar 29,50%, diikuti oleh Jawa Timur sebesar 25,10%, dan Jawa Barat sebesar 22,48%. Sementara itu, Banten berkontribusi sebesar 6,85% terhadap pertumbuhan ekonomi regional Jawa pada triwulan I 2022.

sebesar 2,92% (yoy), melambat dibandingkan 3,17% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Kondisi kinerja secara triwulanan juga tercatat melambat menjadi sebesar 0,77% (qtq) dibandingkan triwulan IV 2021 yakni sebesar 2,51% (qtq). Perlambatan ditengarai akibat meluasnya covid-19 varian omicron yang menahan mobilitas dan kembali diberlakukan PPKM. Selain itu, aktivitas pasca HBKN Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang mengalami moderasi, membuat konsumsi melambat.

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN I 2022

1.1 SISI PENGELUARAN

Dari sisi pengeluaran, hampir seluruh komponen mengalami perlambatan terutama konsumsi rumah tangga dengan pangsa 56,03%. Adapun komponen yang tercatat mengalami peningkatan yaitu pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan I 2022 tumbuh

Kinerja Net Ekspor pada triwulan I 2022 tercatat tumbuh sebesar 36,78% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai 46,79% (yoy). Implementasi Izin Operasional Mobilitas dan Kegiatan Industri (IOMKI) telah memberikan eksternalitas positif bagi industri-industri utama di Banten yang bersifat kritikal dengan tetap beroperasi 100%. Selain itu, peningkatan kapasitas produksi melalui ekspansi pabrik mampu mendorong kinerja industri dalam memenuhi permintaan yang meningkat.

Tabel I.2 PDRB Provinsi Banten Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran (miliar Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN	2020					2021					2022
	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL	Q1
1, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	66,106	61,398	63,053	64,284	254,841	64,941	64,988	64,704	66,325	260,957	66,834
2, Pengeluaran Konsumsi LNPR	576	524	498	519	2,118	507	525	519	529	2,081	516
3, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,759	4,326	4,446	5,228	17,759	3,756	4,328	4,460	5,392	17,935	3,663
4, Pembentukan Modal Tetap Bruto	35,445	34,521	35,968	36,976	142,910	36,663	36,722	37,188	37,873	148,446	37,647
5, Perubahan Inventori	21	-3	-2	-2	13	3	-2	-2	3	1	7
6, Net Ekspor Total	8,242	3,820	5,588	5,849	23,498	7,754	7,358	7,623	8,585	31,319	10,605
a, Ekspor Total	84,125	73,933	77,172	80,369	315,599	83,763	84,118	87,016	91,075	345,972	92,758
b, Dikurangi Impor Total	75,883	70,113	71,584	74,520	292,101	76,010	76,760	79,393	82,489	314,653	82,152
PDRB	114,148	104,586	109,550	112,854	441,139	113,624	113,919	114,491	118,706	460,740	119,274

Sumber: BPS Provinsi Banten

Tabel I.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Menurut Pengeluaran (% , yoy)

KOMPONEN PENGELUARAN	2020					2021					2022
	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL	Q1
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,15	-5,3	-4,03	-2,68	-2,01	-1,76	5,85	2,62	3,17	2,40	2,92
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,17	-10,01	-14,66	-11,12	-8,28	-11,96	0,16	4,29	1,95	-1,73	1,74
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,51	-3,88	-6,22	-22,56	-9,51	-0,07	0,03	0,32	3,12	0,99	-2,48
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,05	-2,76	-1,16	-1,07	-0,53	3,44	6,38	3,39	2,42	3,87	2,68
5. Perubahan Inventori	63,6	-120,02	-108,36	-109,48	-83,25	-87,76	-5,43	0,25	-217,62	-96,03	194,41
6. Net Ekspor Total	-4,4	-48,01	-32,32	-12,01	-23,89	-5,93	92,63	36,41	46,79	33,28	36,78
a. Ekspor Total	1,46	-10,97	-9,71	-5,96	-6,32	-0,43	13,78	12,76	13,32	9,62	10,74
b. Impor Total	2,14	-7,38	-7,3	-5,44	-4,55	0,17	9,48	10,91	10,69	7,72	8,08
PDRB	3,12	-7,26	-5,32	-3,91	-3,39	-0,46	8,92	4,51	5,19	4,44	4,97

Sumber: BPS Provinsi Banten

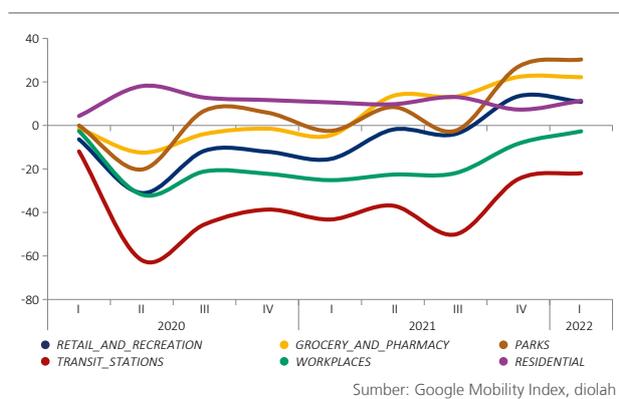
Di sisi lain, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tercatat kontraksi sebesar -2,48% (yoy), dibandingkan triwulan IV 2021 yang tumbuh 3,12% (yoy). Senada hal tersebut pertumbuhan secara triwulanan juga tercatat kontraksi yakni sebesar -32,06% (qtq), dibandingkan posisi triwulan IV 2021 yang tumbuh positif sebesar 20,89% (qtq).

1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga

Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2022 menjadi sebesar 2,92% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,17% (yoy). Hal ini dipengaruhi mobilitas masyarakat di Provinsi Banten yang secara agregat Kembali terbatas seiring kebijakan PPKM yang Kembali dilakukan untuk membatasi penyebaran covid-19 varian omicron. Berdasarkan data *Google Mobility Index* (GMI), kunjungan ke retail dan rekreasi dan toko bahan makanan dan apotek, mengalami penurunan meskipun masih di atas *baseline*¹.

Secara umum, pada triwulan I 2022 optimisme konsumsi masyarakat semakin membaik namun capaian kondisi ekonomi terkini belum pulih sepenuhnya. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia Provinsi Banten, indeks keyakinan konsumen tercatat sebesar 117,19 dibandingkan sebelumnya sebesar 101,83. Kondisi ini terutama ditopang oleh kenaikan indeks ekspektasi ekonomi yang juga telah berada pada level optimis (>100). Di sisi lain,

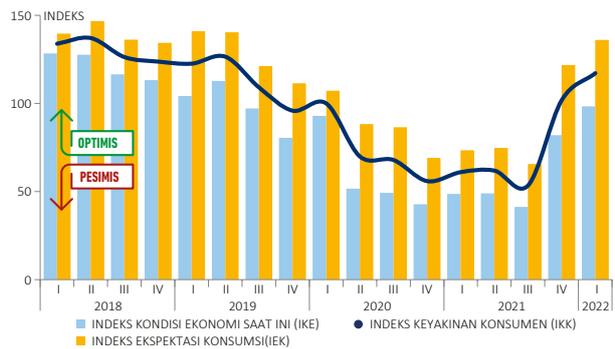
perbaikan indeks kondisi ekonomi saat ini masih terbatas atau tercatat sebesar 98,33 dari sebelumnya 81,94. Hal tersebut ditengarai melandainya indeks penghasilan saat ini dari 118,0 menjadi 108,33 dan indeks ketersediaan lapangan kerja yang tercatat sebesar 81,83 dibandingkan 66,33 pada triwulan IV 2021. Di samping itu, berdasarkan data BPS Provinsi Banten, Pada Februari 2022 tingkat pengangguran karena Covid-19 mengalami penurunan menjadi 51,38 ribu orang dibandingkan 104,31 ribu orang pada Februari 2021 atau turun -50,74%. Adapun jumlah penduduk bekerja sebanyak 5,4 juta orang dengan persentase pekerja penuh sebanyak 74,43% atau membaik dibandingkan 72,00% pada Februari 2021. Meskipun demikian, persentase ini masih lebih rendah dibandingkan pre-pandemi (Februari 2020) sebesar 79,26.



Sumber: Google Mobility Index, diolah

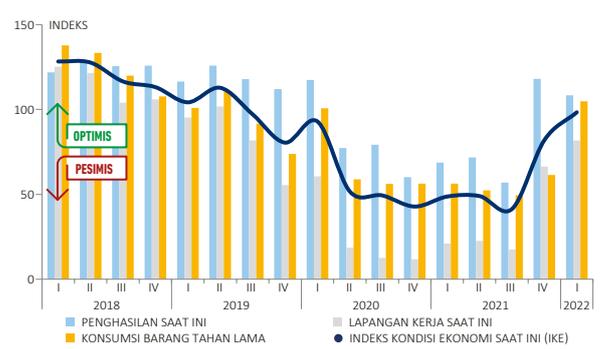
Grafik I.3 Mobilitas Masyarakat Provinsi Banten

¹ Pada triwulan I 2022, GMI retail dan rekreasi rata-rata sebesar 10,8 dan toko bahan makanan dan apotek sebesar 22,1 dibandingkan triwulan IV 2021 yang masing-masing sebesar 13,4 dan 22,3.



Sumber: Survey Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik I.4 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)



Sumber: Survey Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik I.5 Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)

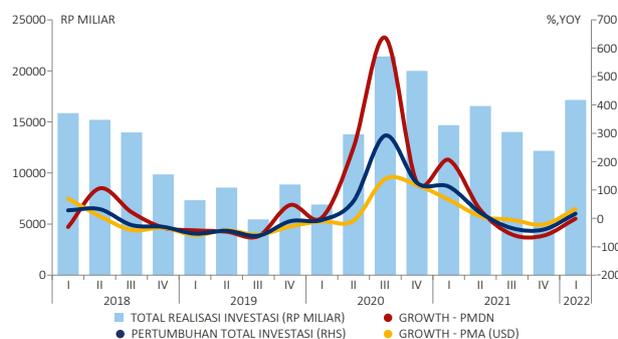
1.1.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Komponen PMTB Provinsi Banten pada triwulan I 2022 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. PMTB tumbuh sebesar 2,68% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 2,42% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Dari sisi penanaman modal, realisasi total nilai penanaman modal di Provinsi Banten tercatat meningkat dibandingkan triwulan IV 2021 baik dari sisi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM RI, Pada triwulan I 2022, Banten berada pada peringkat 6 realisasi PMA yaitu, senilai USD712,98 juta atau lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan IV 2021 yang senilai USD605,1 juta. Di Samping itu, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berada pada peringkat 7 nasional yaitu, senilai Rp6,92 triliun, meningkat dibandingkan Rp3,53 triliun pada triwulan IV 2021. Dengan kondisi tersebut, total realisasi penanaman modal di Banten senilai Rp17,154 triliun

(rata-rata kurs tengah BI periode triwulan I 2022: USD1 = Rp14.346,00).

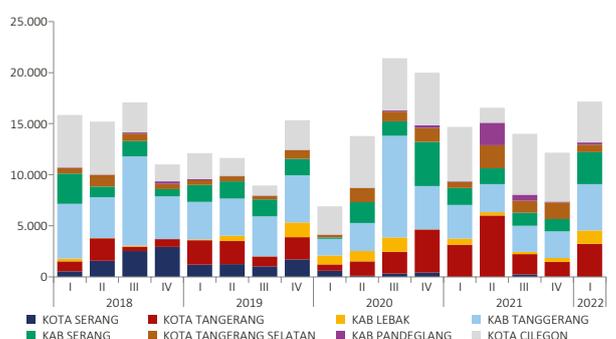
Secara spasial, nominal investasi PMDN di wilayah Banten yang terbesar pada triwulan I 2022 terdapat di Kabupaten Tangerang dengan pangsa 39,17% dan nilai investasi mencapai Rp2,71 triliun. Capaian tersebut diikuti oleh Kota Tangerang senilai Rp2,15 triliun dengan pangsa sebesar 31,01% dari total PMDN Banten. Sementara dari sisi PMA, nominal investasi terbesar pada triwulan I 2022 terdapat di Kota Cilegon senilai USD273,92 juta (*share* 38,42% terhadap total PMA Banten), diikuti oleh Kabupaten Serang dengan nilai USD183,88 juta (*share* 25,79%), dan Kabupaten Tangerang dengan nilai USD128,93 juta (*share* 18,08%).

Pada triwulan I 2021, investasi didominasi oleh pangsa PMA sebesar 59,63% sementara pangsa PMDN sebesar 40,37%. Nilai investasi PMA terbesar utamanya pada subsektor industri bahan kimia dan barang dari bahan



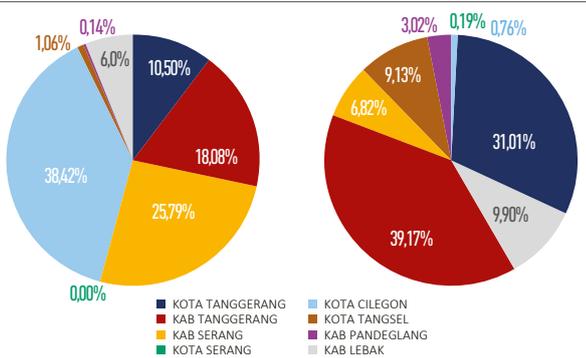
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Grafik I.6 PMA dan PMDN di Provinsi Banten



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Grafik I.7 Investasi PMA dan PMDN Provinsi Banten Berdasarkan Kabupaten/kota



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Grafik I.8 Tujuan Investasi PMA (kiri) dan PMDN (kanan) Provinsi Banten Berdasarkan Kabupaten/kota

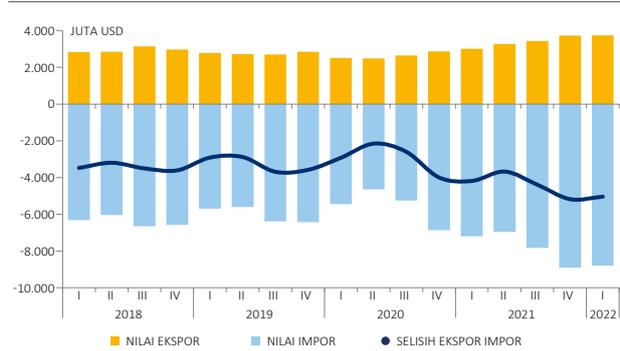
kimia (pangsa: 26,88%) senilai USD191,66 juta, diikuti oleh subsektor industri makanan (22,49%) senilai USD160,32 juta dan subsektor real estate (11,85%) senilai USD84,49 juta terhadap total PMA di Banten. Khusus investasi PMA subsektor industri kimia terutama mendukung penyelesaian perluasan PT Asahimas Chemical (ASC) tahap Ke-7 atau pabrik PVC Ke-5 di Cilegon.

Dari sisi PMDN, investasi terbesar yaitu pada subsektor perdagangan dan aktivitas penunjang angkutan (pangsa: 31,17%) senilai Rp2,16 triliun, diikuti oleh diikuti oleh subsektor real estate (19,21%) senilai Rp1,33 triliun dan subsektor industri makanan (9,68%) senilai Rp670,31 miliar terhadap total PMDN di Banten.

1.1.3 Ekspor – Impor

Kinerja net ekspor Provinsi Banten pada triwulan I 2022 mengalami perlambatan seiring kinerja ekspor maupun impor yang termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan Net Ekspor pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 36,78% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2021 yang tumbuh 46,79% (yoy). Perlambatan Net Ekspor dipengaruhi oleh kinerja komponen ekspor yang tumbuh lebih rendah menjadi sebesar 10,74% (yoy) dari sebelumnya 13,32% (yoy) dan kinerja impor menjadi sebesar 8,08% (yoy) dari sebelumnya 10,69% (yoy) pada triwulan IV 2021.

Neraca perdagangan luar negeri Provinsi Banten berada dalam posisi defisit karena faktor impor luar



Sumber: Bea Cukai (diolah)

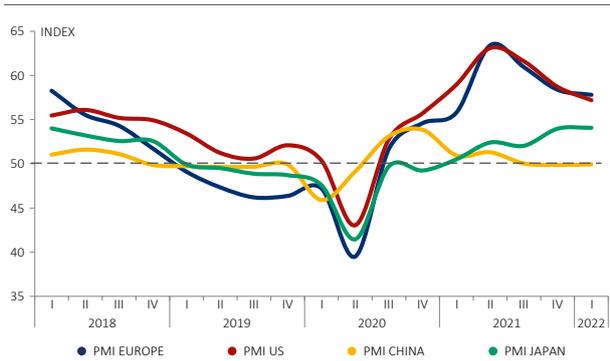
Grafik I.9 Ekspor dan Impor Barang Non Migas Provinsi Banten

negeri yang cukup dominan sebagai bahan baku guna mendukung produksi industri pengolahan Provinsi Banten. Pada triwulan I 2022, neraca perdagangan Banten tercatat defisit USD5,04 miliar. Sejalan dengan perlambatan kinerja net ekspor, kondisi defisit ini tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2021 sebesar USD5,18 miliar.

1.1.3.1 Ekspor

Kinerja ekspor non-migas luar negeri Provinsi Banten pada triwulan I 2022 tercatat senilai USD3,74 miliar. Nilai tersebut tumbuh positif sebesar 24,45% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 29,94% (yoy) atau senilai USD3,73 miliar. Perlambatan kinerja ekspor pada triwulan I 2022 disebabkan oleh meningkatnya penyebaran Covid-19 varian omicron di berbagai negara mitra dagang yang membuat negara kembali membatasi mobilitas.

Secara umum, kondisi usaha sektor manufaktur negara-negara mitra dagang utama masih berada pada level ekspansi namun cenderung melandai dari triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari angka *Purchasing Manager's Index* (PMI) manufaktur yang lebih rendah pada negara-negara tersebut. Adapun PMI Eropa tercatat melambat ke level 57,80 dari sebelumnya 58,37. Sementara itu, PMI Amerika Serikat tercatat sebesar 57,20, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022 sebesar 58,70. Di sisi lain, PMI Jepang tercatat sedikit meningkat dari 53,97 menjadi 54,07. Khusus Tiongkok, angka PMI berada pada level pesimis (*threshold*=50) yaitu sebesar 49,93 dibandingkan



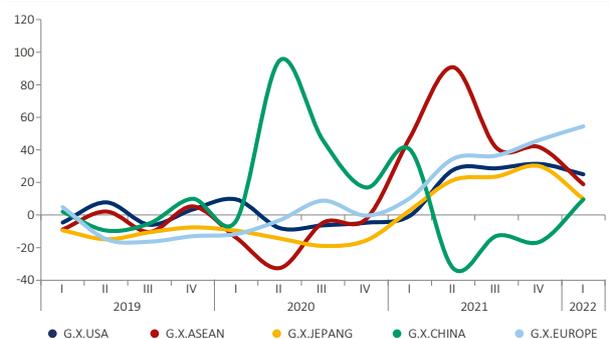
Sumber : Bloomberg, tradingeconomics, diolah

Grafik I.10 Purchasing Managers Index (PMI) Negara Mitra Dagang Provinsi Banten

49,87 pada triwulan sebelumnya. Kondisi ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang terjadi mengerek turun perkiraan volume perdagangan dunia yang sebelumnya diperkirakan tumbuh sebesar 6,0% (yoy) menjadi 5,0% (yoy) untuk sepanjang tahun 2022².

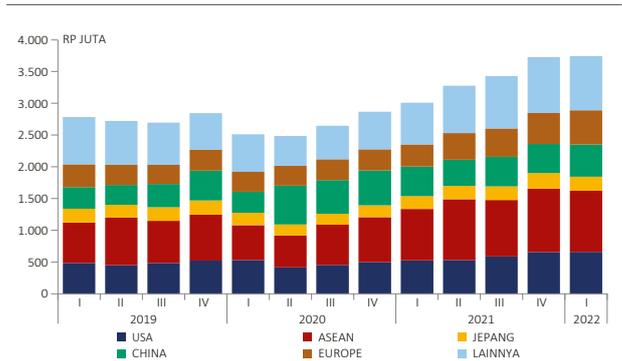
Pada triwulan I 2022, pangsa ekspor non-migas Banten ke negara-negara tujuan ekspor utama cenderung stabil dibandingkan periode sebelumnya. Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar dengan pangsa sebesar 17,59%, diikuti Tiongkok dengan pangsa sebesar 14,36%, dan Jepang dengan pangsa 5,97%. Sementara kawasan tujuan ekspor terbesar adalah ASEAN dan Uni Eropa, dengan pangsa masing-masing sebesar 25,72% dan 14,36%.

Menurut komoditasnya, komoditas utama ekspor Provinsi Banten yaitu komoditas alas kaki (pangsa: 20,08%) tumbuh stabil; diikuti komoditas Kimia (11,66%) dan Besi dan Baja (10,33%) pada periode triwulan I 2022 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya.



Sumber : Dirjen Bea Cukai, diolah

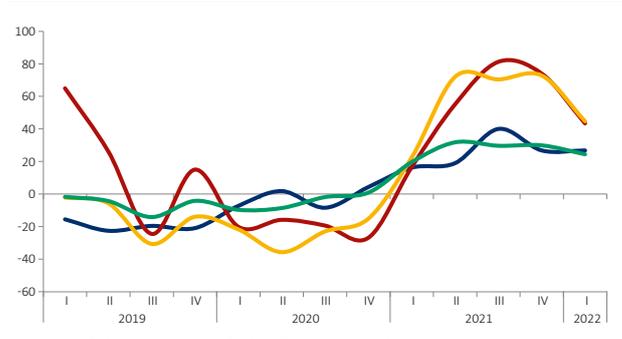
Grafik I.12 Pertumbuhan Ekspor Negara Tujuan Provinsi Banten



Sumber : Dirjen Bea Cukai, diolah

Grafik I.11 Pangsa 5 Negara dan Kawasan Mitra Dagang Provinsi Banten

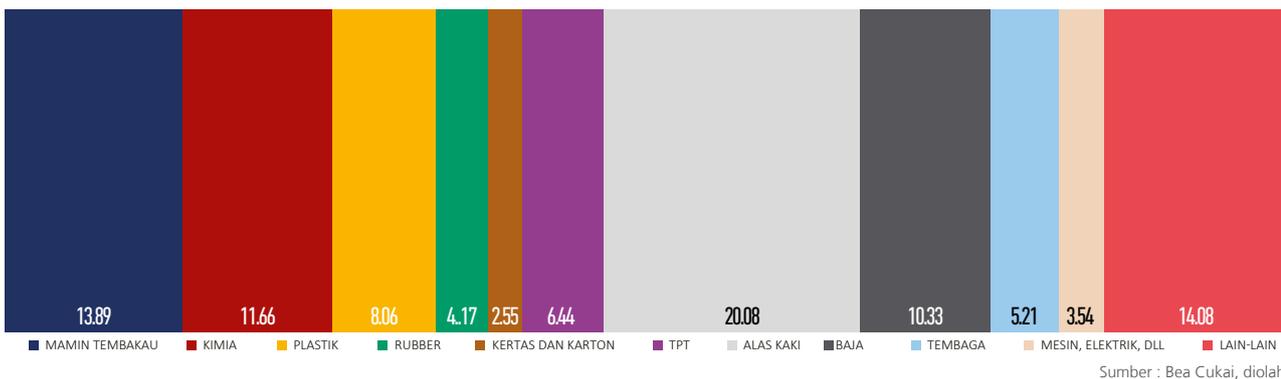
Ekspor alas kaki tercatat tumbuh 26,73% (yoy) relatif stabil dibandingkan 26,72% (yoy) pada triwulan IV 2021. Kondisi tersebut dipengaruhi terjaganya permintaan dan dorongan tambahan kapasitas utilisasi untuk memenuhi *order* terutama pada brand sepatu olahraga internasional seiring pelaksanaan event internasional FIFA World Cup, SEA Games, dan Asian Games pada tahun 2022. Kenaikan ini terutama pada ekspor alas kaki ke Eropa yang tumbuh sebesar 47,38% (yoy) dari sebelumnya 33,30% (yoy). Hal ini juga didukung dengan keberlanjutan implementasi IOMKI. Sementara itu, pada komoditas kimia tercatat mengalami perlambatan sebesar 44,79% (yoy) dari periode sebelumnya sebesar 72,84% (yoy). Hal ini dipengaruhi tekanan kenaikan harga bahan baku kimia global dan penurunan kapasitas utilisasi industri kimia hulu seiring adanya *maintenance* rutin pada triwulan laporan dan gangguan produksi pada salah satu pabrik olefin di Banten. Sementara itu, komoditas besi dan baja melambat sebesar 43,38% (yoy) dibandingkan 74,02 pada triwulan IV 2021.



Sumber : Dirjen Bea Cukai, diolah

Grafik I.13 Pertumbuhan Ekspor Komoditas Utama Provinsi Banten

2 Sumber: IMF World Economic Outlook, April 2022



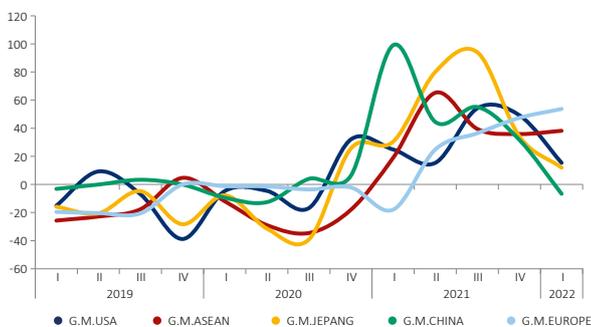
Grafik I.14 Pangsa Ekspor Komoditas Utama Provinsi Banten

Di sisi lain, komoditas yang menahan perlambatan yaitu ekspor komoditas plastik (8,06%) dan komoditas kertas dan karton (2,55%). Secara konsekutif, kedua komoditas tersebut tumbuh lebih tinggi masing-masing sebesar 13,67% (yoy) dan 19,82% (yoy). Terjaganya kinerja kedua komoditas tersebut seiring tetap kuatnya permintaan kemasan seiring masih berlanjutnya tren makanan dan minuman kemasan dan belanja *take away*. Berdasarkan hasil FGD dengan INAPLAS³, kapasitas utilisasi industri hilir kimia mengalami kenaikan menjadi sebesar 85%.

1.1.3.2 Impor

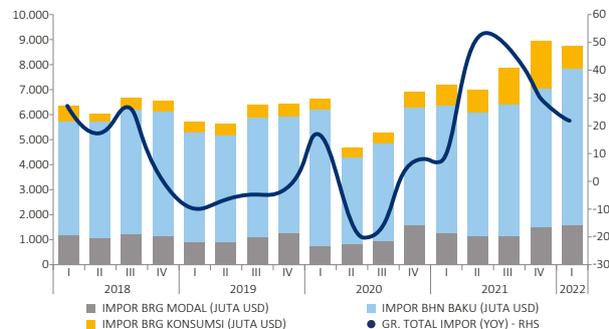
Kinerja impor non-migas luar negeri Banten pada triwulan I 2022 tercatat senilai USD8,79 miliar atau tumbuh sebesar 22,12% (yoy), melambat dibandingkan triwulan IV 2021 sebesar 29,69% (yoy) atau senilai USD8,91 miliar. Berdasarkan jenis barang yang diimpor, perlambatan ini dipengaruhi kontraksi impor barang konsumsi, di tengah impor

bahan baku penolong dan barang modal yang meningkat. Impor barang konsumsi mengalami kontraksi -1,45% (yoy) setelah pada triwulan IV 2021 tumbuh tinggi mencapai 202,78% (yoy). Kondisi ini terutama akibat kontraksi subkelompok barang konsumsi yang tidak tahan lama dan makanan minuman olahan untuk rumah tangga. Di sisi lain, impor bahan baku penolong tumbuh sebesar 26,98% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 19,81% (yoy) pada triwulan IV 2021 terutama pada komponen bahan baku mentah untuk industri dan suku cadang barang modal. Selain itu, impor barang modal tercatat meningkat pada seluruh komponen barang modal. Berdasarkan negara asal impor, perlambatan impor menurun dari Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Sementara itu, kawasan negara Eropa dan ASEAN, tercatat mengalami kenaikan..



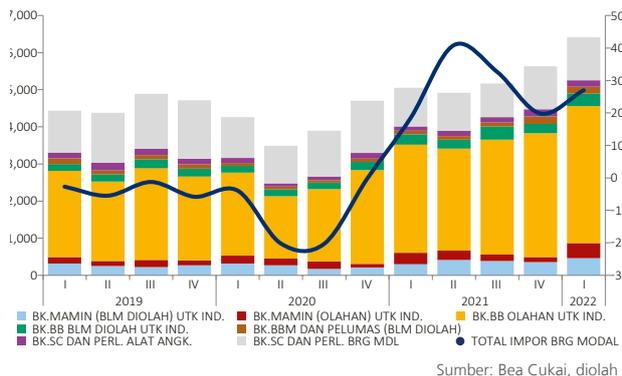
Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik I.15 Pertumbuhan Nilai Impor Provinsi Banten Menurut Negara Asal Utama

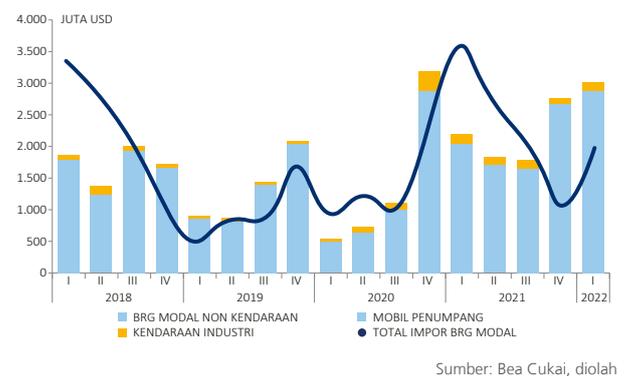


Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik I.16 Nilai Impor Provinsi Banten Menurut Kelompok Barang



Grafik I.17 Impor Luar Negeri Bahan Baku Penolong Provinsi Banten



Grafik I.18 Impor Luar Negeri Barang Modal Provinsi Banten

1.2 SISI PENAWARAN / LAPANGAN USAHA

Dari sisi penawaran, mayoritas lapangan usaha (LU) tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada LU utama Provinsi Banten, kinerja LU industri pengolahan, LU perdagangan besar dan eceran, dan LU konstruksi tetap tumbuh positif meskipun mengalami moderasi. Di sisi lain, kinerja LU transportasi dan pergudangan dan LU real estate mengalami peningkatan kinerja dibandingkan triwulan IV 2021.

Sementara itu, LU yang mengalami kontraksi yaitu, LU administrasi pemerintahan dan LU jasa pendidikan.

Berdasarkan pangsa, struktur PDRB Provinsi Banten pada periode triwulan I 2022 terutama didominasi oleh LU Industri Pengolahan mencapai 31,42%, LU Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 12,72%, dan LU Konstruksi sebesar 12,21% terhadap total PDRB. Lebih lanjut, pangsa sektor Real Estate berada di urutan keempat sebesar 8,42% dan sektor Transportasi dan Pergudangan pada urutan kelima dengan pangsa

Tabel I.4 PDRB Provinsi Banten Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Berdasarkan Lapangan Usaha (miliar Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN	2020					2021					2022	PANGSA (%)
	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL	I	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,653	9,752	9,919	9,685	39,009	10,292	9,954	10,087	9,803	40,238	11,024	6,22
Pertambangan dan Penggalian	1,149	1,124	997	1,000	4,270	1,016	1,166	1,202	1,249	4,633	1,219	0,69
Industri Pengolahan	50,991	46,007	47,971	50,384	195,353	51,079	51,629	52,202	54,698	209,609	55,714	31,42
Pengadaan Listrik, Gas	2,906	2,372	2,530	2,699	10,507	2,982	3,020	3,166	2,986	12,153	3,155	1,78
Pengadaan Air	133	137	139	142	551	144	145	149	148	585	148	0,08
Konstruksi	17,823	16,529	17,933	19,268	71,553	19,158	19,480	21,018	22,460	82,115	21,648	12,21
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,660	20,180	20,896	20,507	83,242	21,193	21,364	21,524	21,822	85,904	22,544	12,72
Transportasi dan Pergudangan	15,198	6,209	8,589	10,478	40,473	9,629	10,292	8,885	12,834	41,639	12,956	7,31
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,102	3,506	3,675	3,875	15,158	3,934	3,989	3,879	4,101	15,902	4,144	2,34
Informasi dan Komunikasi	6,023	6,333	6,416	6,429	25,201	6,537	6,595	6,679	6,764	26,575	6,920	3,90
Jasa Keuangan	5,101	4,951	5,031	5,218	20,300	5,407	5,493	5,571	5,860	22,332	5,956	3,36
Real Estate	13,695	13,136	13,610	13,838	54,278	13,969	13,997	14,145	14,482	56,593	14,925	8,42
Jasa Perusahaan	1,997	1,721	1,817	1,791	7,325	1,784	1,834	1,803	1,908	7,329	1,882	1,06
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,479	3,496	3,581	3,654	14,210	3,483	3,557	3,536	3,882	14,458	3,558	2,01
Jasa Pendidikan	5,952	5,931	6,267	6,353	24,503	5,994	6,037	6,037	6,272	24,395	5,973	3,37
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,227	2,157	2,293	2,507	9,183	2,536	2,560	2,560	2,622	10,299	2,618	1,48
Jasa lainnya	2,964	2,508	2,671	2,719	10,862	2,761	2,768	2,768	2,863	11,163	2,911	1,64
PDRB	165,049	146,047	154,335	160,548	625,979	161,998	163,880	165,291	174,753	665,922	177,294	

Sumber: BPS Provinsi Banten

Tabel I.5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Berdasarkan Lapangan Usaha (% , yoy)

KOMPONEN PENGELUARAN	2020					2021					2022
	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL	Q1
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,93	4,16	4,08	2,05	3,55	6,98	-0,52	-1,28	-2,86	0,56	1,00
Pertambangan dan Penggalian	2,57	-1,21	-16,93	-17,70	-8,36	-18,87	-5,37	13,51	18,65	0,61	15,09
Industri Pengolahan	0,33	-9,14	-6,56	-3,35	-4,68	-0,40	10,21	5,58	4,85	4,93	4,58
Pengadaan Listrik, Gas	-6,68	-18,45	-12,55	-7,42	-11,25	2,22	22,18	17,98	10,63	12,76	6,94
Pengadaan Air	6,33	6,34	8,27	8,79	7,45	7,26	4,55	5,43	2,95	5,01	1,99
Konstruksi	6,12	-6,35	-5,69	-4,67	-2,87	5,81	14,36	12,62	10,72	10,81	7,66
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,04	-5,10	-3,92	-6,42	-2,91	-3,06	4,26	1,58	4,92	1,84	4,04
Transportasi dan Pergudangan	-3,43	-46,26	-35,53	-28,70	-28,62	-22,13	43,05	4,33	15,01	5,61	16,98
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,67	-11,80	-8,77	-6,03	-5,09	-4,61	13,21	4,88	5,15	4,30	4,22
Informasi dan Komunikasi	8,70	9,81	9,11	8,95	9,14	9,42	4,12	3,81	4,91	5,50	5,22
Jasa Keuangan	2,22	3,01	2,77	2,90	2,72	4,39	6,82	5,48	5,78	5,61	3,95
Real Estate	8,26	-0,18	-0,21	1,07	2,15	1,32	5,86	2,41	2,54	3,00	4,98
Jasa Perusahaan	8,48	-9,22	-6,59	-9,71	-4,42	-12,19	4,74	-1,70	5,33	-1,34	4,51
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,66	-3,14	-1,68	-0,27	-0,65	2,69	0,36	-3,02	2,00	-0,83	-0,62
Jasa Pendidikan	3,03	-1,66	2,02	1,98	1,33	0,11	0,73	-3,00	-1,78	-1,02	-1,78
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,63	4,43	5,48	12,33	7,50	11,59	15,38	10,69	3,02	9,95	1,70
Jasa lainnya	7,97	-11,76	-8,71	-8,63	-5,43	-8,22	9,19	3,07	3,23	1,42	3,22
PDRB	3,12	-7,26	-5,32	-3,91	-3,39	-0,46	8,92	4,51	5,19	4,44	4,97

Sumber: BPS Provinsi Banten

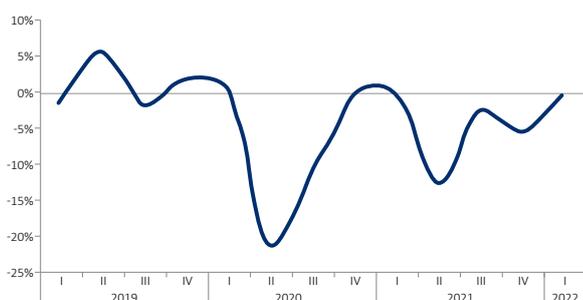
sebesar 7,31% terhadap total PDRB Provinsi Banten. Secara agregat, kelima sektor tersebut membentuk 72,08% perekonomian Banten.

1.2.1 Industri Pengolahan

Lapangan Usaha Industri Pengolahan mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,58% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan IV 2021 sebesar 4,85% (yoy). Perlambatan dipengaruhi *maintenance* rutin pabrik hulu petrokimia di tengah kenaikan harga naphtha dan minyak bumi akibat perang Rusia-Ukraina. Hal ini juga

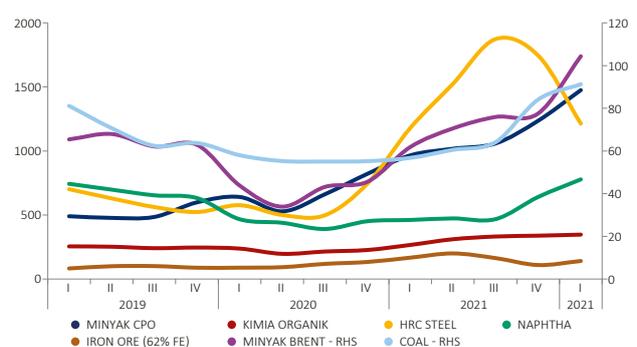
mempengaruhi margin produk monomer dan polimer semakin ketat pada periode laporan. Kinerja industri pengolahan ini tercermin pada hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten yaitu, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Realisasi Tenaga Kerja yang masih berkontraksi sebesar -0,11%, meskipun membaik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -5,16%.

Pada industri kimia dengan bahan baku yang masih didominasi oleh impor. Sebagai bahan baku produksi aromatik dan olefin, harga naphtha mengalami



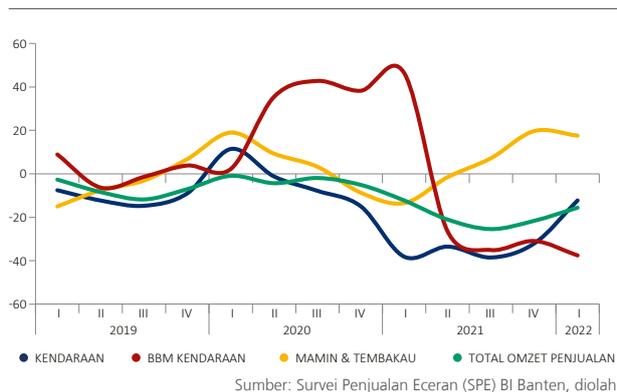
Sumber : SKDU Bank Indonesia, diolah

Grafik I.19 SBT Realisasi Tenaga Kerja LU Industri Pengolahan



Sumber : Bloomberg, diolah

Grafik I.20 Perkembangan Harga Komoditas Utama Provinsi Banten



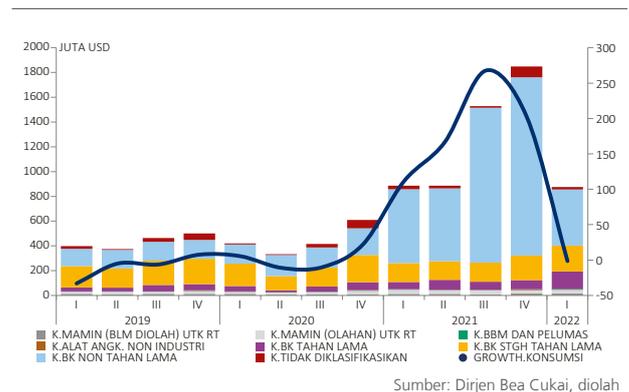
Grafik I.21 Pertumbuhan (yoy) Omzet Penjualan menurut sub kategori (%)
Sumber: Survei Penjualan Eceran (SPE) BI Banten, diolah

kenaikan menjadi USD856 per ton dibandingkan dengan rata-rata pada triwulan I 2021 sebesar USD534 per ton. Naiknya harga naphtha dilatarbelakangi oleh kenaikan harga minyak mentah Brent selama triwulan I 2022 sebesar 66,0%, dengan realisasi rata-rata harga USD101 per barel, dibandingkan USD61 per barel pada triwulan I 2021. Pada Industri Makanan berbasis gandum. Biaya bahan baku mengalami kenaikan yang signifikan disebabkan oleh adanya kenaikan biaya bahan baku utama yaitu komoditi gula yang mengalami kenaikan sebesar 38%, gandum sebesar 28%, CPO naik sebesar 55%, dan coffee naik sebesar 60%. Namun demikian, berdasarkan hasil liaison kepada industri makanan dan minuman, penyesuaian harga jual masih akan mempertimbangkan daya beli masyarakat.

1.2.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor⁴ pada triwulan I 2022 tumbuh sebesar 4,04% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2021 sebesar 4,92% (yoy). Kondisi ini dipengaruhi permintaan yang cenderung melandai pasca HBKN natal dan tahun baru ditambah meningkatnya kasus penyebaran covid-19 varian omicron di Banten sehingga pemerintah kembali meningkatkan level PPKM. Kembali terbatasnya mobilitas tercermin pada *google mobility index*, terutama pada komponen kunjungan ke toko retail dan rekreasi serta toko bahan makanan dan apotek yang menurun. Sementara itu, tingkat

⁴ Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor untuk selanjutnya disebut perdagangan



Grafik I.22 Perkembangan Impor Barang Konsumsi
Sumber: Dirjen Bea Cukai, diolah

mobilitas di area residensial mengalami kenaikan. Hal ini juga terkonfirmasi dari hasil SKDU yang mengalami kontraksi saldo bersih tertimbang (SBT) kegiatan usaha LU perdagangan sebesar 1,36% lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 2,72%.

Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, pada triwulan I 2022, total omzet penjualan masih terkontraksi sebesar -15,57% (yoy), meskipun membaik dari triwulan sebelumnya sebesar -21,58% (yoy). Hal ini terutama seiring dengan penjualan kendaraan yang tercatat kontraksi -12,3% (yoy) meskipun membaik dari sebelumnya sebesar -32,1% (yoy). Sementara itu, kinerja penjualan kelompok makanan, minuman dan tembakau dan kelompok penjualan BBM kendaraan mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 17,6% (yoy) dan -37,6% (yoy). Moderasi pada perdagangan makanan dan minuman juga tercermin dari perdagangan produk bahan makanan dan makanan jadi, impor kelompok barang konsumsi tercatat terkontraksi menjadi sebesar -1,45% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 202,78% (yoy).

1.2.3 Konstruksi

Pada triwulan I 2022, sektor konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar 7,66% (yoy), melambat dibandingkan triwulan IV 2021 yang tercatat sebesar 10,72% (yoy). Perlambatan ini disebabkan oleh telah selesainya beberapa proyek strategis Banten pada triwulan sebelumnya dan minimnya proyek PSN baru pada tahun 2022 seiring



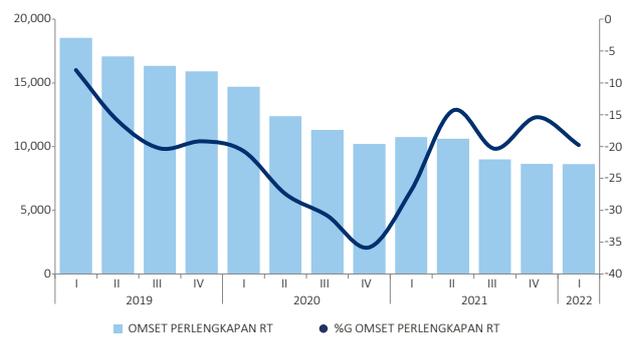
Sumber: Asosiasi Semen, diolah

Grafik I.23 Realisasi Pengadaan Semen Provinsi Banten

target penyelesaian seluruh PSN eksisting hingga tahun 2024. Menurut informasi dari PT Wijaya Karya Serang Panimbang selaku pengelola Seksi I dan II, pengerjaan PSN Jalan Tol Serang-Panimbang seksi II ruas Rangkasbitung-Cileles telah mencapai 23,31% hingga Maret 2022. Sementara itu, pada seksi III yang menjadi porsi pemerintah, pembebasan lahan masih terus dilakukan namun konstruksi fisik masih menunggu penyelesaian administrasi pendanaan bekerjasama dengan pemerintah Tiongkok. Selain itu, Tol Serpong-Cinere seksi II ruas Pamulang-Cinere telah selesai sejak November 2021 melengkapi seksi I ruas Serpong-Pamulang sehingga Panjang jalan tol ini yaitu 10,14 km. Di sisi lain, Proyek SPAM Karian-Serpong direncanakan baru akan mulai konstruksi pada Mei 2022.

Berbagai konstruksi fisik juga telah selesai dibangun oleh Pemprov Banten, diantaranya Banten International Stadium dan RSUD Banten yang telah mencapai tahap finalisasi. Kondisi tersebut juga tercermin dari pertumbuhan realisasi pengadaan semen yang melambat, menjadi sebesar 850,66 ribu ton atau tumbuh 9,2% (yoy), lebih rendah dari 10,2% (yoy) atau sebesar 895,91 ribu ton pada triwulan IV 2021.

Survei Perdagangan Eceran (SPE) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten juga menunjukkan kontraksi penjualan pada kelompok perlengkapan rumah tangga. Pada triwulan I 2022, kelompok tersebut tercatat berkontraksi lebih dalam yaitu sebesar -19,75% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -15,38% (yoy). Kondisi tersebut



Sumber: SPE Bank Indonesia, diolah

Grafik I.24 Pertumbuhan Omset Subkelompok Perlengkapan Rumah Tangga

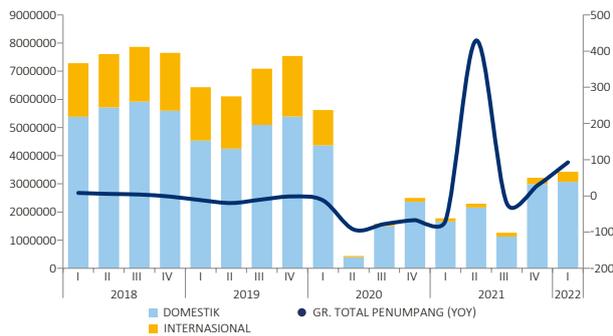
dipengaruhi oleh penurunan pada seluruh komponen pembentuknya, terutama penjualan semen, pasir, dan bahan konstruksi dari logam.

1.2.4 Transportasi dan Pergudangan

Sektor Transportasi dan Pergudangan pada triwulan I 2022 tumbuh 16,98% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2021 yang tumbuh 15,01% (yoy). Subsektor angkutan udara masih mendominasi sektor transportasi di Provinsi Banten, diikuti oleh subsektor Angkutan Darat dan kemudian subsektor Angkutan Laut. Sektor transportasi Provinsi Banten sangat berkaitan erat dengan aktivitas angkutan udara di Bandara Internasional Soekarno Hatta sebagai salah satu bandara utama di Provinsi Banten. Kinerja yang lebih baik pada triwulan I 2022 juga didorong salah satunya oleh kenaikan lalu lintas penumpang bandara Soekarno-Hatta sehubungan diselenggarakannya MotoGP Mandalika. Berdasarkan data PT Angkasa Pura II, penerbangan rute Jakarta – Lombok (pulang-pergi) meningkat hingga 155% secara mingguan⁵. Hal ini didukung meningkatnya jumlah lalu lintas pesawat dari 68 penerbangan menjadi 215 penerbangan. Pergerakan masyarakat pada periode triwulan I 2022 terutama menuju tempat stasiun transit mengalami perbaikan, yang tercermin dari GMI sebesar -8,0 dibandingkan -22,0 pada triwulan IV 2021.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, lalu lintas penumpang Bandara Soekarno-Hatta tercatat sebesar 3,43 juta orang atau

5 Sumber: www.metro.tempo.co; artikel Maret 2022



Sumber: BPS Provinsi Banten, diolah

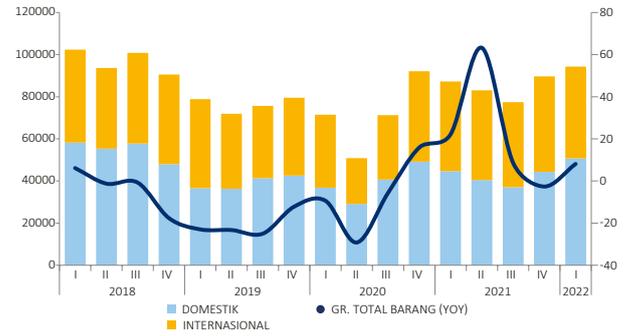
Grafik I.25 Data Penumpang Pesawat di Bandara Soekarno Hatta

terakselerasi sebesar 92,69% (yoy) pada triwulan I 2022, jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2021 sebesar 28,71% (yoy) atau sebanyak 3,21 juta penumpang. Pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta masih didominasi oleh penumpang domestik mencapai 89,58% atau sebanyak 3,07 juta penumpang. Sementara penumpang penerbangan internasional memiliki pangsa 10,42% atau sebanyak 357,34 ribu penumpang pada triwulan I 2022.

Senada hal tersebut, pengiriman barang melalui Bandara Soekarno-Hatta pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 94,27 ribu ton atau tumbuh sebesar 8,10% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2021 yang berkontraksi sebesar -2,64% (yoy) atau sebesar 89,65 ribu ton. Pengiriman barang didominasi oleh asal barang domestik dengan pangsa 53,80%, sementara pengiriman barang internasional berkontribusi sebesar 46,20% terhadap keseluruhan pengiriman.

1.2.5 Real Estate

Kinerja sektor *real estate* pada triwulan I 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,98% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,54% (yoy). Berdasarkan hasil SKDU, SBT realisasi kegiatan usaha sektor real estate tercatat sebesar 5,67% pada triwulan I 2022 atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,89%. Kondisi ini mengindikasikan pemulihan permintaan yang terus meningkat didorong pemanfaatan insentif fiskal berupa PPNDTP hingga Juni 2022 yang terus dimanfaatkan. Adapun segmen rumah subsidi di triwulan 1-2022 meningkat 26%.



Sumber: BPS Provinsi Banten, diolah

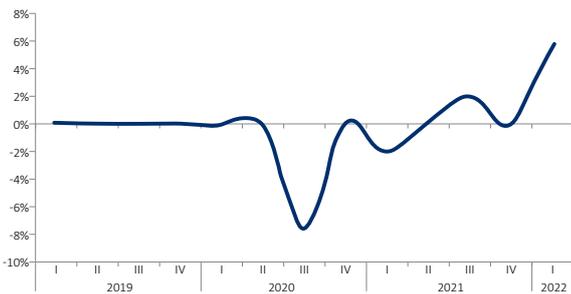
Grafik I.26 Data Pengiriman Barang Menggunakan Moda Angkutan Udara di Bandara Soekarno-Hatta

Untuk segmen komersial mengalami peningkatan yang lebih besar, yaitu 101%⁶. Berdasarkan hasil FGD dengan REI DPD Banten, kinerja penjualan properti hingga awal April 2022, tercatat telah terjual 1.094 unit hunian subsidi, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebanyak 870 unit hunian. Sementara pada hunian komersial, telah terjual 103 unit hunian dibandingkan 51 unit pada periode yang sama tahun 2021.

Terkait dengan tekanan kenaikan harga bahan material bangunan akibat perang Rusia-Ukraina, para pengembang berencana akan melakukan penyesuaian harga jual hunian, baik untuk hunian subsidi dan non subsidi. Namun demikian, karena daya beli belum pulih sehingga para pengembang properti terutama untuk hunian tipe menengah ke bawah mengharapkan adanya dukungan kebijakan pemerintah guna mengkompensasi kondisi yang terjadi. Adapun minat masyarakat terhadap hunian di Banten terbagi menjadi 2 (dua). Pertama untuk wilayah Serang dan sekitarnya pada kisaran Rp300 juta s.d Rp500 juta sementara untuk wilayah Tangerang Raya antara Rp500 juta s.d Rp2 miliar. Para anggota REI sepakat untuk menahan harga jual hingga akhir tahun 2022 atau pasca berakhirnya program PPN DTP 2022⁷. Hal ini mempertimbangkan agar program PPN DTP berjalan efektif dan mengingat daya beli masyarakat yang belum pulih secara penuh.

Adapun berdasarkan data pembiayaan perbankan untuk properti di Provinsi Banten, kredit properti tercatat tumbuh sebesar 21,88% (yoy), atau meningkat

6 Berdasarkan hasil FGD dengan Asosiasi REI DPD Banten
7 Sumber: www.ekonomi.bisnis.com; 20 Mei 2022

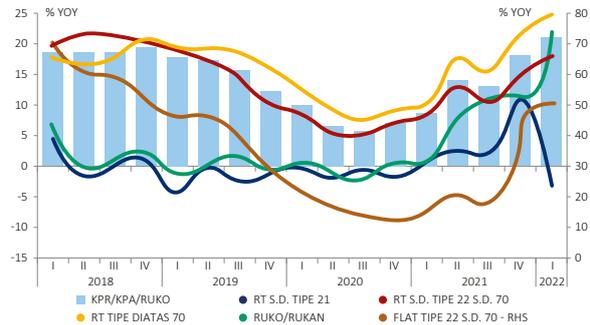


Sumber: SKDU Bank Indonesia, diolah

Grafik I.27 SBT Kegiatan Usaha Real Estate Provinsi Banten

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 18,29% (yoy). Seluruh jenis kelompok property mengalami peningkatan kecuali hunian rumah tipe 21 yang mengalami kontraksi. Pangsa kredit terbesar pada triwulan I 2022 yaitu pada rumah tinggal (RT) tipe 22 s.d 70 m² mencapai 48,16% dan RT tipe di atas 70 m² sebesar 40,96%. Kedua jenis hunian tersebut masing-masing tumbuh positif sebesar 16,02% (yoy) dan 28,62% (yoy).

Ke depan, dengan memperhatikan kondisi penyebaran kasus pandemi Covid-19 yang melandai, tren pemulihan ekonomi makro yang semakin baik, diperlukan berbagai sinergi *stakeholders* untuk mendorong optimisme sektor properti, yaitu (1) pemerintah pusat perlu menetapkan harga baru untuk rumah tapak dan rumah subsidi dengan mempertimbangkan kenaikan harga bahan material; (2) memperluas dan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik I.28 Pertumbuhan Kredit Properti Provinsi Banten

mengefisiensikan proses penerbitan surat keputusan bagi penerima manfaat program rumah subsidi; (3) melakukan sosialisasi massif atau perubahan kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai syarat bangun hunian; (4) menyempurnakan kebijakan periode pelaksanaan program PPN DTP properti yang berakhir Desember 2022 dengan fasilitas serah terima bangunan hingga akhir 2023 karena mengingat proses indent rumah; serta (5) melakukan *review* kebijakan periode pelaksanaan fasilitas restrukturisasi dan LTV properti yang dinilai sangat membantu daya beli properti masyarakat dengan suku Bunga yang tetap rendah.



Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB II

Keuangan Pemerintah

Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk wilayah Banten di tahun 2022 dari sisi pendapatan sedikit mengalami peningkatan, sementara dari sisi belanja mengalami penurunan. Total pagu pendapatan Pemerintah Provinsi Banten dan 8 (delapan) Kabupaten/kota pada tahun 2022 mencapai Rp35,69 triliun, meningkat sebesar 0,2% (yoy) dibandingkan tahun 2021 yang tercatat senilai Rp35,63 triliun. Sementara pagu Belanja pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 7,7% (yoy) dari Rp41,50 triliun pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp38,31 triliun pada tahun 2022.

Hingga triwulan I 2022, realisasi Pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Banten dan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten mencapai Rp5,96 triliun atau lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2021 senilai Rp6,27 triliun. Kondisi yang relatif sama juga terjadi pada pos belanja dimana persentase realisasi belanja APBD Pemda se-Provinsi Banten baru mencapai 16,7%, lebih rendah dari 17,6% pada triwulan I 2021. Secara nominal realisasi belanja tersebut tercatat senilai Rp4,29 triliun, atau tumbuh 13,3% (yoy) dibandingkan tahun 2021 senilai Rp3,79 triliun, dengan persentase realisasi belanja triwulan I 2022 sebesar 11,2% dari APBD.

Di sisi lain, Pagu Alokasi Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Banten tahun 2022 sebesar Rp13,91 triliun atau turun 9,74% (yoy) dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp15,41 triliun. Selanjutnya Persentase realisasi APBN triwulan I 2022 di Provinsi Banten terpantau meningkat menjadi 16,0% dibandingkan triwulan I 2021 yang tercatat sebesar 14,4%. Persentase realisasi didorong pada jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja pegawai.



ANGARAN BELANJA GABUNGAN

Tw I 2022
16,70%

Terhadap Anggaran 2021

16,70% Tw IV 2021



REALISASI BELANJA APBN

Tw I 2022
16,00%

Terhadap Anggaran 2021

14,40% Tw IV 2021



REALISASI BELANJA PEMERINTAH PROVINSI

Tw I 2022
14,50%

Terhadap Anggaran 2021

7,90% Tw IV 2021



REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI

Tw I 2022
18,60%

Terhadap Anggaran 2021

18,60% Tw IV 2021



REALISASI BELANJA PEMERINTAH KAB/ .KOTA

Tw I 2022
9,80%

Terhadap Anggaran 2021

10,00% Tw IV 2021



Tabel II.1 Perkembangan dan Realisasi APBD Pemerintah Daerah se-Banten

URAIAN	2021	S.D. TW I-2021		2022	S.D. TW I-2022	
	PAGU	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	(%)
Total Pendapatan Daerah	35.636.211	6.279.966	17,6%	35.697.163	5.968.884	16,7%
Total Belanja Daerah	41.502.198	3.796.348	9,1%	38.316.131	4.299.952	11,2%
Surplus / (Defisit)	-5.865.987	2.483.618		-2.618.968	1.668.933	

Sumber: BPKAD se-Provinsi Banten (diolah) | Pagu dan Realisasi pasca APBD Perubahan dalam Jutaan Rp | Pagu Pemerintah Provinsi Banten tahun 2021 merupakan pagu murni 2021

2.1 KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN & KABUPATEN/KOTA

Pada tahun 2022, nominal pagu pendapatan pada APBD pemerintah daerah se-Provinsi Banten tercatat mengalami kenaikan walaupun pagu belanja mengalami penurunan. Sementara itu, nominal realisasi pendapatan mengalami penurunan dan realisasi belanja meningkat.

Total pagu pendapatan Pemerintah Provinsi Banten dan 8 (delapan) Kabupaten/kota pada tahun 2022 mencapai Rp35,69 triliun, meningkat sebesar 0,2% (yoy) dibandingkan tahun 2021 yang tercatat senilai Rp35,63 triliun. Sementara pagu Belanja pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 7,7% (yoy) dari Rp41,50 triliun pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp38,31 triliun pada tahun 2022.

Hingga triwulan I 2022, realisasi Pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Banten dan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten mencapai Rp5,96 triliun atau lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2021 senilai Rp6,27 triliun. Kondisi yang relatif sama juga terjadi pada pos belanja dimana persentase realisasi belanja APBD Pemda se-Provinsi Banten baru mencapai 16,7%, lebih rendah dari 17,6% pada triwulan I 2021. Secara nominal realisasi belanja tersebut tercatat senilai Rp4,29 triliun, atau tumbuh 13,3% (yoy) dibandingkan tahun 2021 senilai Rp3,79 triliun, dengan persentase realisasi belanja sebesar 11,2% dari APBD.

2.2 KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2021 didorong penurunan

Pendapatan Transfer. Total pendapatan daerah tercatat senilai Rp10,64 triliun, mengalami penurunan 8,1% (yoy) dari nominal pendapatan tahun 2021 senilai Rp11,58 triliun. Senada hal tersebut, pagu Belanja mengalami penurunan sebesar 29,7% (yoy) dari Rp15,95 triliun menjadi Rp11,22 triliun pada tahun 2022. Komponen belanja yang mengalami penurunan yaitu belanja modal senilai Rp3,44 triliun dari sebelumnya dianggarkan Rp5,52 triliun menjadi Rp2,07 triliun.

Realisasi Pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Banten Triwulan I 2022 senilai Rp1,98 triliun atau mencapai 18,6% dari pagu. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan persentase realisasi Triwulan I 2021 sebesar 14,1%. Lebih rinci, nominal realisasi PAD senilai Rp1,50 triliun tumbuh 27,5% (yoy) dibandingkan Triwulan I 2021 sebesar Rp1,18 triliun. Persentase realisasi PAD tercatat 19,3% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh meningkatnya realisasi pendapatan transfer yang mencapai 16,9% dari pagu Rp2,84 triliun.

Dari sisi pos belanja daerah, realisasi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Banten Triwulan I 2022 sebesar Rp1,63 triliun atau 14,5% dari pagu. Secara nominal dan persentase, angka realisasi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1,25 triliun atau 7,9% dari pagu. Berdasarkan capaian tersebut, APBD Pemprov Banten pada Triwulan I 2022 tercatat surplus sebesar Rp351,79 miliar dibandingkan target defisit APBD 2022 sebesar Rp577,30 miliar.

2.2.1 Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Banten

Struktur komponen Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Banten didominasi oleh PAD dan pendapatan

Tabel II.2 Perkembangan dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Banten

URAIAN	2021	S.D. TW I-2021		2022	S.D. TW I-2022	
	APBD	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	(%)
Pendapatan Daerah :	11.584.534	1.644.107	14,1%	10.645.880	1.984.461	18,6%
- Pendapatan Asli Daerah	7.246.729	1.180.025	16,3%	7.793.646	1.504.180	19,3%
- Pendapatan Transfer	4.331.605	464.082	10,6%	2.846.035	480.281	16,9%
- Lain-lain pendapatan yang sah	6.200	-	0,0%	6.200	-	0,0%
Belanja Daerah :	15.956.799	1.253.678	7,9%	11.223.180	1.632.668	14,5%
- Belanja Operasional	7.375.741	682.961,10	9,3%	6.160.141	738.601	12,0%
- Belanja Modal	5.525.534	1.743	0,0%	2.078.238	299.698	14,4%
- Belanja Tak Terduga	35.814	17.753	49,6%	84.439	292	0,3%
- Belanja Transfer	3.019.710	551.222	18,3%	2.900.363	594.077	20,5%
Surplus / (Defisit)	-4.372.265	390.429		-577.300	351.793	
Penerimaan Pembiayaan Daerah :	4.437.265	497.838	11,4%	632.800	-	0,0%
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	957.241	957.241	100,0%	681.416	681.416	100,0%
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah :	65.000	-	0,0%	55.500	-	0,0%
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	65.000	-	0,0%	20.000	-	0,0%
Pembiayaan Netto	4.372.265	497.838	11,5%	577.300		0,0%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	-	681.416		-	758.453	

Sumber: BPKAD Provinsi Banten | Angka Pagu dan Realisasi dalam Jutaan Rp | Pagu Pemerintah Provinsi Banten tahun 2021 merupakan pagu murni 2021

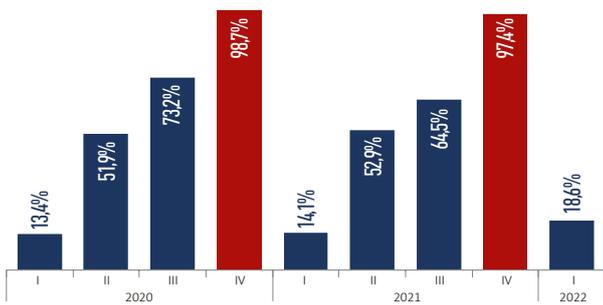
Tabel II.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Banten per Komponen (Rp juta)

URAIAN	2021	2022	S.D. TW I-2022	
	APBD	APBD	REALISASI	(%)
Pendapatan Asli Daerah :	7.246.729	7.793.646	1.504.180	19,3%
- Pajak Daerah	6.746.237	7.284.406	1.459.650	20,0%
- Retribusi Daerah	12.036	20.285	1.631	8,0%
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	52.966	52.966	-	0,0%
- Lain-lain PAD yang Sah	435.490	435.989	42.899	9,8%
Pendapatan Transfer	4.331.605	2.846.035	480.281	16,9%
- Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	573.404	612.396	121.912	19,9%
- Dana Alokasi Umum	1.070.448	1.071.260	357.087	33,3%
- Dana Alokasi Khusus :	2.642.787			
1) DAK Fisik	135.973	152.422	-	0,0%
2) DAK Non Fisik	2.506.814	994.469	1.283	0,1%
- Pendapatan Transfer Lainnya	44.966	15.487	-	0,0%
Lain-lain Pendapatan :	6.200	5.523	5.523	100,0%
Pendapatan Hibah	6.200	6.200	-	0,0%
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Total Pendapatan	11.584.534	10.645.203	1.989.984	18,7%

Sumber: BPKAD Pemerintah Provinsi Banten, diolah

transfer dengan pangsa masing-masing sebesar 73,2% dan 26,7%. Pagu PAD tahun 2022 mengalami peningkatan 7,5% (yoy) menjadi sebesar Rp7,79

triliun. Adapun Pendapatan Transfer tercatat senilai Rp2,84 triliun dan komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan nilai Rp5,52 miliar.



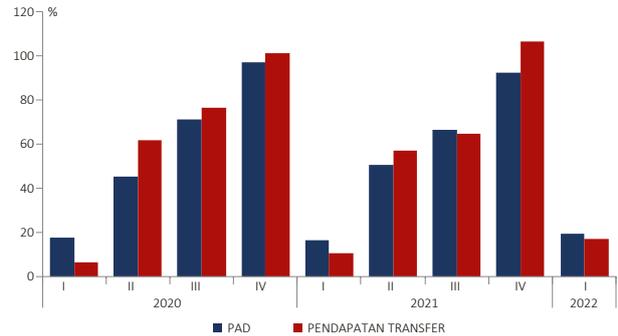
Sumber: BPKAD Provinsi Banten, diolah

Grafik II.1 Realisasi Pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Banten

Realisasi pada triwulan I 2022 sebesar 18,7%. Menurut jenis pendapatannya, realisasi PAD sebesar 19,3%, dan Pendapatan transfer 16,9%

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggaran PAD¹ Pemerintah Provinsi Banten mengalami kenaikan seiring optimisme masyarakat dan perusahaan yang meningkat. Adapun pelanggaran kebijakan PPKM dan protokol kesehatan yang ketat utamanya pada wilayah industri, pusat perdagangan dan transportasi mampu mendorong tersedianya lapangan kerja dan perbaikan daya beli masyarakat², sehingga dapat mendorong perolehan pendapatan pajak yang lebih tinggi dan ditengarai mendorong perolehan pajak yang lebih tinggi.



Sumber: BPKAD Provinsi Banten, diolah

Grafik II.2 Realisasi Pendapatan per Jenis Pendapatan¹

Realisasi penerimaan PAD hingga triwulan I 2022 tercatat sebesar Rp1,98 triliun atau mencapai 18,6% dari pagu yang ditetapkan. Capaian ini terutama ditopang oleh realisasi pajak daerah sebesar 20,0% atau senilai Rp1,45 triliun. Lebih rinci, kinerja perolehan pajak utamanya ditopang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akibat adanya insentif fiskal berupa PPNBM DTP dan insentif uang muka atau LTV kendaraan bermotor. Adapun perolehan PKB pada triwulan I 2022 mencapai 21,4% atau senilai Rp725,86 miliar dan perolehan BBNKB mencapai 25,3% atau senilai Rp568,21 miliar.

Pendapatan Transfer³

Pada tahun 2022, Pagu pendapatan transfer atau transfer keuangan dari pemerintah pusat

Tabel II.4 Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Banten (Rp juta)

URAIAN	2021	S.D. TW I-2021		2022	S.D. TW I-2022	
	PAGU	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	(%)
Pajak kendaraan bermotor	3.003.723	640.249	21,3%	3.391.550	725.868	21,4%
Bea balik nama kendaraan bermotor	2.214.403	401.942	18,2%	2.245.126	568.210	25,3%
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	791.391	188.831	23,9%	860.120	158.896	18,5%
Pajak air permukaan	36.527	9.651	26,4%	39.349	6.676	17,0%
Pajak Rokok	700.193	140.610	20,1%	748.261	-	0,0%
Total Pajak	6.746.237	1.381.283	20,5%	7.284.406	1.459.650	20,0%

Sumber: BPKAD Provinsi Banten, diolah

- 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya.
- 2 Berdasarkan Data BPS Banten, pada Sakernas Agustus 2021 jumlah pengangguran karena covid-19 tercatat berkurang menjadi 99.850 orang dari posisi Agustus 2020 sebesar 205.240 orang. Sementara itu, berdasarkan hasil survei konsumen KPw BI Banten hingga Desember 2021, IKK menunjukkan optimisme masyarakat yang semakin membaik meskipun masih dibawah level batas optimism.

- 3 Pendapatan Transfer atau Transfer Keuangan ke Daerah merupakan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan di daerah baik yang penggunaannya telah ditetapkan secara khusus maupun yang dapat dialokasikan disesuaikan kebutuhan pemda. Komponen Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK utamanya diperuntukan untuk DAK Non Fisik yaitu dukungan pendanaan khusus untuk belanja operasional berbasis unit cost seperti untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Tunjangan Profesi Guru.



Sumber: BPKAD Provinsi Banten, diolah

Grafik II.3 Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Provinsi Banten

menurun, namun persentase dan nominal realisasi tercatat lebih tinggi. Pagu pendapatan transfer senilai Rp2,84 triliun atau terkontraksi -34,3% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp4,33 triliun. Hingga triwulan I 2022, pemrov Banten merealisasikan pendapatan transfer mencapai 16,9%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,7% atau senilai Rp480,28 miliar. Adapun porsi pendapatan transfer terutama pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Persentase realisasi DAU dan DAK masing-masing sebesar 33,3% dan 0,1%.

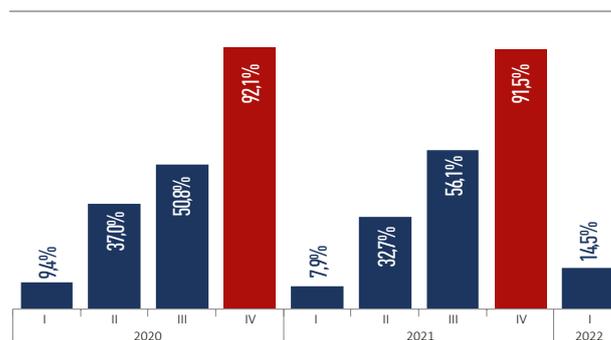
Derajat Desentralisasi Fiskal

Tingkat kemandirian fiskal Provinsi Banten mengalami peningkatan sebagaimana tercermin dari Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) tahun 2022 sebesar 73,2% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 62,6%. Kenaikan pagu PAD dalam APBD yang lebih tinggi sejalan dengan perbaikan kinerja sektor ekonomi pasca berbagai pembatasan pada tahun sebelumnya.

Tabel II.5 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Banten (Rp juta)

URAIAN	2021	S.D. TW I-2021		2022	S.D. TW IV-2022	
	PAGU	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	(%)
Belanja Pegawai	1.907.308	403.815	21,2%	2.158.806	413.429	19,2%
Belanja Barang dan Jasa	3.040.658	276.409	9,1%	3.432.136	325.172	9,5%
Belanja Bunga	50.577	2.737	5,4%	1.576	-	0,0%
Belanja Hibah	2.309.640	-	0,0%	512.548	-	0,0%
Belanja Bantuan Sosial	67.557	-	0,0%	55.076	-	0,0%
Belanja Modal	5.525.534	1.743	0,0%	2.078.238	299.698	14,4%
Belanja Tak terduga	35.814	17.753	49,6%	84.439	292	0,3%
Belanja Transfer	3.019.710	551.222	18,3%	2.900.363	594.077	20,5%
Total Belanja	15.956.799	1.253.678	7,9%	11.223.180	1.632.668	14,5%

Sumber: BPKAD Provinsi Banten | Angka pagu dan realisasi dalam jutaan Rp



Sumber: BPKAD Provinsi Banten, diolah

Grafik II.4 Realisasi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Banten

Kenaikan DDF juga didorong oleh dominasi APBD Banten, dimana lebih dari 70% merupakan capaian peningkatan PAD.

2.2.2 Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Banten

Postur anggaran belanja pemrov Banten tahun 2022 didominasi oleh belanja barang dan jasa diikuti belanja transfer, serta belanja pegawai dan belanja modal. Penurunan pagu belanja pada tahun 2022 terutama didorong oleh penurunan pada belanja modal dari Rp5,52 triliun menjadi Rp2,97 triliun. Selain itu, belanja hibah juga mengalami penurunan dari sebelumnya Rp2,30 triliun menjadi Rp512,54 miliar.

Secara umum, persentase realisasi belanja Pemerintah Provinsi Banten pada triwulan I 2022 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2021. Persentase realisasi belanja hingga akhir triwulan I 2022 sebesar 14,5%, lebih tinggi dibanding realisasi triwulan I

Tabel II.6 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Banten (Rp juta)

URAIAN	2021	S.D. TW I-2021		2022	S.D. TW I-2022	
	PAGU	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	(%)
Belanja Modal Tanah	943.836	397	0,04%	434.696	-	0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	648.814	749	0,12%	237.828	651	0,27%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.243.126	597	0,03%	976.552	298.746	30,59%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.660.037	-	0,00%	390.465	301	0,08%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.406	-	0,00%	38.696	-	0,00%
Belanja Modal lain-lain	316	-	-	-	-	-
Total Belanja Modal	5.525.534	1.743	0,0%	2.078.238	299.698	14,4%

Sumber: BPKAD Provinsi Banten

2021 sebesar 7,9%. Hal ini terutama terjadi pada kelompok belanja transfer dan kelompok belanja pegawai. Belanja transfer Pemda kabupaten dan kota dapat direalisasikan mencapai 20,5% dari pagu senilai Rp2,90 triliun.

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, menteri keuangan dan menteri dalam negeri telah memberikan arahan agar proses realisasi anggaran dapat dilakukan secara *front loading* dengan proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan mulai akhir tahun sebelumnya.

Secara nominal capaian realisasi belanja modal Pemprov Banten pada triwulan I 2022 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja modal tercatat Rp299,69 miliar dibandingkan Rp1,74 miliar pada triwulan I 2021. Peningkatan belanja ini seiring persentase realisasi yang lebih tinggi pada belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.

2.3 KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN & KOTA DI PROVINSI BANTEN

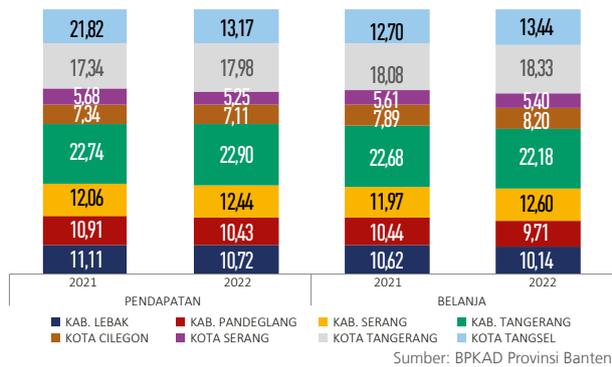
Total anggaran pendapatan delapan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2022 sebesar Rp25,05 triliun, meningkat sebesar 4,2% (yoy) dibandingkan anggaran tahun 2021 sebesar Rp24,05 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, total anggaran belanja yang ditargetkan pada tahun 2022 sebesar Rp27,09 triliun, meningkat sebesar 6,1% (yoy) dibandingkan rencana tahun 2021 sebesar Rp25,54 triliun. Hingga triwulan I 2022, realisasi pendapatan delapan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten mencapai 15,9%. Dari sisi nominal, realisasi mengalami penurunan menjadi sebesar Rp3,98 triliun dari sebelumnya Rp4,63 triliun di triwulan I 2021. Sementara itu, realisasi Belanja pada triwulan I 2022 mencapai 9,8%, yang mana lebih rendah dibandingkan triwulan I 2021 sebesar 10,0%.

Pagu pendapatan terbesar terdapat di wilayah Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) dengan total pangsa mencapai 54,06%. Proporsi ini ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah

Tabel II.7 Perkembangan dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten (Rp juta)

URAIAN	2021	S.D. TW I-2021		2022	S.D. TW I-2022	
	PAGU	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	(%)
Total Pendapatan Daerah	24.051.677	4.635.860	19,3%	25.051.283	3.984.423	15,9%
Total Belanja Daerah	25.545.399	2.542.670	10,0%	27.092.951	2.667.283	9,8%
Surplus / (Defisit)	-1.493.722	2.093.190		-2.041.668	1.317.140	

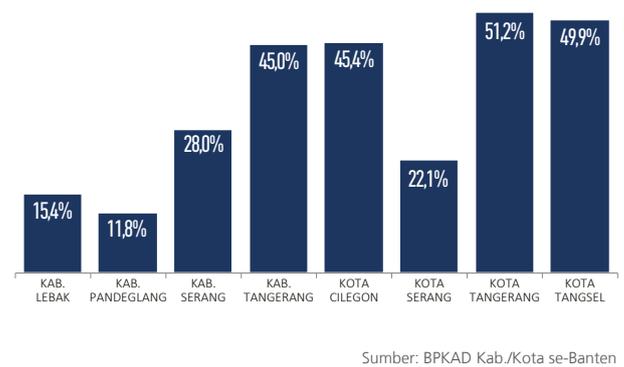
Sumber: BPKAD se-Provinsi Banten (diolah)



Grafik II.5 Proporsi Pagu Pendapatan dan Belanja Pemda Kab./Kota

dan Bangunan (BPHTB). Senada dengan pendapatan, belanja daerah juga didominasi oleh wilayah Tangerang Raya mencapai 53,95%.

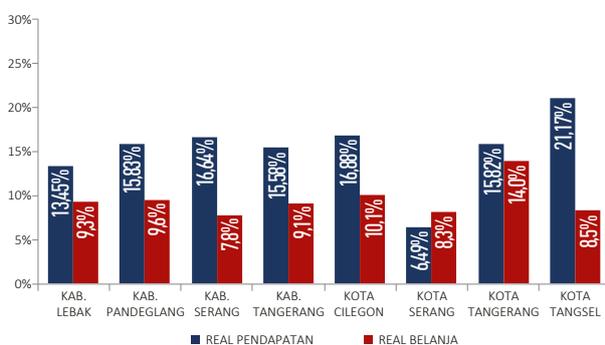
Dari sisi Kemandirian daerah yang tercermin dari Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)⁴, Kota Tangerang merupakan daerah yang memiliki ketergantungan terendah terhadap dana pemerintah pusat. DDF Kota Tangerang sebesar 51,2%, diikuti Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon Tangerang masing-masing sebesar 49,9% dan 45,4%. Capaian ini tidak lepas dari peran wilayah sebagai lokasi aktivitas industri pengolahan, perdagangan, dan real estate. Di sisi lain, daerah dengan DDF terendah yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dengan DDF masing-masing sebesar 11,8% dan 15,4%. Ke depan, rencana pengembangan pusat pertumbuhan baru di sekitar



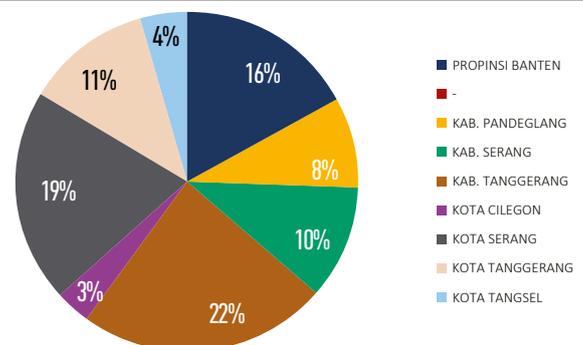
Grafik II.6 Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kab./Kota

Jalan Tol Serang-Panimbang diharapkan dapat berkontribusi dalam pembentukan PAD di wilayah selatan. Khusus untuk Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten, DDF tercatat 22,1%.

Secara kumulatif, realisasi anggaran pendapatan dan belanja triwulan I 2022 pada delapan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten adalah sebesar 15,9% dan 9,8% terhadap pagu anggaran yang ditetapkan. Persentase realisasi pendapatan terbesar terjadi di Kota Tangerang Selatan mencapai 21,17%, diikuti Kota Cilegon sebesar 16,88%. Adapun daerah dengan realisasi terendah adalah Kota Serang dan Kabupaten Lebak masing-masing sebesar 6,49% dan 13,45%. Lebih rinci, realisasi PAD terbesar terjadi di Kota Tangerang Selatan mencapai 21,45%, diikuti oleh Kabupaten Serang mencapai 18,47%.



Grafik II.7 Persentase Realisasi APBD Kab./Kota



Grafik II.8 Pangsa Pagu APBN Per Pemerintah Daerah (%)

⁴ DDF digunakan untuk mengukur kemandirian anggaran daerah dalam membiayai aktivitas pemerintahannya yang dihitung dengan membandingkan PAD dan total pendapatan. Semakin tinggi DDF maka semakin kecil ketergantungan daerah terhadap dana pemerintah pusat, serta sebaliknya.

Tabel II.8 APBN di Provinsi Banten Per Jenis Belanja

URAIAN	2021	S.D. TW I-2021		2022	S.D. TW I-2022	
	PAGU	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	(%)
Belanja Pegawai	3.792.441	685.697	18,1%	3.662.404	677.216	18,5%
Belanja Barang	4.293.936	483.812	11,3%	3.947.337	458.096	11,6%
Belanja Modal	3.034.672	343.905	11,3%	1.935.484	177.013	9,1%
Belanja Bansos	12.183	832	6,8%	13.702	6.559	47,9%
DAK Fisik	3.148.040	606.432	19,3%	3.129.031	841.968	26,9%
Dana Desa	1.135.032	95.528	8,4%	1.226.534	61.763	5,0%
Total APBN	15.416.304	2.216.206	14,4%	13.914.492	2.222.615	16,0%

Sumber: Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten | Angka Pagu dan Realisasi dalam Jutaan Rupiah

Dari sisi belanja daerah, akumulatif delapan Pemerintah Kab./Kota merealisasikan belanja pada triwulan I 2022 sebesar 9,8% dengan realisasi tertinggi terjadi di Kota Tangerang sebesar 13,96%, diikuti oleh Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang sebesar 10,07% dan 9,60%. Sementara realisasi belanja terendah di Kabupaten Serang sebesar 7,82% dan Kota Tangerang Selatan 8,46%.

2.4 APBN DI PROVINSI BANTEN

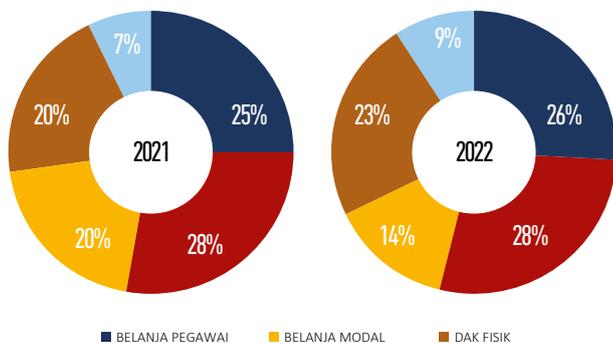
Pagu Alokasi Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Banten tahun 2022 sebesar Rp13,91 triliun atau turun 9,74% (yoy) dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp15,41 triliun. Hal ini utamanya terjadi pada belanja modal dan belanja barang.

Anggaran belanja APBN di Provinsi Banten utamanya didominasi oleh belanja barang, belanja pegawai, dan DAK Fisik dimana secara akumulatif mencapai 77,2% dari total alokasi belanja APBN di Provinsi

Banten. Anggaran tersebut ditujukan untuk belanja Pemerintah Pusat di daerah⁵ antara lain berupa belanja pegawai kementerian dan lembaga di Provinsi Banten, pelaksanaan proyek-proyek strategis baik infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, serta program lainnya mendukung pemulihan ekonomi. Pada tahun 2022, Alokasi belanja barang sebesar Rp3,94 triliun atau dengan pangsa 28,4%. Sementara itu, alokasi belanja pegawai dan DAK Fisik masing-masing tercatat sebesar Rp3,66 triliun dan Rp3,12 triliun atau memiliki pangsa 26,3% dan 22,5% terhadap total alokasi APBN di Provinsi Banten.

Berdasarkan wilayah, alokasi pagu APBN terbesar di Provinsi Banten dialokasikan ke Pemerintah Provinsi Banten yaitu sebesar Rp2,25 triliun dengan pangsa 16,2%. Sementara itu, di tingkat Kabupaten/Kota alokasi terbesar pada tahun 2022 ditujukan ke Kabupaten Tangerang sebesar Rp3,09 triliun dan Kota Serang sebesar Rp2,72 triliun dengan pangsa masing-masing sebesar 22,2% dan 19,6%. Sementara itu, alokasi APBN terkecil berada di Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan masing-masing senilai Rp401,83 miliar dan Rp534,955 miliar dengan pangsa masing-masing 2,9% dan 3,8%.

Hingga triwulan I 2022, realisasi belanja APBN di Provinsi Banten mencapai 16,0% lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan I 2021 sebesar 14,4%. Menurut jenis belanjanya, kenaikan ini didorong realisasi yang lebih tinggi pada Belanja Bansos, DAK, Belanja Pegawai masing-masing sebesar 47,9%, 26,9%, dan 18,5%



Sumber: Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten

Grafik II.9 Pangsa Pagu APBN Per Jenis Belanja (%)

⁵ Pembahasan belanja alokasi APBN ini tidak termasuk belanja perimbangan pemerintah pusat berupa DBH dan DAU

Tabel II.9 Alokasi Dana Desa di Provinsi Banten (Rp juta)

URAIAN	2022	S.D. TW I-2022	
	PAGU	REALISASI	(%)
Kab Lebak	318.422	53.542	16,8%
Kab Pandeglang	293.753	3.216	1,1%
Kab Serang	298.379	-	0,0%
Kab Tangerang	315.981	5.005	1,6%
Total Provinsi Banten	1.226.534	61.763	5,0%

Sumber: Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten
| Angka Pagu dan Realisasi dalam Jutaan Rupiah

Sampai triwulan I 2022, penyaluran dana desa di Provinsi Banten secara kumulatif tercapai 5, % atau secara nominal sebesar Rp61,76 miliar dari pagu sebesar Rp1,22 triliun. Persentase pagu dana desa tertinggi pada Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang. Di sisi realisasi, realisasi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Lebak sebesar 16,8% sementara Kabupaten Serang masih belum menyalurkan Dana Desa.



BAB III

Perkembangan Inflasi Daerah

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Banten pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 3,00% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,91% (yoy). Laju inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan historis 3 tahun terakhir yaitu sebesar 2,41% (yoy) serta realisasi inflasi Nasional dan regional Jawa yang masing-masing tercatat sebesar 2,64% (yoy) dan 2,49% (yoy).

Berdasarkan kelompok pengeluarannya, kenaikan tekanan inflasi tahunan pada triwulan I 2022 disebabkan oleh kenaikan andil pada hampir seluruh kelompok pengeluaran, yakni 10 (sepuluh) dari 11 (sebelas) kelompok. Adapun kenaikan terutama terjadi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan tembakau serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga serta Kelompok Transportasi. Apabila dilihat dari komoditasnya, minyak goreng, mobil, daging ayam ras, sewa rumah dan rokok kretek filter menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada triwulan ini.

Secara spasial, pada triwulan I 2022 meningkatnya inflasi tahunan Banten didorong oleh kenaikan harga yang terjadi di seluruh kota pantauan IHK, yakni Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon.



INFLASI BULANAN

0,69%

Triwulan IV 2021



INFLASI TAHUN KALENDER BANTEN

1,91%

Triwulan IV 2021



INFLASI TAHUNAN BANTEN

1,91%

Triwulan IV 2021



INFLASI TAHUNAN PULAU JAWA

1,47%

Triwulan IV 2021

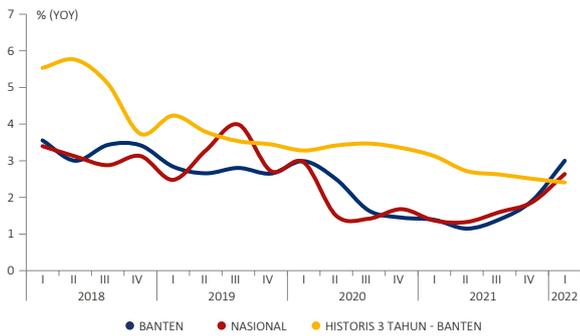


RATA-RATA INFLASI IHK BANTEN

2,51%

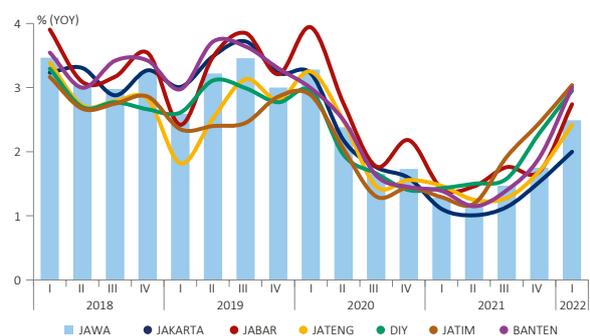
Rata-rata 3 tahun (yoy)





Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik III.1 Inflasi Banten dan Nasional (yoy)



Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik III.2 Inflasi Banten dan Provinsi Se-Jawa (yoy)

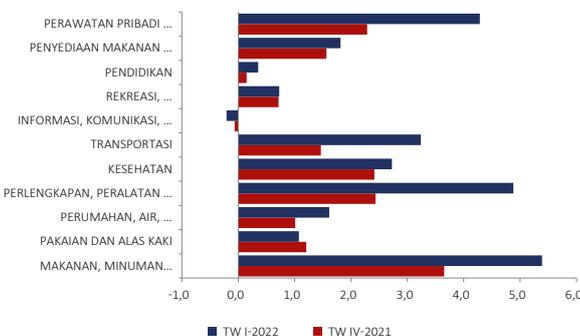
3.1 INFLASI BANTEN TRIWULAN I 2022

Inflasi Provinsi Banten pada triwulan I 2022 tercatat sebesar **3,00% (yoy)**, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar **1,91% (yoy)**. Laju inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan historis 3 tahun terakhir yaitu sebesar 2,41% (yoy) serta realisasi inflasi Nasional dan regional Jawa yang masing-masing tercatat sebesar 2,49% (yoy) dan 2,49% (yoy). Khusus untuk regional Jawa, inflasi tertinggi terjadi di Jawa Timur sebesar 3,04% (yoy), sedangkan inflasi terendah terjadi di DKI Jakarta sebesar 2,00% (yoy).

Pada triwulan I 2022, peningkatan tekanan harga yang terjadi pada dari 10 (sepuluh) kelompok pengeluaran memberikan andil pada kenaikan inflasi tahunan. Dari jumlah tersebut, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (andil: 1,45%); Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya (0,37%); dan Kelompok Transportasi (0,35%)

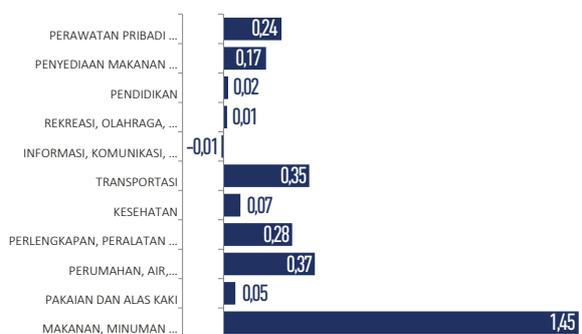
menjadi 3 kelompok terbesar yang menyumbang inflasi. Sementara itu, kenaikan laju inflasi tahunan (yoy) terutama terjadi pada Kelompok Perlengkapan, peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya; serta Kelompok Transportasi.

Berdasarkan andil tahunan, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau masih memberikan andil yang tertinggi di antara 11 kelompok pengeluaran serta mengalami kenaikan tekanan pada triwulan I 2022. Komoditas kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan andil inflasi yang cukup besar pada inflasi Provinsi Banten terutama minyak goreng, daging ayam ras, rokok kretek filter, tahu mentah, serta tempe. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Baku Rumah Tangga juga menyumbangkan tekanan inflasi pada komoditas sewa rumah dan bahan bakar rumah tangga. Selanjutnya, Kelompok Transportasi pada komoditas mobil.



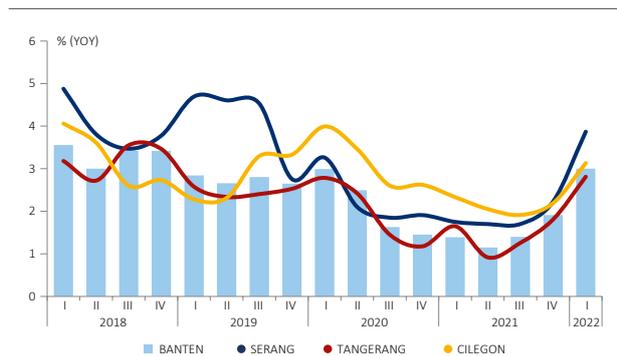
Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik III.3 Inflasi Kelompok Pengeluaran Provinsi Banten (% yoy)



Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik III.4 Andil Inflasi yoy Kelompok Pengeluaran Provinsi Banten (%)



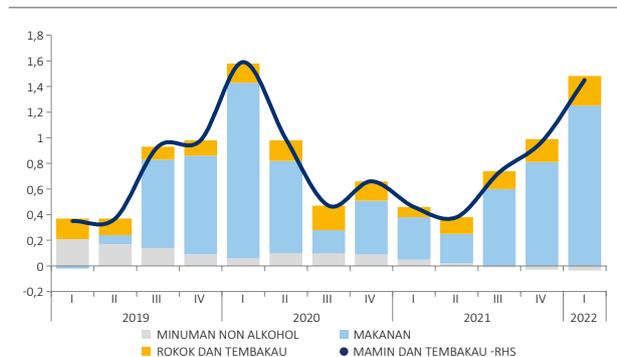
Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik III.5 Inflasi Kota Sampel IHK Banten (yoy)

3.2. INFLASI BANTEN BERDASARKAN KELOMPOK PENGELUARAN

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Pada triwulan I 2022, kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 5,39% (yoy) dengan andil tahunan sebesar 1,45%. Laju inflasi ini lebih tinggi daripada triwulan IV 2021 sebesar 3,65% (yoy). Hal ini terutama didorong oleh kenaikan andil subkelompok makanan (1,25%) terutama pada komoditas minyak goreng, daging ayam ras, tahu mentah, tempe dan pepaya serta andil subkelompok rokok dan tembakau (0,23%) terutama pada komoditas rokok kretek filter dan rokok putih. Kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi tekanan pada harga bahan baku, adapun menurut data GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), harga CPO (CIF Rotterdam) pada Maret 2022 mencapai USD1.813 per ton, meningkat dibandingkan posisi Februari 2022 senilai USD1.522 per ton. Pada komoditas daging



Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik III.6 Andil Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (yoy)

Tabel III.1 Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Provinsi Banten (yoy)

PENYUMBANG INFLASI			PENYUMBANG DEFLASI		
No	KOMODITAS	ANDIL	No	KOMODITAS	ANDIL
1	MINYAK GORENG	0,36	1	CABAI RAWIT	-0,08
2	MOBIL	0,20	2	CABAI MERAH	-0,06
3	DAGING AYAM RAS	0,18	3	AIR KEMASAN	-0,04
4	SEWA RUMAH	0,18	4	PISANG	-0,03
5	ROKOK KRETEK FILTER	0,12	5	BAJU MUSLIM WANITA	-0,01
6	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0,12	6	MINUMAN RINGAN	-0,01
7	EMAS PERHIASAN	0,11	7	TELEPON SELULER	-0,01
8	TAHU MENTAH	0,10	8	BIAYA ADM TRANSFER UANG	-0,01
9	SABUN DETERGEN BUBUK/CAIR	0,09	9	POPOK BAYI SEKALI PAKAI/ DIAPERS	-0,01
10	TEMPE	0,08	10	UDANG BASAH	-0,01

Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

ayam ras, kenaikan tekanan harga didorong oleh berlanjutnya kebijakan *culling* dan *cutting hatched egg* (HE), kenaikan harga input produksi berupa bibit serta peningkatan permintaan masyarakat seiring pelonggaran pembatasan mobilitas. Sementara itu, kenaikan harga tahu dan tempe didorong oleh berlanjutnya tren kenaikan harga kedelai dunia ditengah terbatasnya pasokan akibat cuaca buruk di negara sentra seperti Argentina dan Amerika Selatan¹.

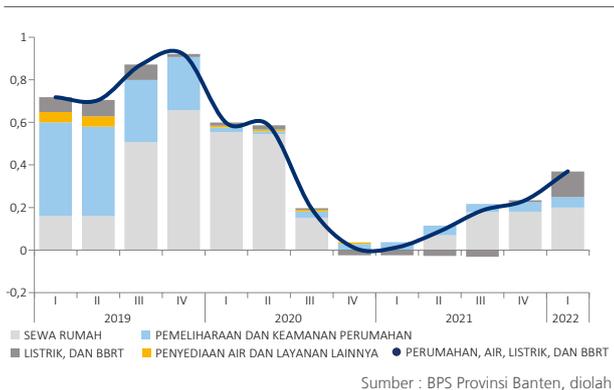
Komoditas rokok kretek filter memberikan andil tertinggi ketiga setelah minyak goreng dan daging ayam ras, yakni sebesar 0,12% (yoy). Hal ini didorong oleh sentimen adanya kenaikan tarif cukai rokok kretek

Tabel III.2 Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (yoy)

PENYUMBANG INFLASI			PENYUMBANG DEFLASI		
No	KOMODITAS	ANDIL	No	KOMODITAS	ANDIL
1	MINYAK GORENG	0,36	1	CABAI RAWIT	-0,08
2	DAGING AYAM RAS	0,18	2	CABAI MERAH	-0,06
3	ROKOK KRETEK FILTER	0,12	3	AIR KEMASAN	-0,04
4	TAHU MENTAH	0,10	4	PISANG	-0,03
5	TEMPE	0,08	5	MINUMAN RINGAN	-0,01
6	ROKOK PUTIH	0,07	6	UDANG BASAH	-0,01
7	PEPAYA	0,07	7	TERONG	-0,005
8	JERUK	0,05	8	IKAN KAKAP MERAH	-0,004
9	BERAS	0,04	9	KEMIRI	-0,003
10	MIE KERING INSTANT	0,04	10	KELAPA	-0,003

Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

1 Informasi *anecdotal* dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220217144025-92-760502/penyebab-harga-kedelai-naik-versi-mendag-suplai-di-dunia-terbatas>



Grafik III.7 Andil Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga (yoy)

filter pada tahun 2022 yang akan terus ditransmisikan secara gradual sepanjang tahun.

Di sisi lain, komoditas yang menahan laju inflasi lebih tinggi antara lain cabai rawit, cabai merah, air kemasan, pisang dan minuman ringan.

Penurunan harga cabai rawit dan cabai merah dipengaruhi oleh pasokan komoditas yang tercatat stabil seiring panen raya di beberapa daerah sentra pulau Jawa.

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Pada triwulan I 2022, kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 1,61% (yoy) dengan andil tahunan sebesar 0,37%. Laju inflasi ini lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2021 sebesar 1,01% (yoy). Hal ini terutama didorong oleh andil subkelompok sewa rumah (andil 0,20%) terutama pada komoditas sewa rumah, kontrak rumah, cat tembok, besi beton dan pipa. Selain itu, berdasarkan data Indonesia Property Market Index Kuartal I/2022 masih melanjutkan tren peningkatan harga properti meskipun cenderung melandai secara nasional. Adapun peningkatan tersebut juga terjadi akibat penyesuaian harga pembangunan akibat kenaikan harga bahan bangunan². Peningkatan harga beli properti tersebut yang diprakirakan mendorong peningkatan harga sewa rumah, seiring dengan peningkatan permintaan tempat tinggal di Provinsi Banten.

² Informasi anecdotal dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220517/47/1533852/harga-bahan-bangunan-naik-ciputra-bakal-naikkan-harga-rumah>

Tabel III.3 Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga (yoy)

PENYUMBANG INFLASI			PENYUMBANG DEFLASI		
No	KOMODITAS	ANDIL	No	KOMODITAS	ANDIL
1	SEWA RUMAH	0,18			
2	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0,12			
3	KONTRAK RUMAH	0,02			
4	CAT TEMBOK	0,02			
5	BESI BETON	0,01			
6	PIPA	0,00			
7	PASIR	0,00			
8	KERAMIK	0,00			
9	KUSEN	0,00			
10	SEMEN	0,00			

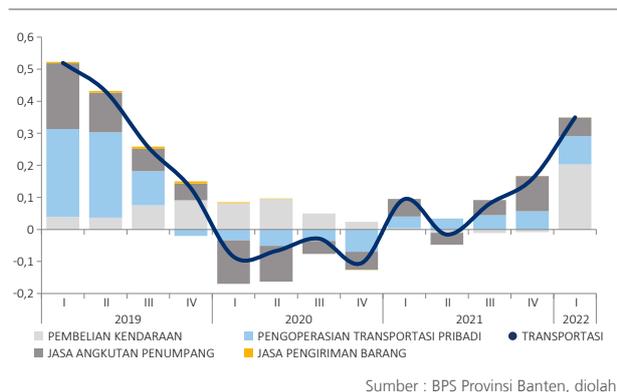
Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Selain itu, subkelompok Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga juga mengalami peningkatan tekanan terutama didorong oleh komoditas bahan bakar rumah tangga (BBRT) serta memberikan andil sebesar 0,12% (yoy). Sejak bulan Februari 2022 lalu, harga produk LPG nonsubsidi kembali meningkat menjadi Rp15.500/kg. Adapun penyesuaian harga ini dilakukan oleh Pertamina seiring perkembangan harga minyak dan gas dunia yang terus meningkat, tercatat harga *Contract Price Aramco* (CPA) mencapai US\$775 per metric ton, atau naik 21% dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021³.

Kelompok Transportasi

Pada triwulan I 2022, kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 3,24% (yoy) dengan andil tahunan sebesar 0,35%. Laju inflasi ini meningkat dibandingkan triwulan IV 2021 yang tercatat inflasi sebesar 1,46% (yoy). Kenaikan andil terutama pada subkelompok Jasa Pembelian Kendaraan sebesar 0,20% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang menyumbang deflasi sebesar -0,01% (yoy). Lebih lanjut, andil inflasi tersebut disumbang oleh komoditas mobil dengan andil sebesar 0,20%. Hal ini sejalan dengan perbedaan skema insentif Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil pada triwulan I 2022 sehingga mendorong tekanan harga pada komoditas mobil.

³ Informasi anecdotal dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220227122318-85-764652/harga-lpg-nonsubsidi-naik-jadi-rp15500-per-kg-mulai-hari-ini>

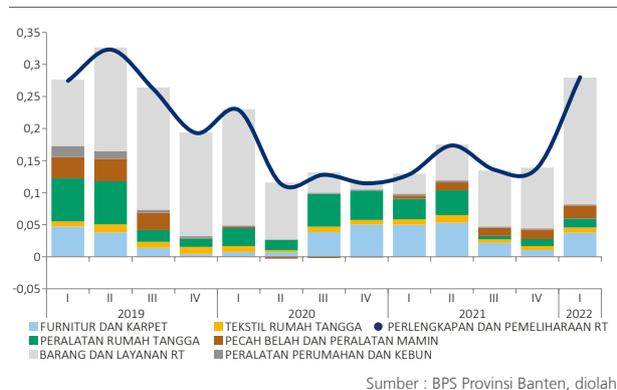


Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah
Grafik III.8 Andil Inflasi Kelompok Transportasi (yoy)

Selain itu, subkelompok Pengoperasian Transportasi Pribadi juga menyumbang kenaikan menjadi sebesar 0,09% dibandingkan triwulan sebelumnya 0,06%. Hal ini terutama didorong oleh komoditas bensin, pelumas/oli mesin, tarif jalan tol, cuci kendaraan dan ban luar motor. Adapun subkelompok Jasa Angkutan Penumpang turut menyumbang inflasi dengan adil sebesar 0,06% dengan komoditas penyumbang utama angkutan udara.

Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Pada triwulan I 2022, kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 4,88% (yoy) dengan andil tahunan sebesar 0,28%. Laju inflasi ini meningkat daripada triwulan IV 2021 sebesar 2,43% (yoy). Inflasi yang terjadi terutama dipengaruhi oleh kenaikan andil subkelompok Barang dan Layanan untuk Pemeliharaan Rumah Tangga Rutin (0,20%) terutama pada komoditas sabun detergen bubuk/cair, upah asisten rumah tangga, sabun cair/cuci piring dan



Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah
Grafik III.9 Andil Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (yoy)

Tabel III.4 Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Kelompok Transportasi (yoy)

PENYUMBANG INFLASI			PENYUMBANG DEFLASI		
No	KOMODITAS	ANDIL	No	KOMODITAS	ANDIL
1	MOBIL	0,20			
2	ANGKUTAN UDARA	0,04			
3	BENSIN	0,02			
4	PELUMAS/OLI MESIN	0,02			
5	TARIF JALAN TOL	0,02			
6	ANGKUTAN ANTAR KOTA	0,01			
7	CUCI KENDARAAN	0,01			
8	HELM	0,004			
9	BAN LUAR MOTOR	0,004			
10	SEPEDA MOTOR	0,004			

Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

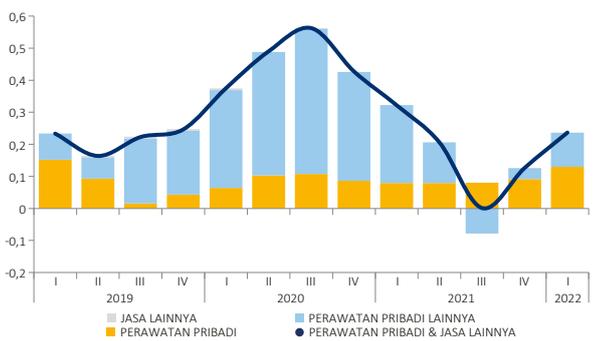
pembersih lantai. Tekanan komoditas sabun detergen bubuk/cair yang merupakan produk turunan dari minyak sawit ini didorong oleh berlakunya *domestic price obligation* (DPO) untuk pasokan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebesar Rp9.300 per kilogram dan Olein sebesar Rp10.300 per liter ke pasar dalam negeri sejak 27 Januari 2022⁴. Adapun upah asisten rumah tangga seiring penyesuaian rata-rata upah, yakni berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Rata-rata Upah Nominal asisten rumah tangga pada triwulan I 2022 tercatat sebesar Rp430.825,- per bulan, naik dibandingkan Rp426.389,- per bulan pada triwulan IV 2021. Selain itu, subkelompok yang menyumbang inflasi yaitu Barang Pecah belah dan Peralatan makan Minum (0,01%) terutama pada

Tabel III.5 Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (yoy)

PENYUMBANG INFLASI			PENYUMBANG DEFLASI		
No	KOMODITAS	ANDIL	No	KOMODITAS	ANDIL
1	SABUN DETERGEN BUBUK/CAIR	0,09	1	PEMBASMI NYAMUK SPRAY	-0,0008
2	UPAH ASISTEN RUMAH TANGGA	0,06	2	PEMBASMI NYAMUK CAIR	-0,0002
3	SABUN CAIR/CUCI PIRING	0,02	3	KAMPER	-0,0001
4	LEMARI PAKAIAN	0,02			
5	PANCI	0,02			
6	PEMBERSIH LANTAI	0,02			
7	KASUR	0,01			
8	PENGHARUM CUCIAN/PELEMBUT	0,01			
9	PELICIN/ PEWANGI PAKAIAN	0,005			
10	TEMPAT TIDUR	0,004			

Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

4 Informasi anecdotal dari <https://market.bisnis.com/read/20220202/94/1495950/terungkap-ini-penyebab-harga-sabun-naik>.



Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik III.10 Andil Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (yoy)

komoditas panci. Di sisi lain, komoditas yang menahan laju inflasi lebih lanjut pada subkelompok ini meliputi pembasmi nyamuk spray, pembasmi nyamuk cair dan kamper.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Pada triwulan I 2021, kelompok ini tercatat mengalami laju inflasi sebesar 4,29% (yoy) dengan andil 0,24%. Laju mengalami peningkatan dibandingkan triwulan IV 2021 yang tercatat sebesar 2,29% (yoy). Dilihat berdasarkan andil subkelompoknya, peningkatan inflasi pada kelompok ini didorong oleh inflasi pada 2 subkelompok. Subkelompok Perawatan Pribadi menjadi yang tertinggi dengan andil 0,13%, diikuti subkelompok Perawatan Pribadi Lainnya dengan andil 0,11%, sementara subkelompok Jasa Lainnya tercatat stabil.

Berdasarkan komoditasnya, andil inflasi terbesar kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya didorong oleh komoditas emas perhiasan. Tingginya andil komoditas emas perhiasan sejalan dengan harga emas



Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik III.11 Andil Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (yoy)

Tabel III.6 Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (yoy)

PENYUMBANG INFLASI			PENYUMBANG DEFLASI		
No	KOMODITAS	ANDIL	No	KOMODITAS	ANDIL
1	EMAS PERHIASAN	0,11	1	POPOK BAYI SEKALI PAKAI/ DIAPERS	-0,006
2	SHAMPO	0,03	2	PEMBALUT WANITA	-0,002
3	SABUN MANDI CAIR	0,02	3	BEDAK BAYI	-0,001
4	SABUN MANDI	0,01			
5	HAND BODY LOTION	0,01			
6	TISSU	0,01			
7	PARFUM	0,01			
8	PASTA GIGI	0,01			
9	LIPSTIK	0,01			
10	DEODORANT	0,01			

Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

dunia yang melanjutkan tren peningkatan, didorong oleh tingginya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah penurunan kasus Covid-19 secara nasional. Pada akhir triwulan I 2022, harga emas global tercatat sebesar USD1.876,13 per *ounce*, meningkat dibandingkan akhir triwulan IV 2021 yang mencapai USD1.713,63 per *ounce*. Adapun komoditas yang menahan inflasi lebih lanjut yakni popok bayi sekali pakai/diapers, pembalut wanita dan bedak bayi.

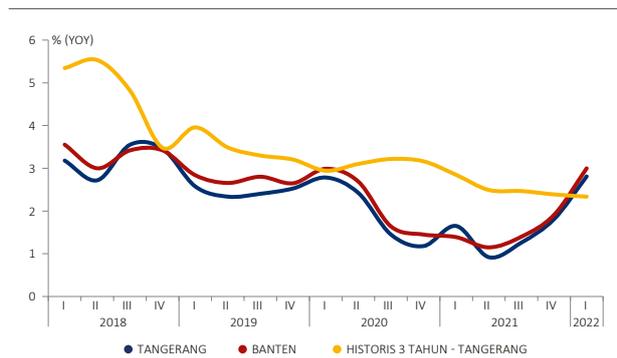
Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Pada triwulan I 2022, kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 1,81% (yoy) dengan andil tahunan sebesar 0,17%. Laju inflasi tersebut meningkat dibandingkan triwulan IV 2021 yakni sebesar 1,57% (yoy). Adapun komoditas yang menyumbang inflasi terutama pada gado-gado, kue kering berminyak, martabak, siomay dan bubur.

Tabel III.7 Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (yoy)

PENYUMBANG INFLASI			PENYUMBANG DEFLASI		
No	KOMODITAS	ANDIL	No	KOMODITAS	ANDIL
1	GADO-GADO	0,04			
2	KUE KERING BERMINYAK	0,01			
3	MARTABAK	0,01			
4	SIOMAY	0,01			
5	BUBUR	0,01			
6	KETUPAT / LONTONG SAYUR	0,01			
7	PIZZA	0,01			
8	NASI DENGAN LAUK	0,01			
9	BAKSO SIAP SANTAP	0,01			
10	SOTO	0,01			

Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah



Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik III.12 Realisasi dan Historis Inflasi Kota Tangerang

3.3 INFLASI SPASIAL

Secara spasial, inflasi Provinsi Banten pada triwulan I 2022 terjadi pada seluruh kota sampel IHK di Provinsi Banten. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Serang sebesar 3,87% (yoy) diikuti oleh Kota Cilegon sebesar 3,13% (yoy) dan Kota Tangerang sebesar 2,81% (yoy). Apabila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan IV 2021, inflasi seluruh kota tercatat mengalami peningkatan. Inflasi Kota Cilegon meningkat dari sebelumnya 2,19% (yoy), Kota Tangerang sebelumnya 1,81% (yoy) dan Kota Serang sebelumnya 2,23% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluaran, terdapat 7 (tujuh) kelompok yang secara bersama-sama mendorong kenaikan di 3 kota sampel IHK yaitu kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, kelompok Perlengkapan; kelompok Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga; kelompok Kesehatan; kelompok Transportasi, kelompok Pendidikan, serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Sementara itu, terdapat kelompok pengeluaran yang menahan tekanan inflasi secara terbatas yaitu Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan serta Kelompok Pakaian dan Alas Kaki.

Kota Tangerang

Pada triwulan I 2022, Inflasi Kota Tangerang meningkat, namun tetap paling rendah di antara 2 kota sampel IHK lainnya. Inflasi Kota Tangerang tercatat sebesar 2,81% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2021 sebesar 1,81% (yoy). Capaian ini berada di atas historis 3 tahun terakhir

Tabel III.8 Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Kelompok Kota Tangerang (yoy)

PENYUMBANG INFLASI			PENYUMBANG DEFLASI		
No	KOMODITAS	ANDIL	No	KOMODITAS	ANDIL
1	MINYAK GORENG	0,40	1	CABAI RAWIT	-0,07
2	DAGING AYAM RAS	0,24	2	CABAI MERAH	-0,07
3	SEWA RUMAH	0,22	3	AIR KEMASAN	-0,04
4	MOBIL	0,21	4	PISANG	-0,04
5	TAHU MENTAH	0,12	5	BAJU MUSLIM WANITA	-0,01
6	EMAS PERHIASAN	0,12	6	POPOK BAYI SEKALI PAKAI/ DIAPERS	-0,01
7	ROKOK KRETEK FILTER	0,10	7	UDANG BASAH	-0,01
8	TEMPE	0,09	8	MINUMAN RINGAN	-0,01
9	SABUN DETERGEN BUBUK/CAIR	0,09	9	PEMBALUT WANITA	-0,01
10	PEPAYA	0,08	10	IKAN KAKAP MERAH	-0,01

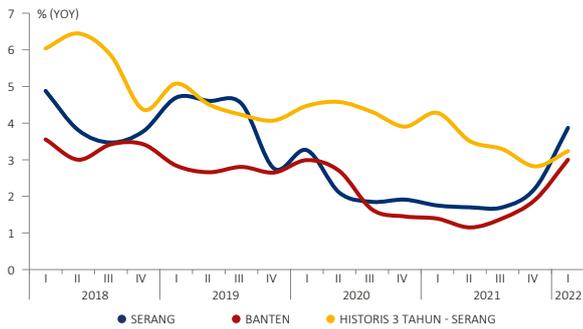
Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

sebesar 2,34% (yoy), namun demikian lebih rendah dibandingkan capaian inflasi Provinsi Banten sebesar 3,00% (yoy).

Kenaikan terutama terjadi pada 7 (tujuh) kelompok pengeluaran. Adapun laju inflasi tertinggi yaitu kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau (andil: 1,49%) sebesar 5,90% (yoy) terutama akibat dorongan minyak goreng, daging ayam ras, tahu mentah, rokok kretek filter, dan tempe. Selanjutnya, diikuti oleh laju inflasi kelompok Transportasi (andil: 0,36%) sebesar 3,33% (yoy) terutama didorong oleh komoditas mobil. Hal ini sejalan dengan perbedaan skema insentif Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil pada triwulan I 2022⁵. Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga (andil: 0,31%) juga mendorong peningkatan inflasi di Kota Tangerang terutama pada komoditas sewa rumah.

Di sisi lain, tekanan pada 3 (tiga) kelompok lainnya cenderung tidak setinggi sebelumnya. Pada kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan (andil: -0,01%) tercatat mengalami deflasi sebesar -0,20 (yoy) atau lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun secara lebih lanjut, penurunan pada periode laporan juga disumbang oleh cabai rawit, cabai merah, air kemasan, pisang dan baju muslim wanita.

5 Informasi *anecdotal* dari <https://otomotif.bisnis.com/read/20220119/46/1490905/ini-perbedaan-skema-insentif-ppnbm-kendaraan-2021-dan-2022>



Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik III.13 Realisasi dan Historis Inflasi Kota Serang

Kota Serang

Pada triwulan I 2022, Inflasi Kota Serang menjadi yang tertinggi dibandingkan 2 kota lainnya. Inflasi Kota Serang tercatat sebesar 3,87% (yoy), atau meningkat dibandingkan triwulan IV 2021 sebesar 2,23% (yoy). Capaian ini lebih tinggi dibandingkan historis 3 tahun terakhir yang sebesar 3,24% (yoy) serta inflasi Provinsi Banten yang tercatat sebesar 3,00% (yoy).

Menurut kelompok pengeluaran, hal ini dipengaruhi oleh kenaikan pada 10 (sepuluh) kelompok, terutama didorong andil kelompok Makanan, minuman dan tembakau yakni dengan andil sebesar 0,79%. Laju inflasi pada kelompok ini pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 4,19% (yoy), atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,19% (yoy).

Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini yaitu beras, rokok kretek filter, minyak goreng, rokok putih, dan jeruk. Adapun tekanan lebih lanjut tertahan oleh sumbangan penurunan tekanan harga pada cabai rawit, cabai merah, bayam, kulit melinjo, kangkung, telur ayam ras, daging ayam ras dan ketimun. Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga menjadi penyumbang inflasi tertinggi kedua (0,79%) dengan laju inflasi sebesar 5,01% (yoy) dari triwulan IV 2021 sebesar 1,45% (yoy) didorong komoditas bahan bakar rumah tangga sejalan dengan penyesuaian harga LPG nonsubsidi oleh Pertamina akibat peningkatan harga minyak dunia yang terus berlanjut.

Tabel III.9 Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Kota Serang (yoy)

PENYUMBANG INFLASI			PENYUMBANG DEFLASI		
No	KOMODITAS	ANDIL	No	KOMODITAS	ANDIL
1	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0,50	1	CABAI RAWIT	-0,10
2	BERAS	0,23	2	CABAI MERAH	-0,04
3	ROKOK KRETEK FILTER	0,19	3	BAYAM	-0,02
4	MOBIL	0,17	4	KULIT MELINJO	-0,02
5	MINYAK GORENG	0,15	5	KANGKUNG	-0,02
6	ROKOK PUTIH	0,13	6	TELUR AYAM RAS	-0,02
7	JERUK	0,12	7	AIR KEMASAN	-0,01
8	EMAS PERHIASAN	0,11	8	SEPATU ANAK	-0,01
9	SABUN DETERGEN BUBUK/CAIR	0,09	9	DAGING AYAM RAS	-0,01
10	CUCI KENDARAAN	0,08	10	KETIMUN	-0,01

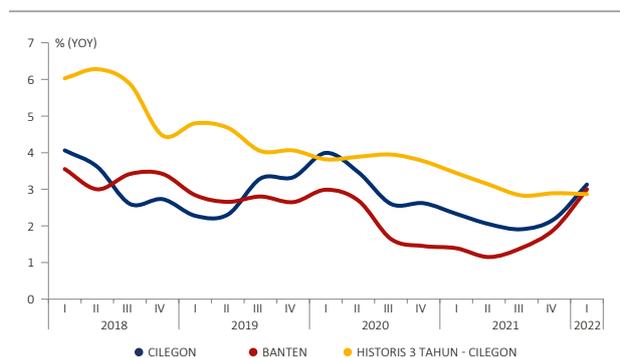
Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami penurunan tekanan tercermin pada andil kelompok dimaksud yang turun paling dalam. Andil kelompok ini turun -0,012% atau dari 0,04% menjadi 0,03%. Sementara itu, laju inflasi kelompok ini tercatat sebesar 0,66% (yoy), lebih rendah dari triwulan IV 2021 yang tercatat sebesar 0,90% (yoy). Selanjutnya, inflasi lebih lanjut juga tertahan oleh komoditas air kemasan dan sepatu anak.

Kota Cilegon

Inflasi Kota Cilegon pada periode triwulan I 2022 tercatat sebesar 3,13% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan IV 2021 sebesar 2,19% (yoy). Laju inflasi tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan historis 3 tahun terakhir yakni sebesar 2,87% (yoy) serta di atas inflasi Provinsi Banten 3,00% (yoy).

Serupa dengan 2 kota sampel IHK lainnya, inflasi yang terjadi terutama pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 1,30%. Inflasi kelompok ini tercatat sebesar 4,22% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 3,72% (yoy). Hal ini terutama didorong komoditas minyak goreng, rokok kretek filter serta rokok putih. Sementara itu, komoditas yang menahan laju yaitu cabai rawit, cabai merah, bawang merah, ikan mas, serta ikan mujair. Kelompok yang menyumbang inflasi terbesar kedua yaitu Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (andil: 0,53%) terutama pada komoditas kue kering



Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik III.14 Realisasi dan Historis Inflasi Kota Cilegon

bermilyak. Adapun laju inflasi kelompok ini tercatat meningkat dari 2,56% (yoy) menjadi sebesar 4,76% (yoy) pada triwulan I 2022.

Pada triwulan IV 2021, terdapat 2 (dua) kelompok yang mencatatkan deflasi bagi Kota Cilegon yakni Kelompok Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan serta Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya. Kelompok ini masing-masing tercatat deflasi sebesar -1,38% (yoy) dan -0,48% (yoy), dengan andil komoditas terutama pada biaya administrasi transfer uang serta bioskop. Penurunan biaya administrasi transfer uang didorong oleh implementasi BI-Fast sejak awal bulan Desember 2021, sehingga biaya transfer antar bank turun menjadi Rp2.500 bagi bank peserta.

3.4 PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI TRIWULAN I 2022

Pada triwulan I 2022, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten telah melakukan beberapa program koordinasi dalam rangka menjaga kestabilan inflasi. Secara umum, pengendalian inflasi tetap mengacu pada prinsip 4K yakni: (1) Ketersediaan Pasokan, (2) Kelancaran Distribusi, (3) Keterjangkauan Harga dan (4) Komunikasi Efektif. Secara khusus, beberapa strategi yang telah dilaksanakan oleh TPID Provinsi Banten sebagai berikut:

Keterjangkauan Harga

- Mengintensifkan pemantauan pergerakan harga kebutuhan bahan pangan strategis secara harian. Data pergerakan harga menjadi dasar bagi

Tabel III.10 Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Kota Cilegon (yoy)

PENYUMBANG INFLASI			PENYUMBANG DEFLASI		
No	KOMODITAS	ANDIL	No	KOMODITAS	ANDIL
1	MINYAK GORENG	0,33	1	CABAI RAWIT	-0,12
2	ROKOK PUTIH	0,21	2	CABAI MERAH	-0,08
3	ROKOK KRETEK FILTER	0,20	3	TELEPON SELULER	-0,07
4	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0,14	4	BAWANG MERAH	-0,03
5	MOBIL	0,13	5	BIOSKOP	-0,01
6	KUE KERING BERMINYAK	0,12	6	POPOK BAYI SEKALI PAKAI/ DIAPERS	-0,01
7	BIMBINGAN BELAJAR	0,12	7	BIAYA ADMINISTRASI TRANSFER UANG	-0,01
8	PANCI	0,11	8	KEMEJA PANJANG KATUN PRIA	-0,01
9	SABUN DETERGEN BUBUK/CAIR	0,10	9	IKAN MAS	-0,01
10	EMAS PERHIASAN	0,08	10	IKAN MUJAIR	-0,01

Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

TPID Provinsi serta Kabupaten dan Kota untuk menindaklanjuti ke dalam bentuk kebijakan.

- Pemanfaatan *platform digital* untuk menjual produk pertanian, termasuk dengan digitalisasi Toko Tani Indonesia Center di Legok, Tangerang.
- Operasi pasar yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah, bekerja sama dengan Bulog maupun *stakeholder* lainnya guna memastikan keterjangkauan harga bahan pokok, khususnya komoditas yang langka di pasaran yakni sebagai contoh operasi pasar minyak goreng.

Ketersediaan Pasokan

- Peningkatan produktivitas pertanian melalui implementasi pengaturan pola tanam sehingga dapat mengoptimalkan lahan pertanian serta mendorong implementasi program terobosan seperti Tani Millenials di wilayah potensial pertanian Banten.
- Membangun koordinasi dengan *stakeholder* terkait baik pemerintah maupun swasta guna menjaga keamanan bahan pangan yang ada di pasar
- Rencana pembangunan *rice milling unit* sebagai pusat tempat penggilingan padi termasuk tempat pengeringan, usaha pemotongan ayam, dan sebagainya.
- Pembinaan kluster-kluster ketahanan pangan komoditas beras, cabai dan bawang merah, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga pelatihan terkait.

Kelancaran Distribusi

- Rencana pembangunan Pusat Distribusi Provinsi Banten Mandiri dan Pusat Distribusi Provinsi Banten guna mempendek rantai distribusi komoditas strategis.
- Kerjasama Program Toko Tani dengan angkutan *online* roda dua guna memberikan layanan antar pesanan secara gratis dengan maksimal jarak tertentu yang telah disepakati.
- Koordinasi dengan anggota TPID Provinsi, Kabupaten dan Kota, khususnya dengan Dinas Perhubungan dan Polda Banten guna memastikan kelancaran distribusi bahan pangan strategis serta pembangunan jalan usaha tani.
- Penjajakan kerjasama baik intra maupun antardaerah, guna memenuhi memastikan kelancaran distribusi bahan pokok.

Komunikasi Efektif

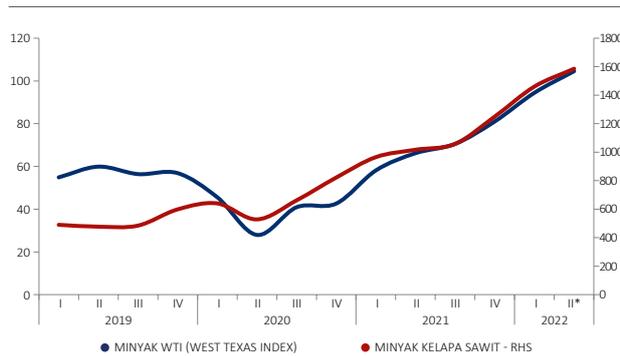
- High Level Meeting* maupun Rapat Koordinasi TPID di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota guna menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang pokok dan penting, termasuk persiapan memasuki bulan puasa.
- Pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data statistik sektoral bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam rangka kegiatan pengendalian inflasi. Hal ini dilakukan untuk monitoring dan integrasi data sektoral dalam rangka mendukung pengendalian inflasi daerah, termasuk melalui sinergi digitalisasi pasar bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
- Melakukan *moral suasion* dalam rangka membentuk ekspektasi masyarakat atas harga bahan pangan strategis, khususnya persiapan jelang bulan puasa melalui himbuan kepada masyarakat baik melalui media atau tokoh agama untuk melakukan konsumsi secara wajar serta bijak berbelanja.

3.5 INFLASI TRIWULAN BERJALAN

Tekanan inflasi Provinsi Banten pada triwulan II 2022 diperkirakan meningkat secara tahunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan momen Hari Besar Keagamaan Nasional dan telah diizinkan mudik pada momen Idul Fitri. Lebih lanjut peningkatan mobilitas masyarakat seiring implementasi vaksin hingga dosis 3 yang semakin meluas di Provinsi Banten. Hingga 28 Maret 2022, vaksinasi dosis 1 di Provinsi Banten tercatat sebanyak 8.528.179 dosis atau cakupan 92,4%; sementara vaksinasi dosis 2 sebanyak 6.621.958 dosis atau cakupan 71,7%; serta vaksinasi dosis 3 sebanyak 1.025.473 dosis atau cakupan 11,1%.

Adapun hingga bulan April 2022, inflasi Provinsi Banten tercatat sebesar 3,82% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2022. Peningkatan tekanan tersebut terutama didorong oleh andil Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau (1,63%) dengan laju inflasi sebesar 6,07% (yoy). Secara tahunan, komoditas yang mendorong inflasi yakni minyak goreng, mobil, bensin, daging ayam ras, serta bahan bakar rumah tangga. Peningkatan rerata harga minyak goreng pada bulan April 2022 didorong oleh implementasi pencabutan HET pada minyak goreng kemasan dan mengikuti harga keekonomian serta berlanjutnya tren peningkatan harga internasional CPO. Selanjutnya, inflasi komoditas daging ayam ras didorong oleh peningkatan harga input produksi terutama biaya pakan ditengah kenaikan permintaan masyarakat jelang HBKN, sedangkan komoditas mobil dan bensin meningkat seiring implementasi kebijakan pelonggaran mobilitas. Di sisi lain, komoditas yang menahan laju inflasi lebih lanjut antara lain cabai rawit, pisang, cabai merah, baju muslim wanita, baju muslim pria dan apel. Di tengah permintaan yang tinggi, pasokan komoditas aneka cabai tercatat stabil seiring panen raya sehingga pasokan terjaga dan harga terpantau stabil.

Tekanan harga pada triwulan II 2022 diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa kebijakan yang mulai diberlakukan pada triwulan ini. Pengaruh penetapan cukai hasil tembakau pada tahun 2022



Sumber : Bloomberg

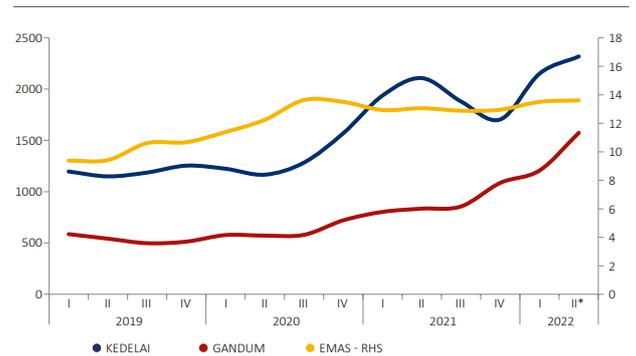
Grafik III.15 Harga Minyak Bumi (USD/Barrel) dan Harga minyak kelapa sawit (USD/MT)

yang rata-rata meningkat hingga 12% masih terus berlanjut, sedangkan peningkatan tekanan harga juga terjadi pada LPG Non Subsidi sekitar 7,5% sejak awal tahun 2022. Berdasarkan data Pertamina, per 1 April 2022 untuk wilayah Banten harga BBM jenis pertalite tetap sama dari bulan lalu dan pertamax naik sebesar Rp 3.000, dari angka Rp 9.000 menjadi Rp 12.500 per liter⁶. Selain itu, Implementasi PPN 11% pada awal triwulan II 2022 diperkirakan mendorong tekanan inflasi inti, termasuk dampak dampak *second round* PPN 11% pada harga pulsa, makanan jadi, dan lain-lain⁷.

Dinamika harga komoditas internasional, antara lain CPO, minyak mentah dunia, kedelai, gandum serta emas global juga terus melanjutkan peningkatan dan diperkirakan kembali mendorong tekanan harga domestik.

Menurut data GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), harga CPO (CIF Rotterdam) pada Maret 2022 mencapai USD1.813 per ton, meningkat dibandingkan posisi Februari 2022 senilai USD1.522 per ton. Sementara menurut pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga minyak goreng hingga Minggu III Mei 2022 di pasar tradisional Provinsi Banten secara rata-rata mencapai harga Rp22.150 per liter. Di sisi lain, berbagai upaya pemerintah untuk menstabilkan harga komoditas minyak goreng dapat menahan tekanan lebih lanjut; yakni implementasi larangan ekspor CPO dan minyak goreng pada 28 April 2022 lalu guna mengatasi

6 Informasi anecdotal dari <https://www.pertamina.com/id/newsroom/announcement/daftar-harga-bbk-tmt-01-april-2022-Zona-3>
7 Informasi anecdotal dari <https://money.kompas.com/read/2022/03/03/211700926/ppn-bakal-naik-jadi-11-persen-bagaimana-dampaknya-ke-perekonomian?page=all>



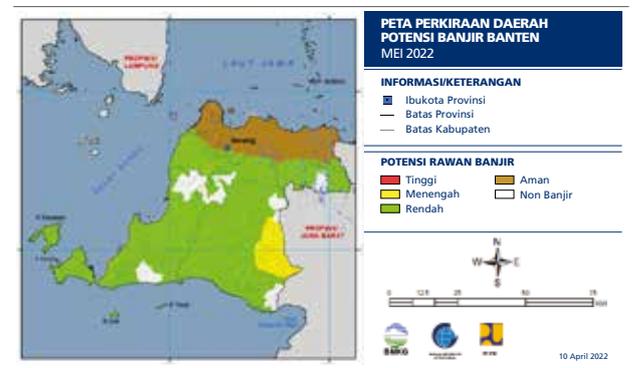
Sumber : Bloomberg

Grafik III.16 Harga Kedelai dan Gandum Global (USD/bushel), Harga Emas Global (\$/OZ)

lonjakan harga dan kelangkaan komoditas minyak goreng. Namun demikian, larangan ekspor tersebut telah dicabut pada 23 Mei 2022 seiring pasokan minyak goreng nasional yang telah bertambah diikuti penurunan harga minyak goreng curah.⁸ Adapun komoditas global lain yang terpantau meningkat harganya hingga triwulan berjalan yakni kedelai dan gandum, diperkirakan akan mendorong harga produk turunan olahan kedelai dan gandum secara gradual.

Di sisi lain, kondisi cuaca yang mulai kondusif pada akhir triwulan II 2022 diperkirakan dapat mendukung komoditas hortikultura.

Adapun siklus panen pada sejumlah daerah sentra tanaman pangan beras pada akhir triwulan II 2022 akan mendorong jumlah pasokan beras di pasaran. Sama halnya dengan komoditas beras, kondisi cuaca yang kondusif akan mendorong peningkatan produksi seiring panen di 33 kabupaten sentra di Pulau Jawa⁹.



Sumber : BMKG

Grafik III.17 Peta Prakiraan Daerah Potensi Banjir Provinsi Banten Mei 2022

8 Informasi anecdotal dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220523101713-92-799940/jokowi-cabut-larangan-ekspor-cpo-dan-minyak-goreng-hari-ini>
9 Informasi anecdotal dari <https://money.kompas.com/read/2022/04/05/150428226/kementan-meski-ada-gejolak-harga-kami-berupaya-menjaga-stok-cabai-cukup?page=all>



BAB IV

Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan Dan UMKM



Intermediasi perbankan dan stabilitas keuangan yang terjaga di Provinsi Banten menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi. Penyaluran kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Penyaluran kredit yang lebih tinggi ditopang kredit konsumsi yang meningkat seiring bertambahnya keyakinan masyarakat akan perbaikan perekonomian dan kebijakan pelonggaran mobilitas.

Dari sisi rumah tangga, optimisme masyarakat yang semakin tinggi dalam berkonsumsi didukung dengan kebijakan insentif fiskal dan moneter menjaga berlanjutnya permintaan kredit kendaraan dan kredit kepemilikan rumah. Tingkat penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja berdasarkan hasil Survei Konsumen KPw BI Provinsi Banten mengalami kenaikan sehingga mendukung konsumsi yang lebih tinggi.

Dari sisi korporasi, kinerja kredit terpantau mengalami peningkatan terutama dari sisi kredit investasi pada korporasi sektor industri dan perikanan. Peningkatan penyaluran kredit korporasi didukung oleh kredit modal kerja pada korporasi sektor industri pengolahan, perikanan, dan *real estate* yang meningkat.

Di sisi risiko kredit/pembiayaan, tingkat risiko kredit yang ditunjukkan oleh tingkat *Non Performing Loan* (NPL) mengalami penurunan dan berada di bawah threshold yang ditetapkan yaitu sebesar 5,0%.



PERTUMBUHAN KREDIT

12,43%

Triwulan I 2022

9,18%

Tw IV 2021



PERTUMBUHAN DANA
PIHAK KETIGA

10,51%

Triwulan I 2022

9,33%

Tw IV 2021



PERTUMBUHAN KREDIT UMKM

12,58%

Triwulan I 2022

9,98%

Tw IV 2021



LOAN-TO-DEPOSIT RATIO

156,62%

Triwulan I 2022

156,62%

Tw IV 2021



NON-PERFORMING LOAN

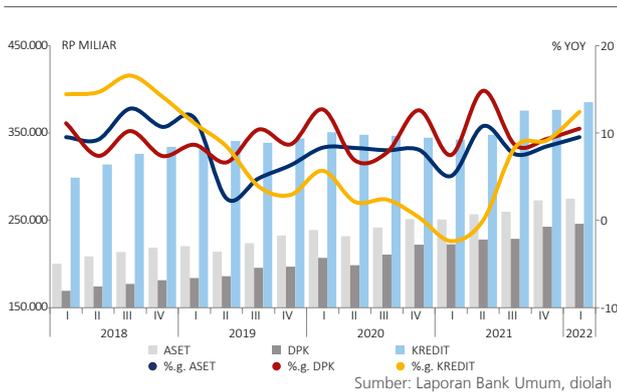
4,02%

Triwulan I 2022

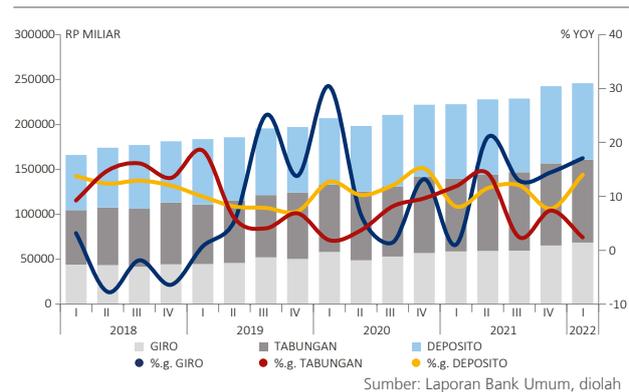
3,94%

Tw IV 2021





Grafik IV.1 Perkembangan Aset, DPK, dan Kredit Perbankan



Grafik IV.2 Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Jenis Simpanan

4.1 PERKEMBANGAN KINERJA PERBANKAN

4.1.1 Kondisi Umum

Pembiayaan yang berasal dari perbankan di Provinsi Banten pada triwulan I 2022 meningkat sehingga menjaga kondisi stabilitas keuangan dan ketahanan perbankan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang melanjutkan tren perbaikan.

Kinerja penyaluran kredit tercatat meningkat, diiringi dengan kinerja DPK yang juga lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Kinerja PDRB sisi konsumsi rumah tangga yang terjaga pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru¹ didukung permintaan kredit yang meningkat terutama kredit konsumsi. Aset perbankan di Provinsi Banten pada triwulan I 2022 tercatat sebesar Rp 274,82 triliun atau tumbuh sebesar 9,53% (yoy). Capaian ini meningkat dibandingkan triwulan IV 2021 yang tumbuh sebesar 8,5% (yoy).

4.1.2 Perkembangan Dana Pihak ketiga (DPK)

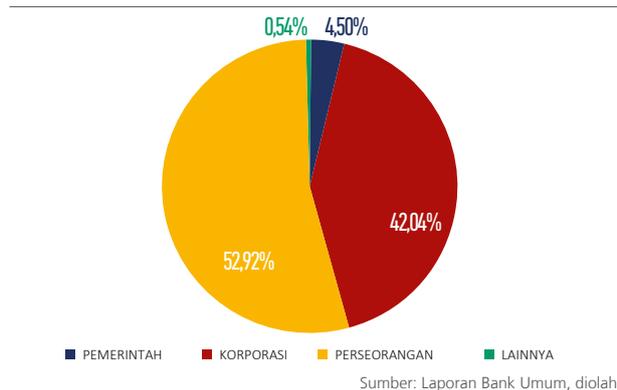
Secara nominal, DPK yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Banten sampai dengan triwulan I 2022 sebesar Rp245,93 triliun atau tumbuh sebesar 10,51% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,33% (yoy) atau sebesar Rp242,60 triliun. Peningkatan DPK di dorong oleh terkendalinya COVID-19 sejalan dengan peningkatan tingkat vaksinasi yang mendorong melandainya kasus COVID-19. Menurut jenis simpanannya, hal ini

didorong oleh akselerasi simpanan berupa giro dan deposito. Di sisi lain, simpanan berupa tabungan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Simpanan masyarakat pada perbankan di Provinsi Banten didominasi oleh tabungan dengan pangsa sebesar 37,57%, diikuti oleh deposito sebesar 34,49% dan giro sebesar 27,94%. Pada triwulan I 2022, simpanan deposito mengalami pertumbuhan sebesar 2,41% (yoy) menjadi Rp84,8 triliun, melambat dibandingkan triwulan IV 2021 sebesar 7,38% (yoy). Pertumbuhan tersebut juga lebih rendah dibandingkan historis tiga tahun terakhir yang tercatat sebesar 10,76% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan simpanan giro tercatat meningkat menjadi sebesar 17,10% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 14,49% (yoy) menjadi Rp68,7 triliun dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan selama tiga tahun terakhir sebesar 10,73% (yoy). Sejalan dengan pertumbuhan giro, simpanan tabungan tumbuh sebesar 14,01% (yoy), meningkat dari triwulan IV 2021 sebesar 7,71% (yoy) menjadi dan lebih tinggi dibandingkan historis tiga tahun terakhir sebesar 10,24% (yoy). Pertumbuhan tabungan turut di dorong normalisasi pengeluaran pasca HBKN Natal dan Tahun Baru.

Berdasarkan golongan nasabah, proporsi terbesar DPK perbankan di Provinsi Banten masih didominasi oleh nasabah perseorangan dengan pangsa mencapai 52,92%, diikuti oleh nasabah korporasi (perusahaan) dengan pangsa 42,04%, dan pemerintah sebanyak

¹ Komponen PDRB Konsumsi Rumah Tangga Banten tumbuh positif 2,92% (yoy).

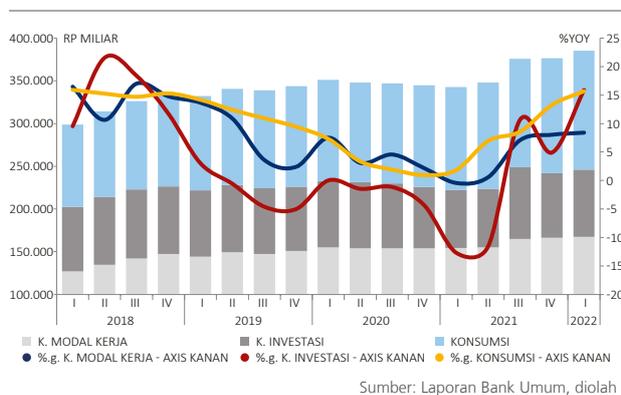


Grafik IV.3 Struktur Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Golongan Nasabah

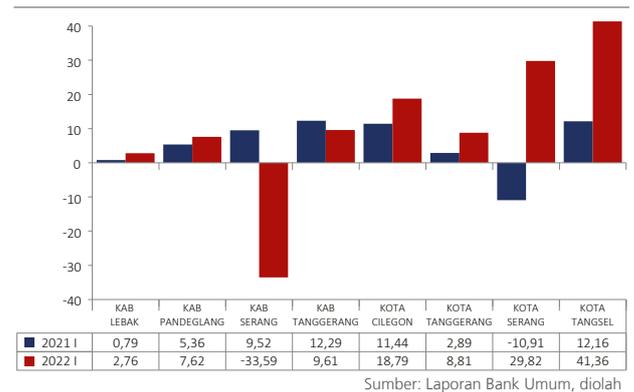
4,50%. Secara spasial, penghimpunan DPK Provinsi Banten didominasi oleh Kabupaten Tangerang (pangsa: 47,01%), Kota Tangerang (34,31%), dan Kota Cilegon (7,63%). Sementara akumulasi lima daerah lainnya hanya sebesar 11,04%. Pada triwulan I 2022, DPK Kota Tangerang Selatan tumbuh paling tinggi sebesar 41,36% (yoy) diikuti oleh DPK Kota Serang sebesar 29,82% (yoy). Di sisi lain, DPK Kab. Serang tercatat masih kontraksi sebesar -33,59% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2021.

4.1.3 Perkembangan Kredit/ Pembiayaan

Berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Banten, jumlah Penyaluran Kredit/pembiayaan pada triwulan I 2022 tercatat sebesar Rp385,18 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 12,43% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,18% (yoy). Pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan tiga tahun terakhir sebesar 5,80% (yoy). Perbaikan terutama didorong oleh akselerasi kinerja kredit



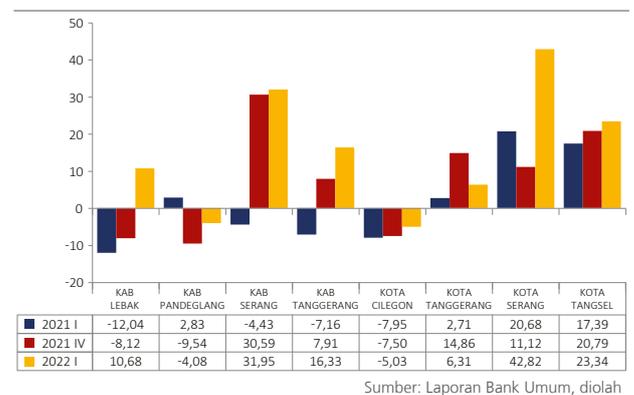
Grafik IV.5 Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan



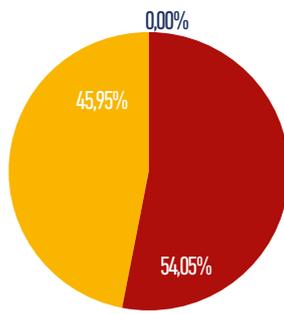
Grafik IV.4 Pertumbuhan DPK Berdasarkan Lokasi Penghimpunan

konsumsi (pangsa: 36,1%) dan kredit modal kerja (43,4%). Kredit konsumsi mengalami peningkatan sebesar 15,67% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 13,27% (yoy). Sementara itu, kredit modal kerja tercatat tumbuh sebesar 8,38% (yoy) pada triwulan I 2022 dibandingkan 8,02% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sejalan dengan pertumbuhan kredit konsumsi dan kredit modal kerja, kredit investasi juga turut mengalami pertumbuhan sebesar 15,89% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,93% (yoy). Dari sisi lokasi bank pelapor, penyaluran kredit/pembiayaan oleh bank yang berlokasi di Provinsi Banten mampu tumbuh sebesar 14,50% (yoy) atau sebesar Rp178,5 triliun, meningkat dibandingkan triwulan IV 2021 sebesar 13,50% (yoy) atau sebesar Rp172,78 triliun.

Sejalan dengan kontribusi daerah pada PDRB Provinsi Banten, mayoritas penyaluran kredit/pembiayaan pada lokasi proyek yang berada di Provinsi Banten juga ditujukan ke wilayah



Grafik IV.6 Pertumbuhan Kredit Spasial Berdasarkan Lokasi Proyek



■ PEMERINTAH ■ KORPORASI ■ PERSEORANGAN

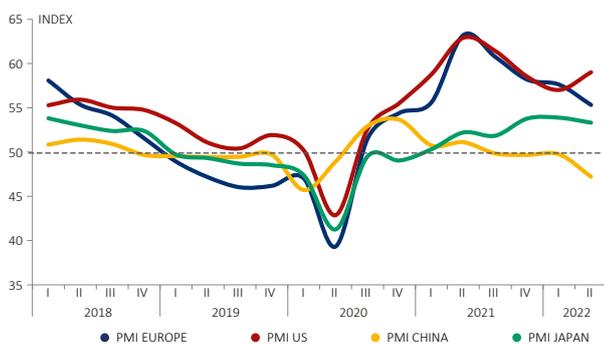
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik IV.7 Struktur Kredit Lokasi Proyek Berdasarkan Golongan Debitur

yang memiliki ukuran ekonomi yang besar yaitu Kabupaten Tangerang (pangsa: 37,12%), Kota Tangerang (25,69%), dan Kota Cilegon (14,93%). Kredit/pembiayaan di Kota Tangerang tumbuh positif 6,31% (yoy), melambat dibandingkan 14,86% (yoy) pada triwulan IV 2021. Adapun pertumbuhan tertinggi pada triwulan I 2022 terjadi pada kredit/pembiayaan di Kota Serang sebesar 42,39% (yoy), disusul Kabupaten Serang yang tumbuh sebesar 31,95% (yoy). Sejalan dengan pertumbuhan kredit di Kota Serang dan Kabupaten Serang, Kab. Tangerang tercatat tumbuh sebesar 16,33% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 7,91% (yoy) pada triwulan IV 2021. Disisi lain Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang tercatat kontraksi masing-masing sebesar -5,03% (yoy) dan -4,08% (yoy), namun membaik dari triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar -7,5% (yoy) dan -9,54% (yoy).

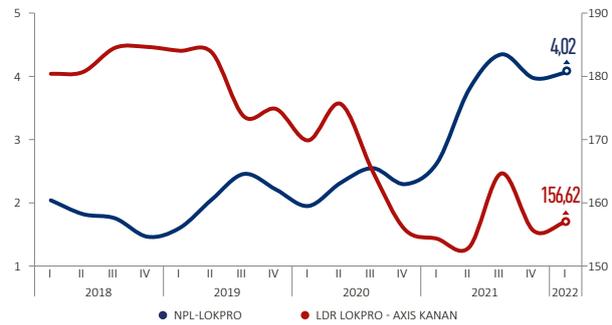
4.1.4 Tingkat Intermediasi dan Risiko Perbankan Umum

Dari sisi intermediasi perbankan di Provinsi Banten pada triwulan I 2022 tercatat mengalami



Sumber: investing.com (diolah)

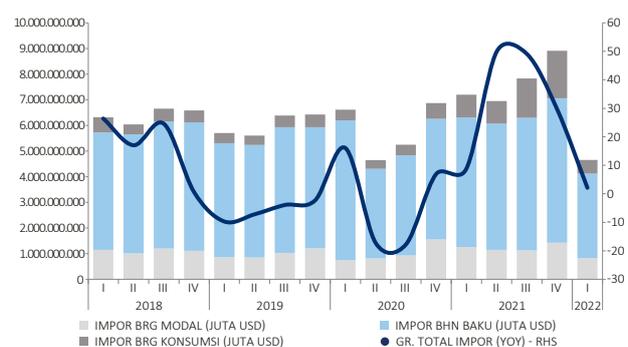
Grafik IV.9 PMI Manufaktur Negara Mitra Dagang Utama Banten



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik IV.8 Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Non Performing Loan (NPL)

pertumbuhan yang dicerminkan oleh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 156,62%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 155,19%. Pertumbuhan LDR yang terjadi terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit/pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK. Sejalan dengan pertumbuhan LDR, tingkat LDR masih di atas 100% yang menunjukkan besarnya peran pendanaan dari kantor bank di luar Provinsi Banten untuk membiayai proyek yang berlokasi di Banten. Hal ini tidak terlepas dari kewenangan plafon pemberian kredit korporasi besar yang mayoritas merupakan kewenangan langsung dari kantor pusat bank yang berkantor di Jakarta. Dari sisi risiko, rasio *Non Performing Loan* (NPL) meningkat dari 3,94% pada triwulan IV 2021 menjadi 4,02% pada triwulan I 2022. **Ditengah peningkatan NPL pada** triwulan I 2022, rasio NPL tersebut masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5,00%.



Sumber: Dirjen Bea Cukai (diolah)

Grafik IV.10 Perkembangan Impor Provinsi Banten

4.2 KINERJA KEUANGAN SEKTOR KORPORASI DAN RUMAH TANGGA

4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi

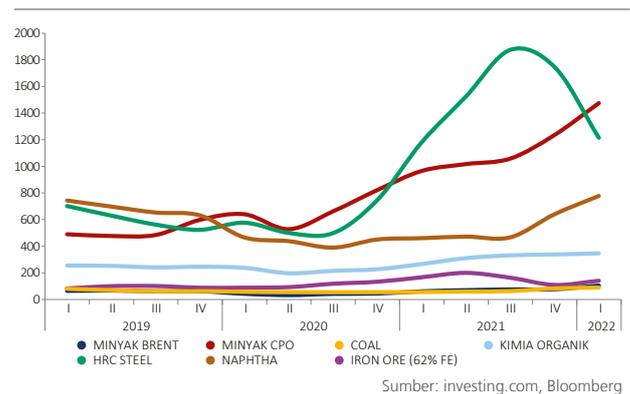
4.2.1.1 Sumber Kerentanan Sektor Korporasi

Penanganan Pandemi Covid-19 yang semakin baik didukung vaksinasi termasuk program *booster* yang meluas mendukung tren pemulihan ekonomi Banten namun belum kembali seperti *pre pandemi*. Pada triwulan I 2022, ekonomi Provinsi Banten tumbuh 4,97% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2021 yang tumbuh sebesar 5,19% (yoy). Namun demikian, capaian tersebut masih lebih baik dibandingkan triwulan I 2021 yang terkontraksi sebesar -0,39% (yoy).

Sektor industri dinilai masih kuat untuk menjadi salah satu kunci yang mendorong pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022, meskipun Covid-19 masih merebak seperti Omicron. Hal itu lantaran sektor industri yang diizinkan untuk terus beroperasi, sepanjang memperketat protokol kesehatan, dapat turut memutar roda perekonomian, baik di pusat dan daerah namun masih tertahan oleh dampak geopolitik Ukraina-Rusia

Sementara itu, kinerja industri pengolahan tercatat melambat pada triwulan I 2022 sebesar 4,58% (yoy) dibandingkan 4,85% (yoy) pada triwulan IV 2021. Penurunan ini sejalan dengan *Purchasing Manager's Index* (PMI) Manufaktur negara mitra dagang utama Banten juga menurun meskipun masih di atas batas optimis (≥ 50). PMI Manufaktur Eropa, Amerika Serikat, China dan Jepang tercatat masing-masing sebesar 55,50; 59,2; 49,93,54,07.

Sumber kerentanan juga berasal dari karakteristik impor Provinsi Banten didominasi oleh bahan baku serta barang modal untuk sektor Industri Pengolahan. Secara umum, impor bahan baku tersebut digunakan untuk produksi subsektor industri unggulan. Sementara impor barang modal umumnya berupa mesin produksi dan peralatan sejalan dengan masih berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur dan



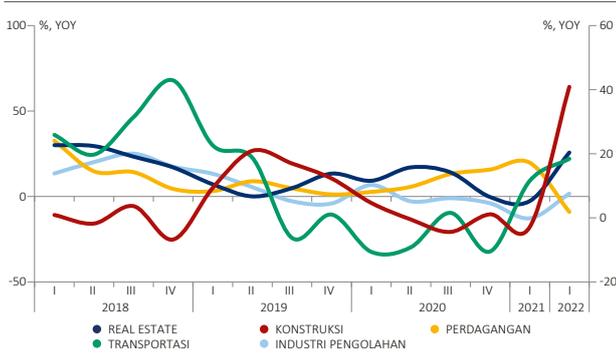
Grafik IV.11 Perkembangan Harga Komoditas

pembangunan investasi petrokimia. Pengawasan atas kelancaran lalu lintas logistik impor, kondisi negara asal dan alternatif sumber bahan baku perlu terus dijaga untuk mendukung kinerja korporasi secara berkelanjutan.

Dominasi bahan baku impor juga membuat sektor industri akan rentan terhadap pergerakan harga secara global. Selain itu, kondisi geopolitik di negara kawasan konsumen dan produsen juga dapat mempengaruhi fluktuasi harga. Harga Naphtha sebagai bahan baku utama industri petrokimia tercatat mengalami tren meningkat dimana pada triwulan I 2022 tercatat sebesar USD777/MT, meningkat 68,5% (yoy) dibandingkan triwulan I 2021. Hal ini didorong oleh harga minyak mentah Brent yang tetap tinggi. secara tahunan harga minyak mentah Brent tercatat USD104,4/MT, meningkat 68,8% (yoy) dibandingkan USD61,9/MT pada triwulan I 2021.

4.2.1.2 Eksposur Perbankan dalam Sektor Korporasi

DPK korporasi pada perbankan di Provinsi Banten memiliki pangsa 41,8% terhadap total DP Provinsi Banten. Kinerja pada triwulan I 2022 tumbuh sebesar 20,63% (yoy), meningkat dibandingkan 14,40% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan terutama dipengaruhi peningkatan kinerja Giro Korporasi dengan pangsa 56,30% terhadap seluruh DPK korporasi. Pada triwulan I 2022, Giro korporasi tercatat meningkat menjadi 22,00% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 18,04% (yoy). Sejalan



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik IV.12 Perkembangan Kredit Korporasi Sektoral

dengan kenaikan giro, tabungan korporasi dengan pangsa 7,05%, mengalami kenaikan menjadi sebesar 24,43% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar -24,53% (yoy). Sementara itu, deposito korporasi tercatat mengalami perlambatan 17,87% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 21,12% (yoy).

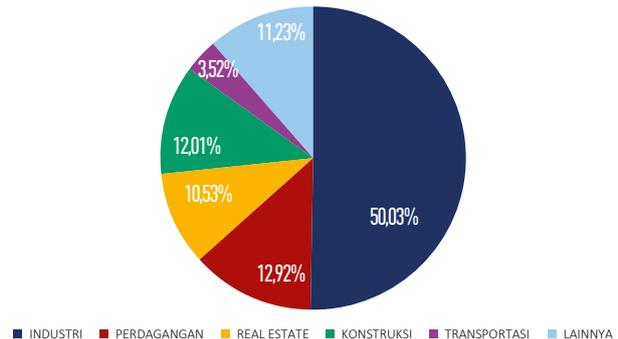
Dari sisi kredit, kinerja penyaluran kredit perbankan triwulan I 2022 kepada sektor korporasi di Provinsi Banten meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Posisi kredit korporasi tumbuh sebesar 7,36% (yoy) setelah pada triwulan IV 2021 tumbuh sebesar 1,77% (yoy). Hal ini terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan lebih tinggi pada sektor konstruksi, industry pengolahan dan *real estate*. Sementara itu, sektor yang mengalami perlambatan utamanya sector pertanian, perburuan dan kehutanan serta perdagangan.

Berdasarkan jenis kredit, peningkatan kredit korporasi dipengaruhi jenis kredit investasi dan kredit modal kerja yang tumbuh. Kinerja Kredit



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik IV.14 Pertumbuhan KMK sektor Korporasi (%yoy)

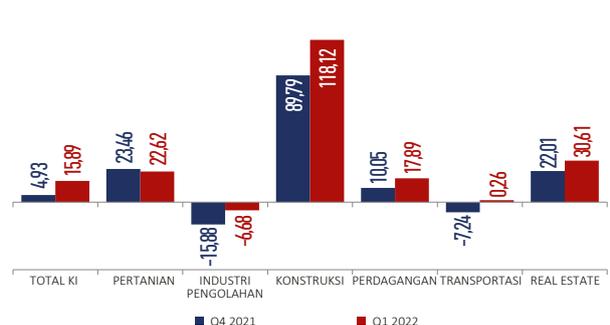


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik IV.13 Pangsa Kredit Korporasi Banten

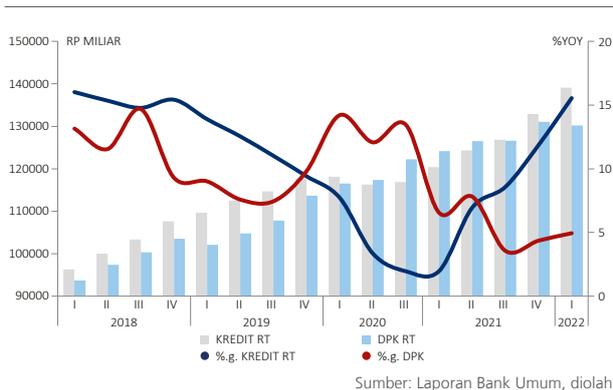
investasi (KI) kepada korporasi tumbuh sebesar 15,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 4,9% (yoy) pada triwulan IV 2021. Pertumbuhan tersebut utamanya pada KI Perdagangan, KI Perikanan, dan KI Konstruksi. Posisi kredit pada ketiga sektor tersebut mengalami pertumbuhan lebih tinggi. KI Perdagangan tercatat tumbuh sebesar 17,9% (yoy), dibandingkan triwulan IV 2021 yg tumbuh 10,1% (yoy) ditopang KI subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang di dominasi Makanan, Minuman dan Tembakau serta sub sektor Perdagangan Dalam Negeri Barang Antara Lainnya. KI Perikanan, dan KI Konstruksi secara konsekutif mengalami pertumbuhan lebih tinggi yaitu 66,1% (yoy) dan 118,1% (yoy) dari sebelumnya 22,1% (yoy) dan 89,8% (yoy) pada triwulan IV 2021.

Sejalan dengan pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja (KMK) juga mengalami peningkatan terutama pada sektor industri pengolahan, perikanan, dan *real estate*. Pada triwulan I 2022, KMK sektor industri pengolahan tumbuh 5,9% (yoy) dibandingkan 2,1% (yoy) pada triwulan IV 2021 ditopang KMK subsector industri



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik IV.15 Pertumbuhan KI sektor Korporasi (%yoy)



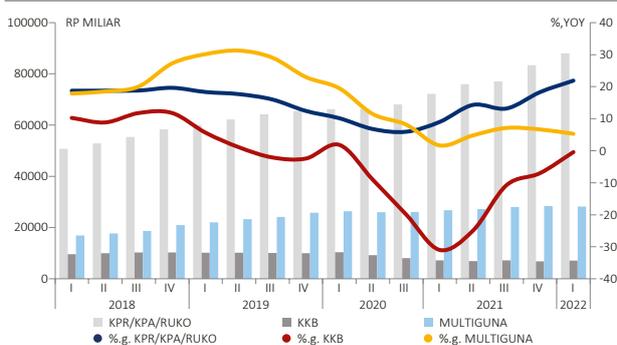
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik IV.16 Perkembangan Pertumbuhan Kredit dan DPK Rumah Tangga

logam dasar besi dan baja, industri barang dari plastik dan industri alas kaki. KMK sektor **perikanan** mengalami peningkatan sebesar 206,5% (yoy) dari sebelumnya 38,1% (yoy) utamanya ditopang KMK subsector budidaya biota laut tua, budidaya biota air tawar lainnya dan jasa perikanan lainnya. Sementara itu, KMK sektor *real estate* tumbuh positif sebesar 20,4% (yoy) dibandingkan triwulan IV yang tercatat kontraksi -4,8% (yoy) ditopang kinerja KMK subsector real estate perumahan menengah besar (tipe di atas 70) dan real estate lainnya.

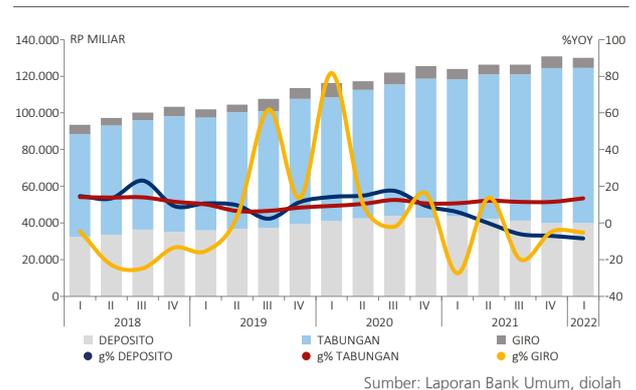
4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga

4.2.2.1 Sumber Kerentanan Sektor Rumah Tangga

Sektor rumah tangga akan sangat dipengaruhi oleh faktor penghasilan dan pekerjaan. Keyakinan masyarakat atas kondisi ekonomi saat ini mengalami peningkatan berdasarkan hasil Survei Konsumen (SK) KPw BI Provinsi Banten. Pada triwulan I 2022, ketersediaan lapangan kerja saat ini meningkat



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik IV.18 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga

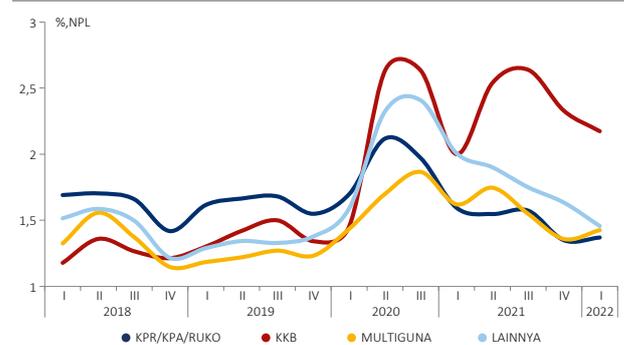


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik IV.17 Perkembangan Pertumbuhan DPK Rumah Tangga

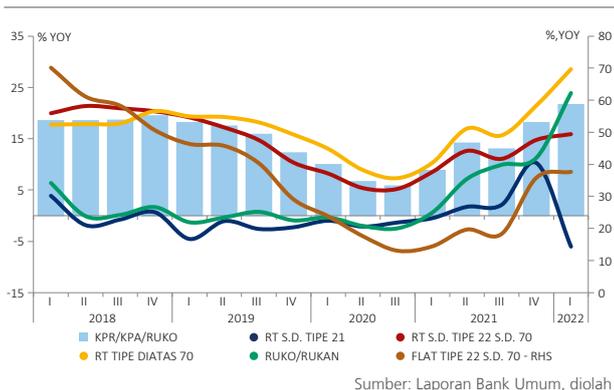
menjadi sebesar 81,8 dan konsumsi barang tahan lama juga membaik menjadi sebesar 104,8. Disisi lain, komponen penghasilan saat ini berada di level atas 100 (108.3). Kenaikan ketiga komponen tersebut mendorong perbaikan indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) menjadi sebesar 98.3, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2021 sebesar 81,9 namun masih di bawah batas level optimisme (<100).

4.2.2.2 Eksposur Perbankan dalam Sektor Rumah Tangga

Dana pihak ketiga (DPK) sektor rumah tangga pada triwulan I 2022 mengalami kenaikan ditopang kinerja membaiknya kinerja giro dan tabungan. DPK sektor rumah tangga tercatat sebesar Rp130,14 triliun dan tumbuh sebesar 4,91% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2021 yang tumbuh 4,33% (yoy). Komponen giro rumah tangga tercatat sebesar Rp5,45 triliun atau berkontraksi sebesar -5,04% (yoy), menurun dibandingkan -4,59% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Selanjutnya, komponen tabungan rumah tangga tercatat sebesar Rp84,56



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik IV.19 Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

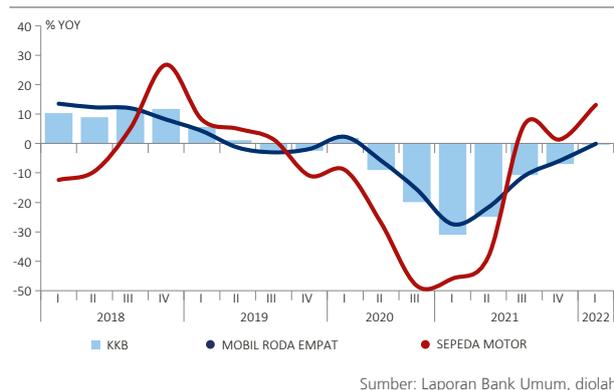
Grafik IV.20 Pertumbuhan KPR/KPA/Ruko Berdasarkan Tipe Rumah

triliun atau tumbuh 13,43% (yoy), meningkat dari 11,53% (yoy). Di sisi lain, komponen deposito dengan nilai sebesar Rp40,12 triliun tumbuh sebesar -8,93% (yoy), berkontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -6,93% (yoy).

Dari sisi penyaluran kredit, pada triwulan I 2022 posisi penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga di Provinsi Banten sebesar Rp138,99 triliun. Kredit Rumah Tangga tercatat tumbuh sebesar 15,53% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2021 sebesar 11,84% (yoy). Berdasarkan jenisnya, KPR (Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen/Ruko) mendominasi dengan pangsa 63,33%, kredit multiguna sebesar 20,31%, dan kredit kendaraan bermotor (KKB) sebesar 5,15% terhadap total kredit rumah tangga.

Peningkatan kredit RT terutama didorong akselerasi KPR dan KKB yang masih berkontraksi di tengah perlambatan kredit multiguna. Kinerja KPR yang meningkat terjadi pada seluruh jenis hunian. KPR tumbuh sebesar 21,88% (yoy) dibandingkan 18,29% (yoy) pada triwulan IV 2021. Hal ini terutama terjadi pada rumah tinggal dengan tipe menengah dan besar. Rumah tinggal tipe 22 s.d 70 m² (menengah) tumbuh 16,02% (yoy) dan tipe diatas 70 m² (besar) tumbuh 28,62% (yoy). Sementara itu, peningkatan pertumbuhan juga terjadi pada flat tipe 22 s.d 70 sebesar 37,78% (yoy) dari triwulan IV 2021 sebesar 35,92% (yoy).

Berdasarkan diskusi dengan Asosiasi Real Estat



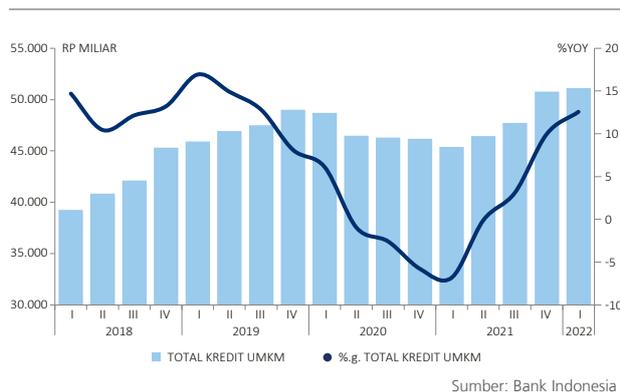
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik IV.21 Pertumbuhan KKB Berdasarkan Jenis Kendaraan

Indonesia (REI) Banten, tren pemulihan permintaan properti berlanjut. Kenaikan permintaan ini juga tercermin dari kenaikan harga properti. Indonesia Property Market Index pada kuartal ketiga 2021 mencatat indeks harga properti hunian berada pada angka 114,8, naik sebesar 1,80% secara kuartalan (*quarter-on-quarter*). Kebijakan insentif yang ada juga mendorong penyediaan perumahan sehingga penawaran tetap terjaga. Ke depan, insentif kepemilikan hunian ini masih berlanjut yakni Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) yang berlaku hingga bulan Juni 2022 diyakini akan mendorong peningkatan penjualan rumah inden. Kebijakan yang meliputi insentif PPN untuk perumahan, diperkuat dengan pelonggaran rasio *Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV)* kredit atau pembiayaan properti.

Pada sektor otomotif, penyaluran KKB pada triwulan I-2022 masih mengalami kontraksi namun tercatat semakin membaik yaitu sebesar -0,40% (yoy) dibandingkan -6,97% (yoy) pada triwulan IV 2021. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh kredit pembelian mobil roda empat didukung implementasi kebijakan PPnBM. Kredit mobil roda empat tumbuh sebesar -0,10% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -5,84% (yoy),

Penurunan NPL pada seluruh jenis kredit rumah tangga menurunkan risiko kredit dan menjaga tetap berada dalam batas aman yang ditetapkan. Penurunan risiko tercermin dari NPL yang terjaga sebesar 1,43%. Adapun secara konsektif, jenis kredit



Grafik IV.22 Perkembangan Kredit UMKM

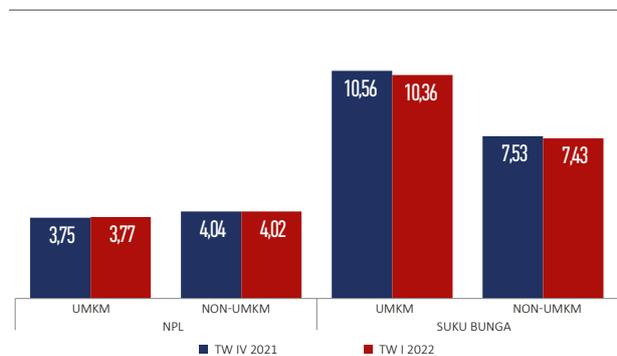
KPR, KKB, dan multiguna tercatat menjadi sebesar 1,37%, 2,17%, dan 1,43%.

4.3 PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

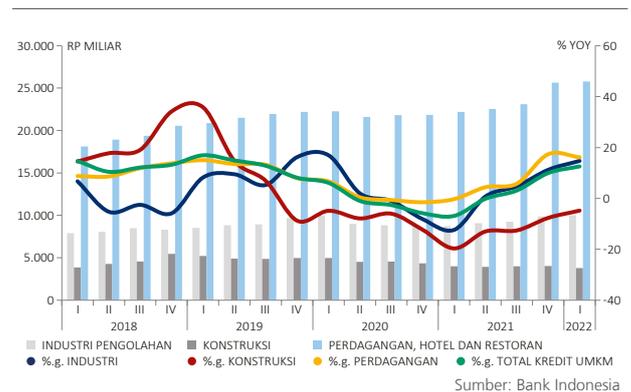
4.3.1 Perkembangan Pembiayaan UMKM

Kredit Perbankan Provinsi Banten kepada UMKM mengalami peningkatan pada triwulan I 2022. Kredit UMKM di Banten tumbuh lebih tinggi yaitu sebesar 12,58% (yoy). Capaian ini melanjutkan pertumbuhan positif pada triwulan sebelumnya sebesar 9,98% (yoy). Penyaluran kredit kepada UMKM di Provinsi Banten secara nominal tercatat sebesar Rp51,1 triliun atau 13,27% dari total kredit yang disalurkan di Provinsi Banten.

Peningkatan kinerja penyaluran kredit dipengaruhi oleh pertumbuhan yang terjadi pada sebagian besar kredit UMKM. Menurut sektornya, kredit UMKM dominan yang mengalami pertumbuhan



Grafik IV.24 Perkembangan Suku Bunga Kredit dan NPL UMKM

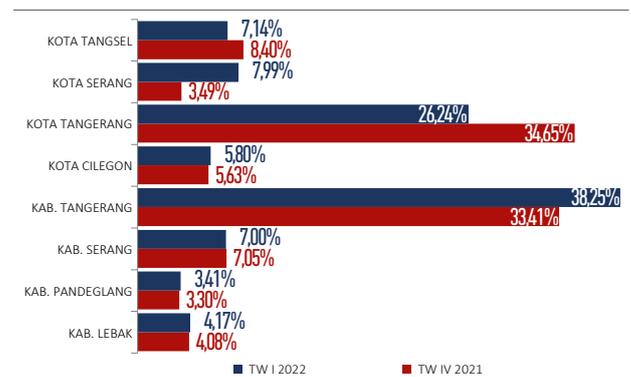


Grafik IV.23 Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha

yaitu kredit UMKM sektor perdagangan, hotel dan restoran (pangsa: 50,47%) tumbuh positif sebesar 16,16% (yoy), sedikit melambat dibandingkan 17,36% (yoy) pada triwulan sebelumnya dan kredit UMKM sektor industri pengolahan (19,62%) yang tumbuh sebesar 14,70% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 11,21% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Secara spasial, kredit UMKM didominasi oleh wilayah Tangerang Raya yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dengan pangsa mencapai 71,6% dari keseluruhan kredit UMKM di Provinsi Banten. Sementara itu, 5 daerah lainnya hanya sebesar 28,4% atau Rp16,26 triliun. Kredit UMKM Kab Tangerang sebesar Rp21,93 triliun atau sebesar 38,3%, Kredit UMKM di Kota Tangerang sebesar Rp15,1 triliun atau sebesar 26,2%. Kredit UMKM di Kota Tangerang Selatan sebesar Rp4,1 triliun atau sebesar 7,1%.

Risiko kredit UMKM tercatat mengalami penurunan dan berada dalam rentang batas



Grafik IV.25 Pangsa Kredit UMKM secara Spasial

yang ditetapkan sebesar 5,00%. Hal tersebut tercermin pada angka NPL kredit UMKM triwulan I 2022 yang tercatat sebesar 3,77%, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2021 sebesar 3,76%. Kenaikan NPL kredit UMKM terjadi pada beberapa sektor ekonomi utama Provinsi Banten antara lain industry pengolahan, konstruksi dan *real estate*.

Suku bunga kredit UMKM tercatat mengalami penurunan. Pada triwulan I 2022, suku bunga kredit UMKM tercatat sebesar 10,36%, lebih rendah dibandingkan suku bunga kredit non UMKM yakni 7,43%. Hal ini menunjukkan potensi risiko UMKM yang dinilai lebih tinggi. Namun demikian, jika dibandingkan dengan triwulan IV 2021, suku bunga kredit keduanya baik UMKM maupun non UMKM relatif lebih rendah.

4.3.2 Program Pengembangan UMKM Bank Indonesia

Bank Indonesia senantiasa mendorong pelaksanaan pengembangan UMKM dengan mengedepankan pemberian dorongan akses UMKM kepada lembaga keuangan secara seimbang dan berkualitas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. UMKM berkontribusi besar untuk menopang perekonomian termasuk dalam penyerapan tenaga kerja sehingga berperan dalam stabilitas keuangan. Secara nasional berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,92% atau sekitar 119,56 Juta Tenaga Kerja. UMKM juga turut berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 57,14% (7034,14 Triliun Rupiah). Sehubungan hal tersebut, Bank Indonesia melakukan berbagai upaya guna mewujudkan UMKM berdaya saing dan inklusif terutama melalui pelaksanaan pilar kebijakan UMKM yaitu, korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan.

Dalam rangka mempercepat pemulihan UMKM pada masa pandemi Covid-19, Bank Indonesia juga melakukan berbagai langkah, yaitu (1) melakukan komunikasi kebijakan untuk mendorong UMKM

memanfaatkan relaksasi kebijakan serta pro-aktif melayani penyelesaian masalah pada UMKM bersama pemerintah daerah dan perbankan; (2) program virtual peningkatan kapasitas UMKM melalui literasi keuangan digital dan pelatihan pencatatan keuangan melalui aplikasi SI-APIK; (3) sinergi aksi mempercepat akses pembiayaan bersama BMPD (Badan Musyawarah Perbankan Daerah), asosiasi, BUMN, Lembaga Swadaya Masyarakat melalui dukungan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) bagi UMKM binaan yang terdampak; serta perluasan pemanfaatan *digital payment* berupa penggunaan aplikasi QR payment, Pemasaran *online* dan *offline* baik pada *event* nasional maupun internasional dan korporatisasi *merchant*, serta instansi daerah sebagai *off-taker*.

Selain itu, program pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga diarahkan terutama untuk mengurangi tekanan inflasi harga pangan yang bergejolak (*volatile food*) dan mendorong kinerja UMKM berorientasi ekspor dan pendukung pariwisata dalam rangka mengurangi defisit neraca berjalan atau yang biasa disebut *current account deficit* (CAD).

4.3.2.1 Klaster Ketahanan Pangan

Hingga triwulan I 2022, KPw BI Provinsi Banten membina 5 klaster ketahanan pangan dengan komoditas padi, cabai merah dan bawang merah yang tersebar di Provinsi Banten untuk mendukung stabilitas ketahanan pangan. Adapun upaya pengembangan UMKM binaan KPw BI Banten hingga triwulan I 2022 sebagai berikut:

Klaster Cabai Merah – Kab. Pandeglang dan Kab. Serang

Terdapat 2 klaster binaan KPw BI provinsi Banten yaitu Gapoktan Taruna Mekar di Kab. Pandeglang dan Poktan Setia Kawan di Kab. Serang. Pengembangan dilakukan dengan pembuatan demplot budidaya cabai prolige (produksi lipat ganda), *penerapan good agricultural product* (GAP), mekanisasi pertanian, dan pengolahan pasca panen. Beberapa upaya yang dilakukan KPw BI Provinsi Banten tidak hanya melalui strategi pengembangan sisi hulu dan *off-taker* di hilir saja namun juga memberikan peningkatan akses



kepada lembaga keuangan melalui pelatihan SiAPIK (Sistem Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan) dan penggunaan QRIS guna mendorong kemudahan pencatatan keuangan usaha dalam rangka *credit rating* oleh perbankan. Pada kelompok Taruna Mekar, keberhasilan *matching* perbankan ditunjukkan dengan berhasil diperolehnya pinjaman dari Bank Mandiri sebagai modal usaha dan hilirisasi dalam bentuk pasta cabai merah.

Kluster Bawang Merah – Kab. Serang dan Kab. Pandeglang

Terdapat 2 kluster binaan KPw BI provinsi Banten yaitu Poktan Mekar Jaya di Kab. Serang dan Poktan Sejahtera di Kab. Pandeglang. Pengembangan dilakukan dengan budidaya *off-season* menggunakan irigasi kabut sehingga dapat panen 3 kali setahun, bantuan fasilitasi irigasi dan pengairan, serta pembuatan penangkaran bibit bawang varian Crok Kuning. Poktan juga memperoleh pelatihan SiAPIK dan sosialisasi QRIS dalam rangka peningkatan akses keuangan. Ke depan, direncanakan pengembangan kluster lebih lanjut dengan metode demplot serta *light trap*, teknologi ramah lingkungan guna mengendalikan hama.

Kluster Padi – Kab. Lebak

Gapoktan Suka Bungah telah menjadi binaan KPw BI provinsi Banten sejak tahun 2015. Pengembangan dilakukan dengan penggunaan bibit Jarwo Super, membuat penangkaran benih, pengemasan hasil panen, dan fasilitasi mesin giling padi. Penjualan telah

berhasil dilakukan melalui berbagai channel antara lain Toko Tani Indonesia, *marketplace*, Instagram, dan penjualan langsung kepada mitra yaitu PT Indofood Sukses Makmur, Tbk dalam bentuk beras merah. Kelompok juga berhasil memperoleh pinjaman dari Bank BRI. Pada Desember 2021, Kelompok telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT Food Station Tjipinang Jakarta dalam rangka pemenuhan pasokan Beras dan berhasil memenuhi 10 Ton beras. PKS ini difasilitasi oleh kantor perwakilan BI Banten yang merupakan perwujudan dari Kerjasama Antar Daerah dan memberikan jaminan ketersediaan pasar bagi produsen. Hingga triwulan I-2022, terdapat kenaikan 300% permintaan beras oleh PT Food Station Tjipinang Jakarta sebagai hasil dari inisiasi kerjasama antar daerah (KAD) yang telah dilaksanakan pada akhir tahun 2021.

Pada tahun 2022 dalam rangka peningkatan produktivitas dan pengembangan kelompok tani direncanakan akan dilaksanakan pengembangan digitalisasi bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten.

Kluster Perikanan Tangkap – Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang

Terdapat kluster bidang perikanan yang dikembangkan yaitu Desa Binuangeun dan Tanjung Lesung di Kab. Pandeglang. Kluster *Local Heroes* Binuangeun ini diarahkan untuk mampu memenuhi permintaan ekspor sehingga strategi pembinaan yang dilakukan

antara lain teknologi hulu dan hilir produksi, penggunaan pakan yang berkualitas dan ramah lingkungan, *off-taker* ekspor dan *business matching*. Dalam pemasarannya, klaster akan bekerjasama dengan PT Aruna Jaya Nuswantara yaitu platform digital ekspor sektor perikanan.

On-going Pembentukan Klaster Ketahanan Pangan Potensial

Terdapat beberapa komoditas potensial yang sedang dalam tahapan persiapan pembinaan oleh KPw BI Provinsi Banten yaitu Klaster Mina Padi. Klaster Mina Padi rencananya akan dikembangkan di Kab. Lebak bekerjasama dengan Dinas pertanian setempat dan BPTP yang mana proses survei kelayakannya telah dilakukan pada triwulan IV 2021. Bentuk pelaksanaan pembinaan berupa *demonstration plot* (demplot) dan pelatihan budidaya Mina Padi terutama menggunakan teknologi kincir air.

4.3.2.2 UMKM Binaan Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan UMKM dilakukan secara *end-to-end process* dari hulu ke hilir, sehingga selain membantu proses produksi, pengembangan dan perluasan pasar produk UMKM juga didorong melalui berbagai kegiatan yaitu Fasilitasi Expo, *Business Matching* dengan lembaga pembiayaan, *Business Coaching* UMKM, dan akses ke *platform merchant online* pada event Karya Kreatif Indonesia dan Karya Kreatif Banten. Untuk perluasan akses ke pasar internasional, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan kantor perwakilan BI di luar negeri dan atase perdagangan dalam rangka expo perdagangan baik *online* maupun *offline*.

Adapun UMKM yang menjadi binaan KPw BI Provinsi Banten yaitu KUB Mitra Mandala dengan produk Gula Aren Hariang, KUB Sakinah dengan produk Anyaman Pandan Banjar, dan KUB Bina Niaga dengan produk Sale Pisang Cilograng. Seluruh kelompok tersebut telah melakukan penjualan melalui *marketplace*. Melalui berbagai *expo* dan promosi internasional bersama KPw BI Banten, KUB Mitra Mandala berhasil meningkatkan penjualannya ke berbagai negara didukung meningkatnya tren penggunaan *brown*

sugar di dunia, selain itu, KUB juga memperoleh pembiayaan dari investor dan berhasil meraih juara 2 Wirausaha Muda Syariah pada ajang lomba FESyar 2022.

Dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui kampanye nasional Bangga Buatan Indonesia serta Bangga Wisata Indonesia Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten menyelenggarakan rangkaian acara Karya Kreatif Banten (KKB) Tahun 2022 yang dibuka pada Senin, 11 Oktober 2022. Karya Kreatif Banten Tahun 2022 juga menjadi ajang pameran dan kurasi produk UMKM Potensial, *capacity building* bagi UMKM, serta *business matching* yaitu pertemuan bisnis yang menghubungkan antara UMKM dengan calon *buyer* dalam dan luar negeri atau partner/agregator dalam rangka memperluas *networking* serta meningkatkan akses pembiayaan baik dengan perbankan maupun dengan lembaga keuangan non bank.

On-going Pembentukan UMKM LED Potensial

Pada tahun 2022, KPw BI Provinsi Banten berencana untuk melakukan perluasan pembinaan UMKM dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi lokal yaitu pada komoditas talas beneng dan kain tenun Baduy. Komoditas Talas Beneng yang akan dikembangkan berlokasi di Kab. Pandeglang. Sebagai langkah awal telah dilakukan penandatanganan dokumen inisiasi klaster antara KPw BI Provinsi Banten dan Perkumpulan Talas Beneng Indonesia (Pertabenindo) Banten bersama Dinas Pertanian Provinsi Banten. Adapun berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan strategi pengembangan akan menasar akses pasar lokal dan ekspor bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) dan pembuatan demplot budidaya talas beneng organik. Talas beneng yang saat ini sedang menjadi primadona dan dikembangkan di berbagai daerah diharapkan mampu mendorong kemajuan daerah dan unggul dibandingkan daerah lainnya. Produksi talas beneng kemudian akan diolah menjadi produk setengah jadi yaitu tepung maupun berbagai produk akhir. Pada triwulan II 2022, telah

diinisiasi kerjasama dalam rangka penerapan teknologi budidaya meliputi metode tanam dan budidaya organik bekerjasama dengan BPTP Provinsi Banten.

Komoditas lainnya yang dikembangkan pada tahun 2022 adalah Kopi. Provinsi Banten memiliki beragam potensi sumber daya alam untuk dikembangkan, salah satunya adalah komoditas kopi. Pada tahun 2020 jumlah produksi kopi yang dihasilkan adalah 1.978 ton dan mengalami peningkatan sekitar 1,20% pada tahun 2021 menjadi 2002 ton. Salah satu potensi kopi yang dimiliki Provinsi Banten adalah Kelompok tani Kopi Banten Kidul (KOBAKI) yang berasal dari Kawasan Hutan Adat Kasepuhan Karang, Desa Jagaraksa Muncang, Kabupaten Lebak, Banten. Jenis kopi yang tumbuh pada daerah ini adalah Arabika dan Robusta. Pengembangan komoditas kopi banten bekerjasama dengan Kementerian Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dan Dinas Pertanian Provinsi Banten.

4.3.2.3 Pengembangan UMKM Syariah dan Kemandirian Pesantren

Dari sisi syariah, Bank Indonesia juga melakukan pemberdayaan pesantren. Pemberdayaan pesantren meliputi Kegiatan santripreneurship yang bertujuan meningkatkan ilmu dan pengetahuan santri mengenai pengelolaan sektor usaha potensial yang dapat dilakukan oleh masing-masing pondok pesantren. Bekerjasama dengan Koperasi Mitra Santri Nasional (KMSN) serta dibantu juga oleh Pimpinan Ponpes Tanara. Pemberdayaan Pesantren dilakukan di beberapa pesantren yang bekerjasama dengan KPw BI Banten, yaitu Pondok Pesantren Modern Daarun Naim, Pondok Pesantren Manahijussadat, Pondok Pesantren Roudlotul Huda, Pondok Pesantren Al-Kirom, Pesantren Al-Washliyah dan Pondok Pesantren Al-Furqon.

Pesantren Al-Washliyah, Kabupaten Lebak

Pengembangan Kemandirian Pesantren Al-Washliyah yaitu kain tenun baduy muslim menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Inisiasi dilakukan dengan melibatkan para pengrajin tenun di wilayah Baduy Luar melalui peningkatan kapasitas teknik tenun mulai dari pewarnaan, desain, hingga finalisasi produk. KPw BI

Provinsi Banten juga memfasilitasi penyediaan mesin serta berbagai pelatihan dengan melibatkan desainer Indonesia yaitu Bapak Wignyo Rahadi.

Pesantren Al-Kirom, Kabupaten Pandeglang

Pengembangan Kemandirian Pesantren Al-Kirom dilakukan melalui pengembangan Holtikultura. Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Kirom di Desa Perigi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang mengembangkan aneka jenis sayuran guna menunjang kemandirian ponpes serta meningkatkan ekonomi warga sekitar. Beberapa jenis sayuran holtikultura yang dikembangkan antara lain, yakni cabai merah, oyong pare, terong dan ketimun. Bank Indonesia Banten turut mendukung dengan memberikan fasilitasi demonstrasi plot (demplot) cabai merah bekerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten.

Pesantren Al-Furqon, Kabupaten Lebak

Pengembangan Kemandirian Pesantren Pesantren Al-Furqon melalui pengembangan industry kreatif berbahan dasar Bambu. Dari bambu bisa digunakan menjadi berbagai macam kreasi kerajinan, beberapa kreasi tersebut diantaranya adalah miniatur rumah pohon, gelas, becak, mobil, sepeda, motor Vespa, perahu Pinisi, baki gelas, kendi, lumbung padi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Bank Indonesia Banten turut mendukung dengan memberikan fasilitasi peralatan pendukung produksi untuk dapat meningkatkan kualitas serta diversifikasi jenis produk yang dihasilkan. Selain memasarkan ke seluruh Indonesia, Pesantren Al-Furqon berhasil mengirimkan hasil produksi hingga ke beberapa negara lain, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Hongkong, China Hingga Jerman.

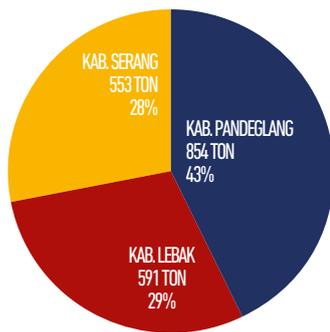
Penguatan Sinergi untuk Mendorong Komoditas Kopi Banten Menjadi Komoditas Unggulan di Level Nasional





Kopi menjadi salah satu minuman yang cukup banyak digemari di Indonesia dan Global. Provinsi Banten memiliki beragam potensi sumber daya alam untuk dikembangkan, salah satunya adalah komoditas kopi. Pada tahun 2020 jumlah produksi kopi yang dihasilkan adalah 1.978 ton dan mengalami peningkatan sekitar 1,20% pada tahun 2021 menjadi 2002 ton. Adapun daerah yang menjadi penyumbang jumlah produksi kopi terbesar di provinsi Banten adalah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang, dengan jumlah produksi masing-masing pada tahun 2021 adalah 854 ton, 591 ton, dan 553 ton atau sekitar 99% dari total produksi kopi di Provinsi Banten. Selain itu, areal tanaman perkebunan terluas secara spasial berada pada tiga daerah yang sama dengan jumlah produksi kopi terbesar di Provinsi Banten. Luas areal tanaman perkebunan masing-masing daerah pada tahun 2021 adalah 2.754 ha, 1.504 ha, dan 1.939 ha atau mencapai sekitar 99% total areal tanaman perkebunan di Provinsi Banten. Rata-rata tingkat produktivitas pada tahun 2021 dari tiga daerah dengan areal perkebunan terluas dan produksi jumlah kopi terbesar adalah 0,33. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat produksi kopi di Provinsi Banten pada setiap 1 ha adalah 330 kilogram.

Secara regional Jawa, persentase kontribusi produksi kopi Provinsi Banten masih relatif rendah dengan historis pada tahun 2020-2021 masing-masing adalah 2,2% dan 2%. Sejalan dengan hal tersebut perbandingan persentase untuk luas areal tanaman perkebunan antara provinsi Banten dengan regional Jawa pada tahun 2020-2021 masing-masing adalah 3,1% dan untuk tingkat nasional adalah 0,5%. Disisi lain produksi kopi banten dan nasional terdapat persamaan tren secara historis dari tahun 2018-2022. Di tahun 2019 hingga 2020, masing-



Grafik B1.1 Tiga Daerah dengan Jumlah Produksi Kopi Terbesar di Provinsi Banten

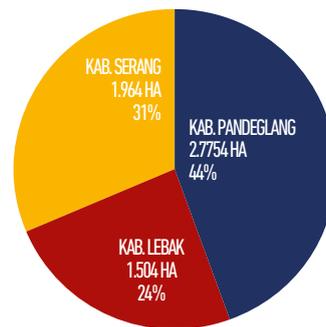
masing mengalami kenaikan signifikan yang awalnya sebesar 752.511 ton menjadi 1.250.452 ton di tingkat nasional dan 2.558 ton menjadi 6.233 ton di tingkat Provinsi Banten. Walaupun persentase jumlah produksi dan luas areal perkebunan kopi Provinsi Banten relatif terbatas dibandingkan dengan regional Jawa dan nasional, tetapi terdapat beberapa peluang yang kedepannya bisa dikembangkan dari komoditas kopi ini, antara lain peluang lokasi Banten yang cukup strategis karena berdekatan dengan Provinsi DKI secara historis Kopi Banten yang sudah ada sejak Zaman Hindia-Belanda.

Dukungan Stakeholder untuk Mendorong Komoditas Kopi Banten

Bank Indonesia bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong perkembangan komoditas kopi di Provinsi Banten. Salah satu caranya adalah melalui terselenggaranya rangkaian acara yang ada pada Karya Kreatif Banten (KKB) 2022 yaitu: *talkshow* Kisah Kopi Jawara dan Deklarasi Dukungan



Gambar 1 Perkembangan Perekonomian Kabupaten Natuna Dari Sisi Pengeluaran



Grafik B1.2 Tiga Daerah dengan Areal Tanaman Terluas di Provinsi Banten

Kopi Banten. Pada sesi acara *talkshow*, Bank Indonesia mengundang pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pengembangan Kopi di Banten, mulai dari hulu hingga hilir prosesnya untuk berbagi informasi mengenai peran masing-masing pihak. Beberapa pembicara yang diundang pada sesi *talkshow* tersebut adalah: (i) Ibu Catur Endah Prasetiani P, S.Si., M.T, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK), (ii) Ir. H. Agus M. Tauchid S, M.Si., Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, (iii) Ibu Sri Linda, Ketua Asosiasi Kopi Indonesia (ASKI) Provinsi Banten, (iv) Bapak Muhammad Aga, Juara *Indonesia Barista Championship* 2018, dan (v) Bapak Emeng, perwakilan petani kopi Provinsi Banten (KOBAKI).

Setelah memahami peran masing-masing, Bank Indonesia mengajak pemangku kepentingan terkait untuk melakukan penandatanganan Deklarasi Dukungan Kopi Banten dengan maksud sebagai komitmen untuk mendukung pengembangan kopi di



Gambar 2 Dukungan terhadap Kopi Banten sebagai Komoditas Unggulan Nasional



Gambar 3 Kopi Banten Kidul (KOBAKI), Muncang, Kab Lebak

Provinsi Banten dari sisi hulu hingga hilir prosesnya. Penandatanganan dilakukan oleh: (i) Ibu Catur Endah Prasetiani P, S.Si., M.T, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK), (ii) Bapak Imaduddin Sahabat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, (iii) Ir. H. Agus M. Tauchid S, M.Si., Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, (iv) Ibu Sri Linda, Ketua Asosiasi Kopi Indonesia (ASKI) Provinsi Banten, (v) Bapak Muhammad Aga, Juara *Indonesia Barista Championship 2018*, (vi) Perwakilan perbankan se-Provinsi Banten, dan (vii) Bapak Emeng, perwakilan petani kopi Provinsi Banten (KOBAKI).

Potensi Komoditas Kopi Banten yang tersebar luas

Salah satu potensi kopi yang dimiliki Provinsi Banten adalah Kopi Banten Kidul (KOBAKI) yang berasal dari Kawasan Hutan Adat Kasepuhan Karang, Desa Jagaraksa Muncang, Kabupaten Lebak, Banten.

Kawasan tersebut pada tanggal 30 Desember 2016 lalu ditetapkan sebagai hutan adat oleh Presiden Joko Widodo dengan luas 486 ha. Para pemuda di desa tersebut menumbuhkan ekowisata, pertanian, dan perkebunan dengan tetap menjaga kearifan lokal yang dimilikinya. Jenis kopi yang tumbuh pada daerah ini adalah Arabika dan Robusta.

Kopi Arabika Jagaraksa Muncang memiliki keunikan dapat tumbuh dengan baik dan terus berkembang di ketinggian 500-800 mdpl. Hal ini menjadi daya tarik yang unik khususnya bagi Pelaku Industri Kopi baik dari Hulu sampai Hilir karena pada umumnya kopi arabika tumbuh di ketinggian di atas 1000 mdpl. Kopi Arabika Jagaraksa Muncang ini terus dikembangkan dan dirawat secara serius, terlebih lagi kopi ini mungkin merupakan satu-satunya Kopi jenis Arabika di Lebak, Banten. Kopi ini akan terus tumbuh berkembang dan menjadi sebuah potensi jangka panjang. Hal tersebut membuka peluang kerjasama antara Hulu dan Hilir untuk bersama-sama mengembangkan potensi kopi lokal agar terus berkembang dan berkualitas.

Selain KOBAKI, terdapat juga potensi kopi lain yang dimiliki Provinsi Banten yaitu Kopi Neglasari. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Neglasari memiliki Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) antara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Neglasari dengan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Banten dengan informasi lahan dan perkebunan: (i) seluas ± 116 ha berada pada Kawasan Hutan Lindung (HL), (ii) seluas ± 87 ha pada Kawasan



Gambar 4 Kopi Neglasari



Hutan Produktif Tetap (HP), dan (iii) seluas ± 29 ha di desa Talagasari, Kecamatan Saketi. Selain itu, memiliki ketinggian tanam $\pm 600 - 1200$ mdpl. Untuk saat ini KUPS Neglasari menghasilkan kopi Robusta Clone Chanepora dengan kapasitas panen Ceri 50 Ton pertahun (petik merah), proses jemur menggunakan matahari (natural process), sortasi 5 ukuran (single variant). Selain itu, KUPS Neglasari memiliki kualitas yang menurut hasil Kontes Kopi Spesialiti Indonesia XIII – 2021 oleh PT. Riset Perkebunan Nusantara (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia) memiliki nilai 78,33 (*Grade I*) dengan catatan rasa: *cerealy coffee pulp, rather earthy, woody, dan low body*. Kuantitas Green Beans KUPS Neglasari (Januari 2021): $\pm 500-600$ kilogram dalam kemasan 1 kilogram. Kopi bubuk halus (Januari 2022): 50 buah: 100 gram dan 50 buah: 150 gram. Kemudian memiliki hasil sangria (*roasting*) dengan Teknik city/full city 220-225 derajat Celsius standar kedai kopi dan komersial nasional.

Selain Kobaki dan KUPS Neglasari, terdapat kopi Gunung Karang dari Pandeglang, Provinsi Banten yang memproduksi jenis biji kopi unik, yaitu Kopi Lepeh lalay berjenis Robusta. Kopi Lepeh lalay merupakan Kopi Banten dengan Proses Lepeh Lalay (Bahasa Sunda: Kunyahan Kelelawar) yang berasal dari Gunung Karang, Kabupaten Pandeglang. Seperti Kopi Luwak, Kopi Lepeh lalay diproduksi melalui proses yang dibantu dengan hewan, dalam hal ini kelelawar.

Cita rasa Kopi Robusta Lepeh Lalay ini menjadikan rasa Robusta yang lembut (*soft*) dan Manis serta berkualitas karena indra penciuman Lalay/kelelawar mendeteksi buah cherry kopi yang matang sempurna. Menurut penelitian yang dilakukan di Universitas Lampung, kelelawar pemakan buah Kopi mempunyai karakteristik spesial berada pada ketinggian dan kelerengan tertentu yaitu 500-700mpdl dan 700-900mpdl dengan berinteraksi di dalam ekosistem untuk memilih habitatnya seperti goa Dan hutan alami. Aktifitas bertengger pada Kelelawar biasanya pada tegakan kopi yang rimbun. Dan habitat Kelelawar pemakan buah Kopi salah satunya berada di area Gunung Karang, Pandeglang. Selain memiliki rasa yang otentik, kopi asli Banten itu juga selalu dijaga kualitas dalam budidayanya. varietas unggulan robusta dari Gunung Karang perlu diproses secara alami dengan hati-hati.



Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB V

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Kinerja transaksi Sistem Pembayaran (SP) non tunai secara umum tercatat mengalami moderasi di tengah pertumbuhan ekonomi yang tumbuh melambat. Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS), kliring, remitansi, QRIS, dan Uang Elektronik mencatatkan pertumbuhan walaupun tidak setinggi periode sebelumnya. Namun demikian, Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) tercatat mengalami peningkatan, seiring dengan pelanggaran kebijakan berpergian ke negara-negara tertentu dan peningkatan penggunaan kanal nirsentuh.

Dari sisi pembayaran tunai, perputaran uang melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten mengalami net outflow sebesar Rp1,46 triliun, menurun dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat net outflow sebesar Rp4,02 triliun.

Sementara itu, pengkinian data yang dilakukan pada triwulan sebelumnya telah berpengaruh terhadap peningkatan KPM Program Sembako dan Program Keluarga Harapan sehingga berkontribusi terhadap peningkatan jumlah bantuan sosial nasional untuk wilayah Provinsi Banten. Upaya penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara non tunai sebagai bagian dari program digitalisasi.

Program digitalisasi ekonomi di Provinsi Banten juga menunjukkan perkembangan, sebagaimana ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah National Merchant Repository (NMR) QR Code Indonesia Standard (QRIS) di berbagai komunitas masyarakat serta penerimaan daerah. Hal ini sejalan dengan semakin baiknya penetrasi digital di Provinsi Banten, salah satunya dengan akselerasi Program Pasar SIAP QRIS di berbagai pasar tradisional Provinsi Banten.



PERTUMBUHAN
TRANSAKSI KRILING*

0,85%

Triwulan I 2022 (yoy)

10,17%

Tw IV 2021

*Pertumbuhan Nominal



PERTUMBUHAN
TRANSAKSI RTGS

-0,23%

Triwulan I 2022 (yoy)

24,60%

Tw IV 2021



PERTUMBUHAN MERCHANT
QRIS*

122,75%

Triwulan I 2022 (yoy)

113,47%

Tw IV 2021

*Terhadap Target



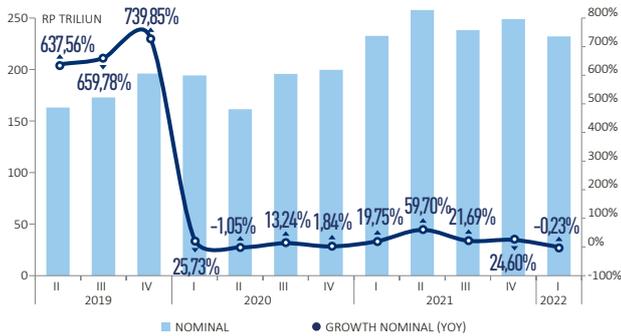
JUMLAH TEMUAN
UANG PALSU

144 lbr

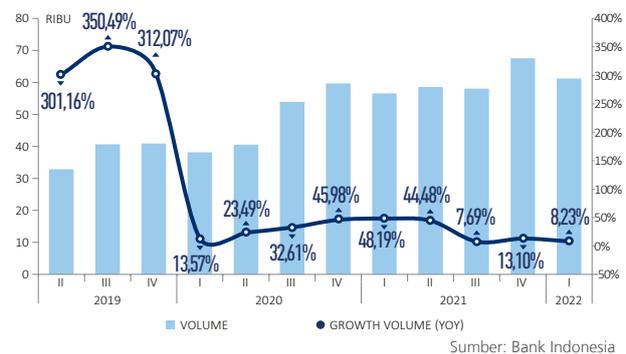
2022*

522 lembar

Tw IV 2021



Grafik V.1 Transaksi RTGS di Provinsi Banten Berdasarkan Nominal



Grafik V.2 Transaksi RTGS di Provinsi Banten Berdasarkan Volume

5.1 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

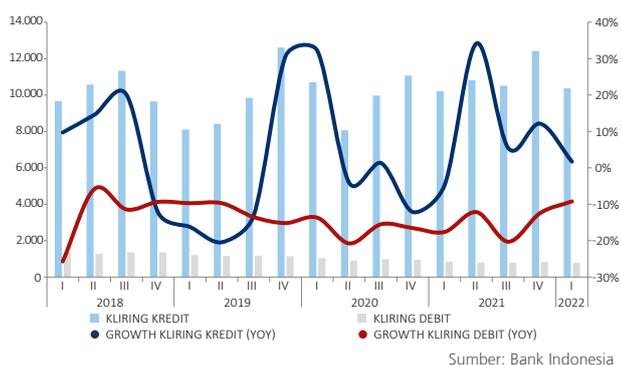
5.1.1 Perkembangan Transaksi BI-Real Time Gross Settlement

Transaksi keuangan non tunai di Provinsi Banten melalui Sistem BI - *Real Time Gross Settlement* (RTGS) pada triwulan I 2022 terkontraksi secara nominal dan mengalami moderasi secara volume. Secara nominal, transaksi melalui RTGS mencapai nilai Rp232,15 triliun, terkontraksi -0,23% (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2021 dengan nominal sebesar Rp248,87 triliun dengan pertumbuhan 24,60% (yoy). Sedangkan dari sisi volume, jumlah transaksi RTGS pada triwulan I 2022 tercatat sebanyak 61.207 transaksi, tumbuh sebesar 8,23% (yoy). Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2021 dengan volume sebanyak 67.533 transaksi dengan pertumbuhan sebesar 13,10% (yoy). Perkembangan transaksi BI-RTGS yang menurun sejalan dengan perlambatan kondisi perekonomian Provinsi Banten pasca berakhirnya momentum Natal dan Tahun Baru.

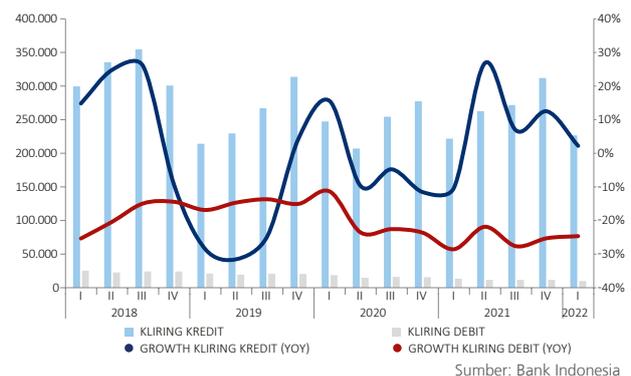
5.1.2 Perkembangan Transaksi Kliring

Transaksi non tunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan I 2022 secara nominal maupun volume tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Nominal transaksi pada triwulan I 2022 tercatat sebesar Rp11,15 triliun atau tumbuh sebesar 0,85% (yoy). Capaian tersebut lebih rendah dari triwulan sebelumnya dengan nominal Rp13,16 triliun atau tumbuh 10,17% (yoy). Secara volume, transaksi SKNBI juga tercatat termoderasi dengan jumlah mencapai 236.598 transaksi atau 0,66% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebanyak 323.534 transaksi dengan pertumbuhan 10,45% (yoy).

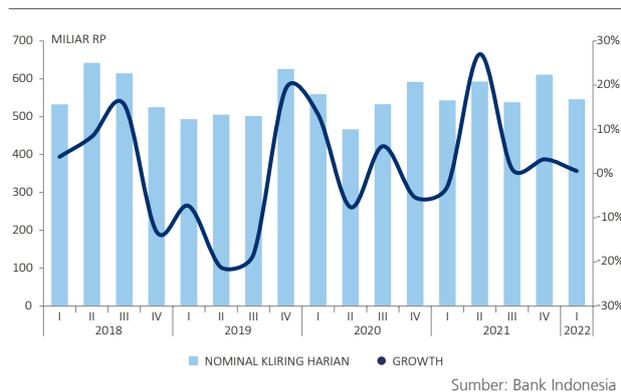
Moderasi terjadi pada seluruh layanan kliring, baik kliring debit maupun kliring kredit. Berdasarkan pola historis sejak tahun 2015, kliring kredit masih mendominasi transaksi SKNBI di Provinsi Banten dibandingkan dengan kliring debit. Pangsa transaksi kliring kredit pada triwulan I 2022 terhadap total transaksi SKNBI mencapai 93,03%.



Grafik V.3 Nominal Transaksi Kliring di Provinsi Banten Berdasarkan Jenis

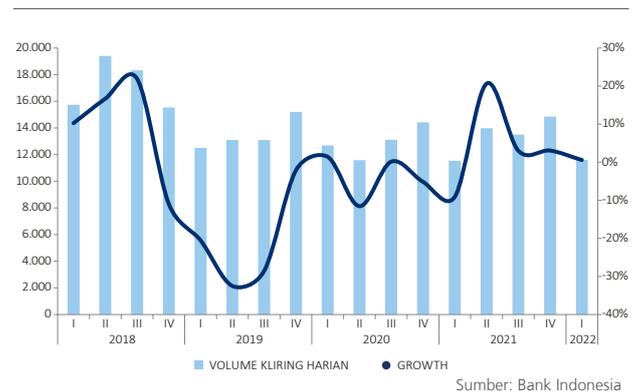


Grafik V.4 Volume Transaksi Kliring di Provinsi Banten Berdasarkan Jenis



Grafik V.5 Nominal Transaksi Kliring Harian di Wilayah Provinsi Banten
Sumber: Bank Indonesia

Sejalan dengan transaksi secara triwulanan, total perputaran kliring harian berdasarkan volume pada triwulan I 2022 mencapai dengan 11.601 transaksi atau tumbuh sebesar 0,58% (yoy). Volume tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya dengan 14.858 transaksi atau sebesar 3,07% (yoy). Lebih lanjut berdasarkan nominal, perputaran kliring harian pada triwulan I 2022 mencapai nilai Rp545,97 miliar dan tumbuh 0,55% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp610,79 miliar dengan pertumbuhan 3,07% (yoy).



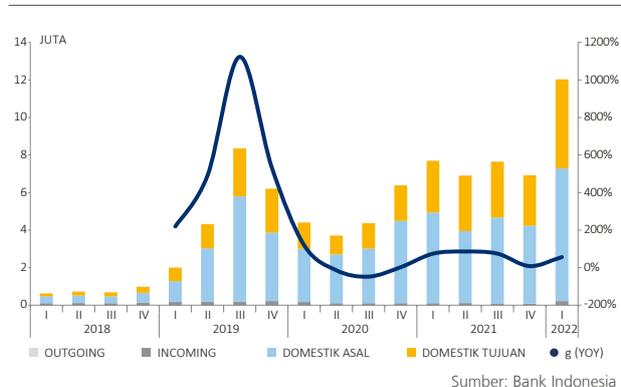
Grafik V.6 Volume Transaksi Kliring Harian di Wilayah Provinsi Banten
Sumber: Bank Indonesia

triwulan I 2022 tercatat sebesar Rp7,77 triliun atau tumbuh 63,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp4,26 triliun atau tumbuh 20,71% (yoy). Demikian pula dari segi volume, tercatat sejumlah 12,03 juta transaksi masuk dan keluar wilayah Provinsi Banten atau tumbuh 56,40% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya dengan 6,92 juta transaksi atau tumbuh 8,50% (yoy) Peningkatan ini selaras dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten yang tumbuh positif pada triwulan I 2022.

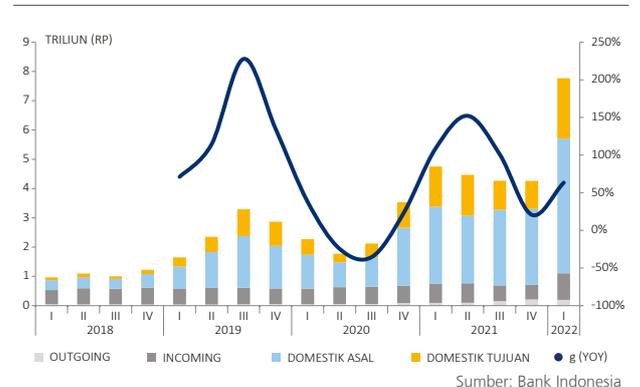
5.1.3 Perkembangan Transaksi Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU)

Transaksi non Tunai melalui KUPU atau jasa remitansi yang saat ini dilakukan oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Kategori Izin 3 pada triwulan I 2022 secara nominal maupun volume tumbuh meningkat. Nominal transaksi pada

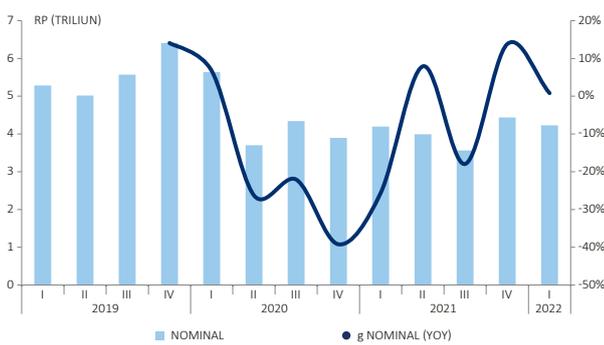
Saat ini terdapat 4 PJP Kategori Izin 3 yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, selain itu terdapat 1 calon PJP Kategori Izin 3 yang tengah berada dalam tahap perizinan. Dari 4 PJP Kategori Izin 3 tersebut, 1 PJP yakni PT. Kreigan Digital Wesel baru memperoleh izinnya pada bulan Februari 2022.



Grafik V.7 Nominal Transaksi KUPU di Provinsi Banten
Sumber: Bank Indonesia

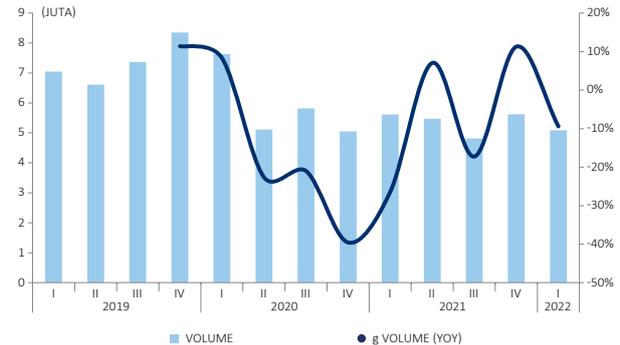


Grafik V.8 Volume Transaksi KUPU di Provinsi Banten
Sumber: Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.9 Nominal Transaksi Kartu Kredit di Wilayah Provinsi Banten



Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.10 Volume Transaksi Kartu Kredit di Wilayah Provinsi Banten

5.1.4 Perkembangan Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

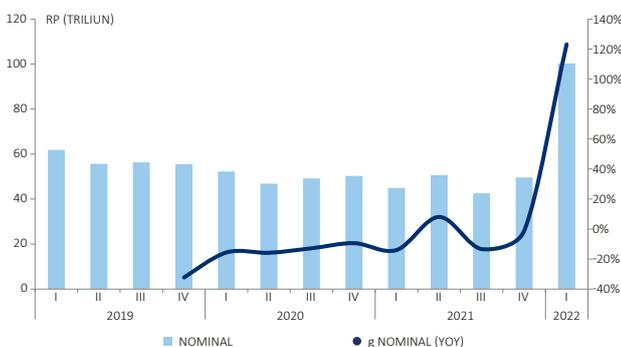
Transaksi keuangan non tunai di Provinsi Banten dengan menggunakan APMK pada triwulan I 2022 mengalami penurunan baik secara nominal maupun volume. Terkait dengan transaksi kartu kredit, secara nominal nilai transaksi mencapai nilai Rp4,23 triliun, tumbuh sebesar 0,80% (yoy). Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2021 yang mencatatkan nilai transaksi Rp4,44 triliun dengan pertumbuhan 13,82% (yoy). Sedangkan dari sisi volume, jumlah transaksi kartu kredit pada triwulan I 2022 sebanyak 5,09 juta transaksi, terkontraksi sebesar -9,44% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan nominal transaksi sebanyak 5,62 juta transaksi dengan pertumbuhan 11,28% (yoy).

Berbeda dengan kartu kredit, transaksi kartu debit mencatatkan peningkatan baik dari segi nominal maupun volume. Dari segi nominal, tercatat nominal

transaksi mencapai Rp100,28 triliun atau meningkat sebesar 123,08% (yoy). Pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatatkan kontraksi pertumbuhan yaitu -1,22% (yoy). Demikian pula dari segi volume, transaksi melalui kartu debit tercatat sejumlah 101,16 juta transaksi atau meningkat 97,36% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar -3,49% (yoy).

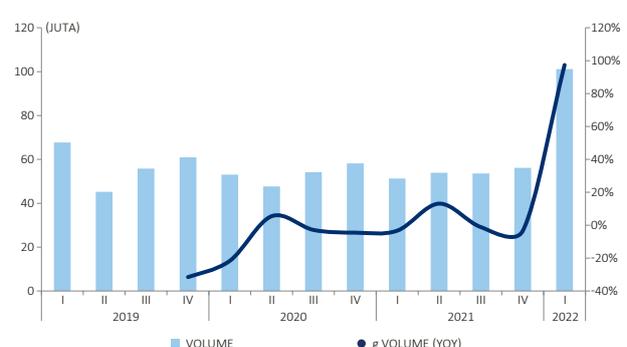
5.1.5 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik

Transaksi keuangan non tunai di Provinsi Banten dengan menggunakan Uang Elektronik (UE) pada triwulan I 2022 mengalami moderasi baik secara nominal maupun volume. Dari sisi nominal, transaksi menggunakan uang elektronik mencapai Rp5,88 triliun atau tumbuh sebesar 38,00% (yoy), melambat dibandingkan dengan transaksi pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp6,01



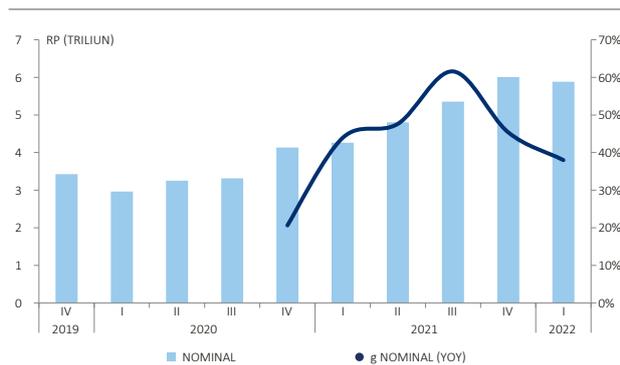
Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.11 Nominal Transaksi Kartu Debit di Wilayah Provinsi Banten



Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.12 Volume Transaksi Kartu Debit di Wilayah Provinsi Banten



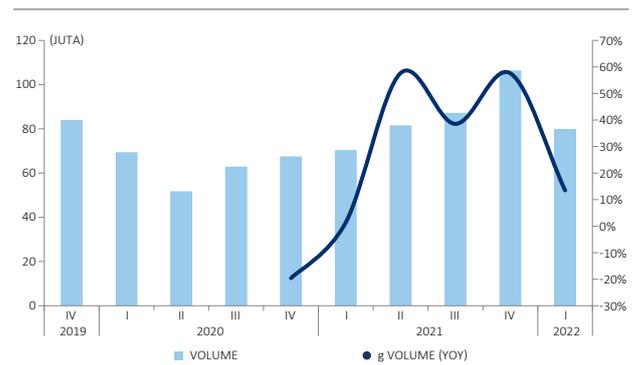
Grafik V.13 Nominal Transaksi Uang Elektronik di Wilayah Provinsi Banten

triliun atau tumbuh sebesar 45,40% (yoy). Demikian pula dari sisi volume, pada triwulan I 2022 transaksi UE tercatat sebanyak 79,93 juta transaksi atau tumbuh sebesar 13,49% (yoy). Volume transaksi tersebut menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebanyak 106,44 juta transaksi atau tumbuh sebesar 57,60% (yoy). Sedangkan dari jumlah UE beredar di masyarakat diketahui terdapat 13,40 juta UE di Provinsi Banten atau berkurang sebanyak 232,87% (yoy).

5.1.6 Elektronifikasi Bantuan Sosial

Berdasarkan sumber anggaran, program elektronifikasi Bantuan Sosial (Bansos) yang diimplementasikan di Provinsi Banten terdiri atas dua jenis yaitu bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bansos yang berasal dari APBN terdiri dari program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH), sementara yang berasal dari APBD yaitu Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu). Bansos Jamsosratu telah disalurkan pada triwulan I 2022.

Dalam rangka fasilitasi dan *monitoring* penyaluran bantuan sosial non tunai (BSNT) di Provinsi Banten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten melakukan koordinasi intensif terkait penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial se-Provinsi Banten, Kepolisian Daerah Banten, Bank Penyalur, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan

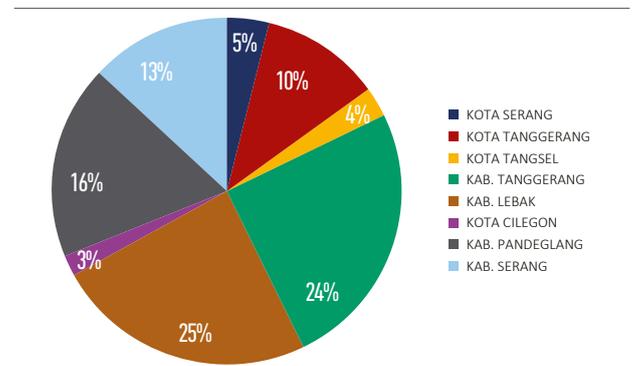


Grafik V.14 Volume Transaksi Uang Elektronik di Wilayah Provinsi Banten

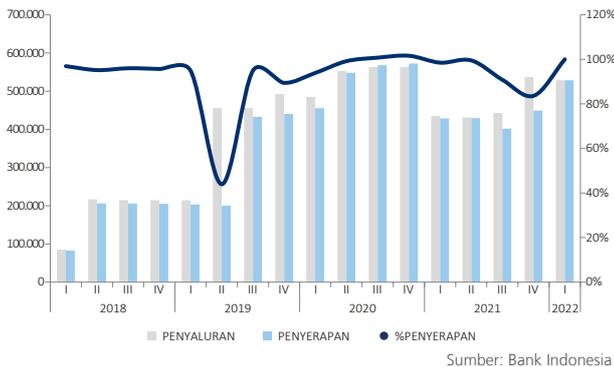
Koordinator Teknis. Selain itu juga, sebagai upaya untuk terus mencapai penyaluran BSNT sesuai dengan 6T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten senantiasa melakukan berbagai upaya yang mencakup koordinasi dan evaluasi dalam rangka penyaluran BSNT antara lain mencakup data dan informasi, *e-warong*, KKS, serta mekanisme penyaluran di tengah pandemi COVID-19. Selain itu dilakukan kegiatan edukasi serta sosialisasi terkait dengan BSNT yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyaluran khususnya penyerapan BSNT di Provinsi Banten. Kegiatan edukasi dilakukan kepada Dinas Sosial, Bank Penyalur, Koordinator Daerah, Koordinator Teknis, TKSK, Pendamping, serta KPM PKH dan Program Sembako.

a. Program Sembako

Secara spasial, pada akhir Maret 2022, penyaluran Program Sembako di Banten paling besar dilakukan di Kabupaten Lebak yakni kepada 132.287 KPM dengan



Grafik V.15 Program Sembako per Kabupaten/Kota

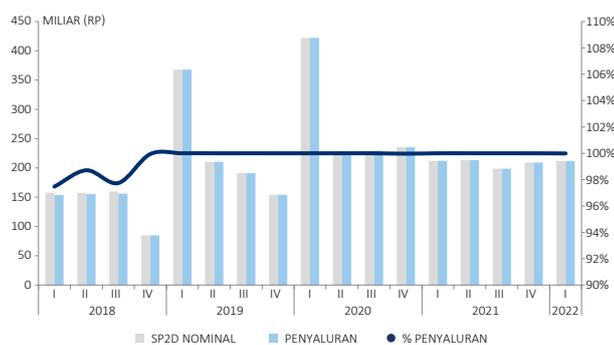


Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.16 Nominal Penyerapan Program Sembako Di Provinsi Banten

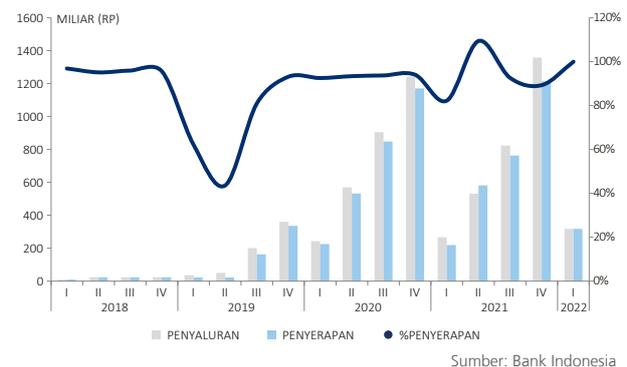
nominal sebesar Rp26,457 miliar atau sebesar 25,02% dari total keseluruhan, diikuti penyaluran di Kabupaten Tangerang yakni sebanyak 125.922 KPM dengan nominal bantuan Rp25,184 miliar atau 23,82%, serta penyaluran ketiga paling banyak dilakukan di Kabupaten Pandeglang yakni kepada 87.339 KPM dengan nominal bantuan 17,467 miliar atau sebesar 16,52%. Penyaluran Program Sembako pada periode Januari hingga Maret 2022 termasuk dalam tahap 1 yang dapat dicarikan sekaligus. Penyaluran dilakukan melalui PT. Pos Indonesia senilai Rp600.000,00 untuk setiap KPM. Dengan menggunakan Kartu Program Sembako, KPM bebas memilih tempat pembelian bahan pangan tanpa pemaketan bahan pangan yang dibeli.

Berdasarkan data per 31 Maret 2022, dari segi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jumlah KPM penerima Program Sembako pada Bulan Maret 2022 berjumlah 528.627 KPM dengan persentase penyerapan 99,02%. Sedangkan dari segi nominal, nominal penyaluran mencapai Rp317,18 miliar menurun



Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.18 Nominal Penyaluran PKH Di Provinsi Banten



Sumber: Bank Indonesia

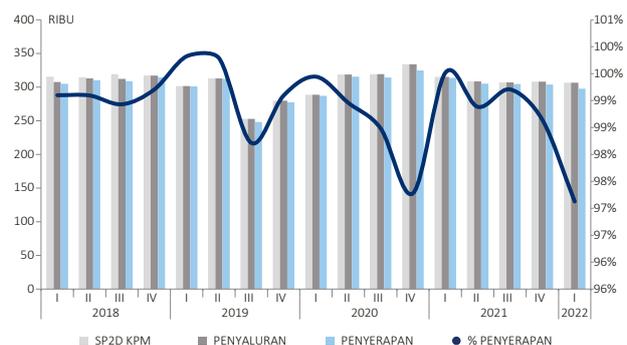
Grafik V.17 Penyerapan KPM Program Sembako di Provinsi Banten

dibandingkan penyaluran pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,36 triliun. Sementara itu apabila dilihat secara besaran penyerapan, pada triwulan I 2022 berdasarkan nominal berhasil terserap 100%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 89,34%.

b. Program Keluarga Harapan (PKH)

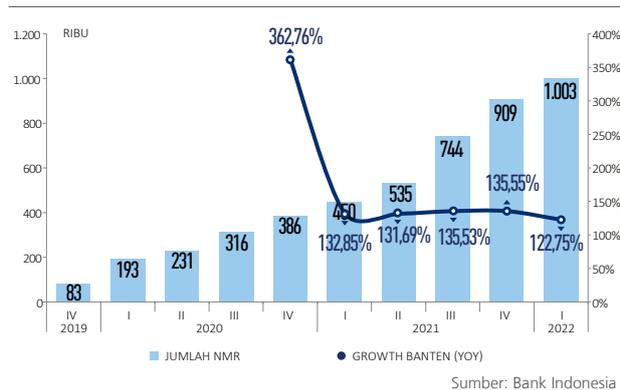
Jumlah dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan di seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Banten pada tahap I 2022 tercatat sebesar Rp211,74 miliar. Berdasarkan jumlah KPM, terjadi penurunan sebesar -0,53%, yaitu dari 308.144 KPM pada tahap IV 2021 menjadi 306.513 KPM pada tahap I 2022.

Dari sisi penyerapan, berdasarkan data per 31 Maret 2022, penyaluran PKH telah terserap oleh 297.686 KPM dari total penyaluran untuk 306.492 KPM atau sebesar 97,13%. Angka penyerapan PKH di Provinsi Banten masih belum mencapai 100% antara lain dikarenakan KKS belum tersalurkan, KKS Hilang, atau Lupa PIN. Sementara beberapa KPM menyimpan



Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.19 Penyerapan KPM PKH Di Provinsi Banten



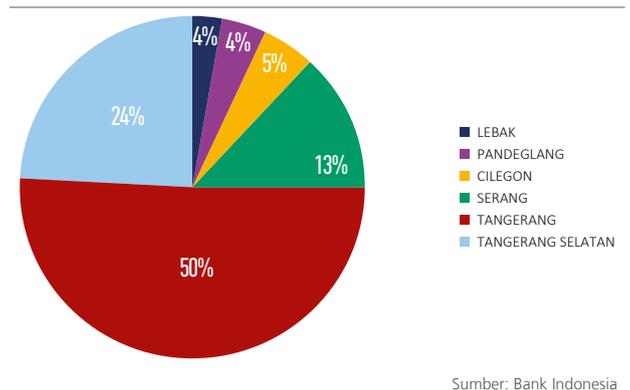
Grafik V.20 Perkembangan NMR

sebagian bantuan dalam KKS. Secara spasial KPM, penyaluran PKH paling besar dilakukan di Kabupaten Tangerang yakni 82.895 atau 26,90% dari total keseluruhan, diikuti dengan Kabupaten Pandeglang sebanyak 71.577 KPM atau 23,23% , dan Kabupaten Lebak sebanyak 55.862 KPM atau 18,13%.

5.1.7 Perkembangan QRIS

Pada triwulan I 2022, *National Merchant Repository* (NMR) mencatat terdapat 1.002.608 *merchant* QRIS di Provinsi Banten atau tumbuh sebesar 122,75% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 135,55% (yoy). Kondisi serupa juga terjadi di tingkat nasional, di mana pertumbuhan triwulan I 2022 tercatat sebesar 147,46% (yoy) sebanyak 16.395.741 NMR atau lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 155,66% (yoy).

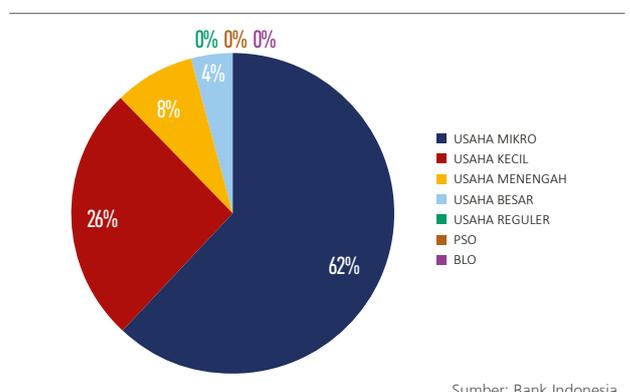
Kendala dalam peningkatan jumlah *merchant* di Provinsi Banten antara lain masih disebabkan oleh pandemi COVID-19, sehingga mengurangi laju Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dalam mengakuisisi *merchant* untuk menggunakan QRIS. Selain untuk transaksi perdagangan, QRIS di Provinsi Banten juga telah dimanfaatkan sebagai salah satu kanal pembayaran transaksi pemerintah khususnya pembayaran pajak dan retribusi sebagian Pemda yaitu 8 dari 9 Pemda yang ada atau mencapai 88,88%. Perkembangan ini semakin menunjukkan adanya komitmen Pemda setempat untuk dapat menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara menyeluruh. Pembayaran pajak



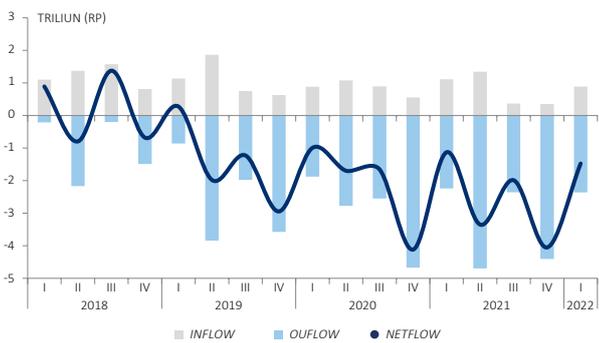
Grafik V.21 Sebaran Merchant

maupun retribusi daerah menggunakan QRIS juga dapat menjadi salah satu upaya untuk mendorong pembayaran yang lebih higienis.

Selain itu, akseptasi QRIS di Provinsi Banten juga terus meluas diantaranya untuk keperluan pembayaran ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf), unit usaha maupun administrasi pondok pesantren, fasilitas kesehatan, sampai dengan moda transportasi. Sebagai contoh adalah moda transportasi BRT dan Angkot Si Benteng yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tangerang bersama dengan BUMD PT. Tangerang Nusantara Global serta Damri dan Kereta Lokal Merak-Rangkas. BRT dan si Benteng masih menggunakan QRIS statis, namun Damri dan Kereta Lokal Merak-Rangkas telah memanfaatkan QRIS dinamis. Kemudian dari kategori wisata khas Provinsi Banten, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung menjadi salah satu contoh destinasi wisata yang telah mengimplementasikan QRIS pada sarana pendukung dan akomodasi penginapan yakni Hotel Tanjung Lesung Beach Hotel dan *Kalicaa Village*.



Grafik V.22 Perkembangan NMR TW IV 2021



Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.23 Perkembangan Perputaran Uang di Provinsi Banten

Berdasarkan jumlah NMR, Provinsi Banten diketahui menempati peringkat ke-5 secara nasional, setelah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Apabila dilihat lebih rinci, kategori usaha mikro di Provinsi Banten menjadi pelaku usaha paling mendominasi penggunaan QRIS yakni mencapai 62,25% atau sebanyak 624.082 NMR, disusul oleh jenis pelaku usaha kecil mencapai 25,87% atau sebanyak 259.355 NMR serta pelaku usaha menengah mencapai 7,72% atau sebanyak 77.401 NMR.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten terus mengakselerasi akseptasi digital melalui pengembangan ekosistem digital pasar tradisional dalam Program Pasar SIAP QRIS (Sehat, Inovatif, Aman Pakai QRIS). Program tersebut merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Perdagangan melalui program digitalisasi pasar rakyat dan Bank Indonesia melalui program SIAP QRIS. Tidak hanya digunakan dalam transaksi jual-beli, QRIS dalam ekosistem pasar juga mendukung pembangunan infrastruktur digital seperti retribusi, logistik, distribusi, dan pembiayaan pedagang. Dari 9 pasar rakyat di Provinsi Banten yang berada di bawah *monitoring* Kementerian Perdagangan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten bersama dengan Pemda dan perbankan di wilayah Provinsi Banten telah melakukan *launching* Pasar SIAP QRIS di 4 pasar yaitu Pasar Rangkasbitung – Kabupaten Lebak, Pasar Pandeglang – Kabupaten Pandeglang, Pasar Baros – Kabupaten Serang, dan Pasar Anyar – Kota Tangerang. Perluasan akseptasi QRIS di pasar tradisional akan terus berlanjut ke pasar lainnya.



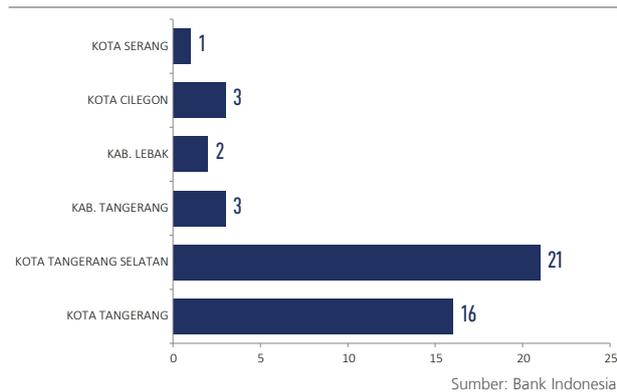
Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.24 Total Temuan Uang yang Diragukan Keasliannya di Provinsi Banten

5.2 PERKEMBANGAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pada triwulan I 2022, total perputaran uang melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp1,46 triliun. *Net outflow* mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi triwulan IV 2021 yang tercatat sebesar Rp4,02 triliun. Kondisi *net outflow* tersebut merupakan implikasi dari lebih rendahnya total nominal *inflow* yaitu senilai Rp883,10 miliar, dibandingkan *outflow* yang tercatat sebesar Rp2,35 triliun. Dengan demikian, pertumbuhan nominal *inflow* mengalami kontraksi -20,10% (yoy) dan pertumbuhan nominal *outflow* mengalami kenaikan sebesar 5,51% (yoy).

Posisi *net outflow* yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya didorong oleh penurunan kebutuhan uang kartal seiring berakhirnya Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru. Namun demikian, permintaan uang karta masih ditopang oleh bank kontributor terbesar *outflow* di Provinsi Banten yang secara konsisten melakukan penarikan sejumlah dana setiap bualannya untuk kebutuhan bantuan sosial kepada masyarakat yang kembali disalurkan pada tahap 1 2022. Bantuan sosial tersebut di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Bantuan Subsidi Upah/ Gaji (BSU), dan berbagai bantuan yang mendukung kegiatan belajar mengajar, serta dalam rangka memenuhi pasokan distribusi uang untuk seluruh mesin ATM di Provinsi Banten.



Grafik V.25 Sebaran KUPVA di Provinsi Banten

Sementara itu, jumlah uang yang diragukan keasliannya yang ditemukan di Provinsi Banten pada triwulan I 2022 sebanyak 144 lembar. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan temuan uang yang diragukan keasliannya pada triwulan IV 2021, yaitu sebanyak 522 lembar. Penurunan signifikan yang terjadi pada triwulan I 2022 salah satunya juga disebabkan rendahnya transaksi dibandingkan periode sebelumnya dan untuk saat ini telah dibuka kembalinya layanan klarifikasi uang yang diragukan keasliannya atau uang palsu (UPAL) oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten secara normal yang disampaikan oleh perbankan dan PJPUR di Provinsi Banten untuk diklarifikasi. Diketahui juga bahwa Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten menerima pengaduan temuan uang yang diragukan dari perbankan yang melaporkan melalui BI-CAC (Bank Indonesia-Counterfeit Analysis Center).

Dalam rangka terus menekan peredaran uang yang diragukan keasliannya maka Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten konsisten untuk melakukan berbagai langkah strategis, antara lain edukasi dan sosialisasi CBP (Cinta, Bangga, dan Paham) Rupiah, kas keliling di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil). *Stakeholder* dan komunitas yang disasar di antaranya pimpinan perbankan cabang kabupaten/kota, para pelaku usaha baik mikro, kecil, menengah, dan besar, pondok pesantren, aparat penegak hukum (apgakum), mahasiswa khususnya melalui Komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) Provinsi Banten, dan pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Berbagai upaya edukasi dan sosialisasi Rupiah semakin



Grafik V.26 Rekapitulasi Transaksi KUPVA BB di Provinsi Banten

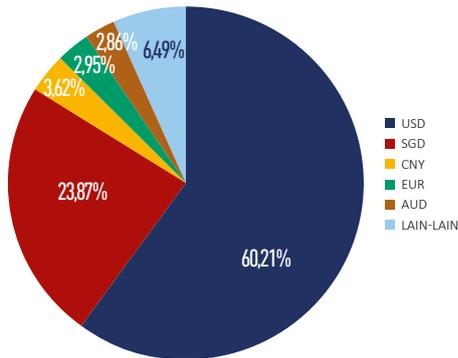
gencar melalui media edukasi digital berbentuk aplikasi *game augmented reality*.

5.3 PERKEMBANGAN TRANSAKSI PENUKARAN VALUTA ASING

Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) berizin diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pasar keuangan terutama pasar valuta asing domestik yang sehat. Pasar keuangan domestik yang sehat diperlukan guna turut menciptakan kestabilan nilai rupiah dan mendorong kelangsungan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan dan pengawasan KUPVA BB untuk mencegah dimanfaatkannya KUPVA BB sebagai sarana tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), atau kejahatan lainnya.

Berdasarkan data jumlah penyelenggara KUPVA BB di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, sampai dengan triwulan I 2022, terdapat 2 penyelenggara KUPVA BB baru yang mendapatkan izin usaha di Provinsi Banten. Sehingga jumlah penyelenggara KUPVA BB berizin tercatat sebanyak 46 perusahaan tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang tercatat sebanyak 44 penyelenggara.

Berdasarkan lokasi usaha penyelenggara KUPVA BB, sebanyak 86,96% kantor Pusat KUPVA BB berlokasi



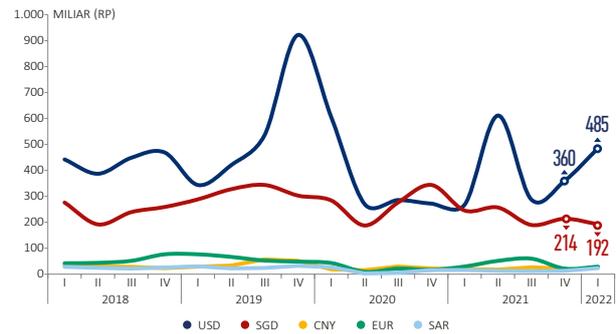
Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.27 Pangsa Mata Uang Yang Ditransaksikan

wilayah Tangerang Raya, yakni Tangerang Selatan sebanyak 21 penyelenggara, Kota Tangerang sebanyak 16 penyelenggara, dan Kabupaten Tangerang sebanyak 3 penyelenggara. Sementara 13,04% berada di wilayah lainnya yaitu Kota Cilegon sebanyak 3 penyelenggara, Kabupaten Lebak 2 penyelenggara dan di Kota Serang 1 penyelenggara. Dominasi jumlah KUPVA BB di wilayah Tangerang Raya, salah satunya dipicu oleh adanya Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang menjadi pusat aktivitas masyarakat untuk melakukan perjalanan dari dan menuju luar negeri. Aktivitas ini erat kaitannya dengan frekuensi dan intensitas kegiatan jual beli valuta asing yang dilayani oleh KUPVA BB.

Perkembangan usaha KUPVA BB dapat digambarkan dari aktivitas transaksi jual beli valuta asing yang berjalan selama kegiatan operasional penyelenggaraan KUPVA BB di wilayah Provinsi Banten. Pada triwulan I 2022, jumlah transaksi jual-beli valuta asing senilai Rp806,33 miliar atau tumbuh sebesar 27,39% (yoy). Sedangkan dilihat dari proporsinya, pada triwulan I 2022 transaksi pembelian valuta asing di Provinsi Banten lebih mendominasi dibandingkan dengan transaksi penjualannya.

Berdasarkan mata uang yang ditransaksikan selama triwulan IV 2021, mayoritas transaksi adalah dalam Dolar Amerika Serikat (USD) senilai Rp485,47 miliar (60,21%), diikuti oleh Dolar Singapura (SGD) senilai Rp192,47 miliar (23,87%), Euro senilai Rp29,20



Sumber: Bank Indonesia

Grafik V.28 Pangsa Mata Uang Yang Dominan Ditransaksikan

miliar (3,62%), Malaysia (MYR) senilai Rp23,82 miliar (2,95%), diikuti oleh Riyal Arab Saudi (SAR) senilai Rp23,04 miliar (2,86%), transaksi mata uang lainnya sebesar 6,49%. Transaksi untuk mata uang USD diketahui mencatatkan kenaikan pertumbuhan sebesar 81,21% (yoy) dan mendominasi transaksi valuta asing di Provinsi Banten. Transaksi mata uang SGD dan EUR tercatat masih melambat sebesar -21,58% (yoy) dan -1,86% (yoy).

Dengan kondisi pandemi yang semakin membaik, sampai dengan triwulan I 2022 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten melaksanakan target pemeriksaan umum kepada 1 penyelenggara KUPVA BB dari target pemeriksaan sebanyak 6 penyelenggara KUPVA BB dan 1 PTD BB di tahun 2022. Pemeriksaan berpedoman pada prinsip Pemeriksaan Jarak Jauh (PJJ), sehingga pemeriksaan dilakukan baik daring (*off-site*) maupun luring (*on-site*) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian, sesuai kewenangan KPwDN untuk memproses perizinan KUPVA BB dan PJP BB, pada triwulan I 2022 KPwBI Provinsi Banten terus konsisten menggalakkan pentingnya kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan Bank Indonesia khususnya terkait penerapan APU-PPT dan kepatuhan terhadap ketentuan persyaratan pendidikan minimal D3 bagi pengurus KUPVA BB. Oleh karena itu, KPwBI Provinsi Banten senantiasa melakukan komunikasi intensif dan *monitoring* kepada seluruh penyelenggara agar mematuhi ketentuan terkait KUPVA BB.



Halaman ini sengaja dikosongkan

Prioritas Akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah





Pulau Jawa telah sejak lama menjadi pusat akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yaitu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran dari tunai menjadi non tunai dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut didukung juga oleh infrastruktur dan digitalisasi di Pulau Jawa yang relatif lebih maju. Selain itu, faktor lainnya yang turut mendorong pesatnya pertumbuhan ETPD di Pulau Jawa adalah pengguna sistem layanan elektronifikasi transaksi keuangan yang terdiri dari ASN dan masyarakat, serta penyedia layanan transaksi keuangan yang terdiri dari antara lain bank pengelola RKUD, Mitra Bank, Agen Bank, *Payment Point*, dan *Financial Technology (Fintech)*.

ETPD di Provinsi Banten juga terus dikembangkan melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten terus mendukung pengembangan TP2DD se-Provinsi Banten. Provinsi Banten menjadi provinsi pertama di Pulau Jawa yang membentuk TP2DD. Selain itu, pembentukan TP2DD di wilayah Provinsi Banten juga diikuti dengan pembentukan 8 TP2DD di tingkat Kabupaten/Kota, hanya dalam waktu 4 bulan sejak Keputusan Presiden No.3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah diterbitkan.

Selanjutnya sebagai langkah untuk mewujudkan tujuan dari pembentukan TP2DD, telah dilakukan fasilitasi kepada 9 Pemda dalam penyusunan Peta Jalan Jangka Menengah (2021-2025) dan *Quick Wins* ETPD 2021-2022 sebagai *guidance* dan untuk menavigasi pengembangan ETPD di masing-masing Pemda. Peta Jalan tersebut diharapkan dapat semakin mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan melalui aksi-aksi nyata.

Tabel B.1 Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah se-Provinsi Banten

No	Pemerintah Daerah	Indeks ETPD	
		Skor	Tahap
1	Provinsi Banten	76,8%	Maju
2	Kota Cilegon	90,9%	Digital
3	Kota Serang	93,0%	Digital
4	Kota Tangerang	93,0%	Digital
5	Kota Tangerang Selatan	90,9%	Digital
6	Kabupaten Lebak	92,1%	Digital
7	Kabupaten Pandeglang	88,4%	Digital
8	Kabupaten Serang	86,7%	Digital
9	Kabupaten Tangerang	92,3%	Digital

Kemajuan elektronifikasi di seluruh wilayah Provinsi Banten akan tercermin pada Indeks ETPD. Berdasarkan asesmen Indeks ETPD Semester II 2021, terdapat 8 Pemda yang telah berada dalam kategori Digital serta 1 Pemda yang berada dalam kategori Maju di Provinsi Banten. Asesmen tersebut memperhatikan 3 aspek yang menjadi penentu tingkat digitalisasi suatu daerah, yaitu aspek implementasi, realisasi, dan lingkungan strategis. Mayoritas Pemda mencatatkan nilai yang tinggi untuk aspek implementasi, termasuk di dalamnya adalah komponen elektronifikasi pada pajak, retribusi, belanja langsung, belanja tidak langsung, kanal pembayaran non digital, dan kanal pembayaran digital.

Ke depan, digitalisasi di seluruh wilayah Provinsi Banten dapat ditingkatkan melalui elektronifikasi realisasi PAD. Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk mendorong elektronifikasi realisasi PAD di antaranya adalah pengembangan infrastruktur pembayaran digital seperti QRIS dinamis untuk pembayaran retribusi dan perluasan edukasi dan literasi kepada masyarakat mengenai pembayaran non tunai.

Selain itu, sebagai langkah nyata dalam mendorong elektronifikasi di daerah, Pemerintah Kabupaten Lebak dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten mengimplementasikan program Pasar SIAP (Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai) QRIS yang merupakan sinergi Bank Indonesia dengan Kementerian Perdagangan. Pasar SIAP QRIS merupakan wujud perluasan

akseptasi dan fasilitasi penggunaan QRIS hingga di pasar dan pusat perbelanjaan. Di wilayah Provinsi Banten program Pasar SIAP QRIS dikemas dalam kegiatan Pasar Jawara bertujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur digital di ekosistem pasar, antara lain transaksi jual-beli, retribusi, logistik dan distribusi, serta pembiayaan pedagang.

Ibu Hj. Iti Octavia Jayabaya, S.E., M.M. selaku Bupati Lebak mengapresiasi upaya bersama dalam membangun ekosistem digital di Pasar Rangkasbitung melalui kegiatan Pasar Jawara. Di tengah pandemi yang menyebabkan penurunan omzet pedagang, QRIS sebagai langkah digitalisasi menjadi solusi untuk mencegah kerumunan massa dan mendukung protokol kesehatan. Beliau juga menyebutkan bahwa berdasarkan survei InMobi, *e-commerce* pada sektor perdagangan mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam transaksi selama pandemi. Namun hal tersebut tidak terjadi di pasar tradisional yang justru merugi.

Karena itu, Ibu Hj. Iti Octavia Jayabaya, S.E., M.M. mendukung sepenuhnya implementasi QRIS untuk mempermudah transaksi serta meningkatkan pendapatan pedagang di Pasar Rangkasbitung. Beliau berharap kesuksesan penggunaan QRIS di Pasar Rangkasbitung dapat direplikasi ke pasar tradisional lainnya.

Selanjutnya, dalam mendorong akseptasi QRIS di Pasar Rangkasbitung, literasi digital menjadi syarat utama. Untuk mewujudkan literasi digital tersebut, diperlukan sinergi seluruh pihak terkait. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lebak dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten berkomitmen untuk meningkatkan literasi digital pedagang pasar. Hal tersebut diwujudkan melalui pendampingan berkala kepada pedagang pasar termasuk untuk mengatasi kendala teknis yang mungkin muncul. Peran perbankan juga diperlukan dalam meningkatkan literasi digital dimaksud. Melalui berbagai upaya pendampingan, diharapkan pedagang akan lebih mudah untuk mengelola keuangan usaha dan pada akhirnya memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan demi meningkatkan usahanya.



Gambar 1 Peresmian Pasar SIAP QRIS di Pasar Rangkasbitung Lebak



Gambar 2 Peresmian Pojok Digital di Pasar Rangkasbitung Lebak

Upaya lain dalam sinergi digitalisasi adalah pembentukan Pojok Digital sebagai sarana pemberian informasi dan edukasi terkait harga komoditas dan kebijakan lainnya termasuk dalam rangka mendukung pengendalian inflasi. Dengan demikian, gejolak harga dapat ditekan untuk mewujudkan inflasi yang rendah dan stabil. Pojok Digital bertujuan untuk mengimplementasikan strategi 4K Pasar yang meliputi Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.



BAB VI

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

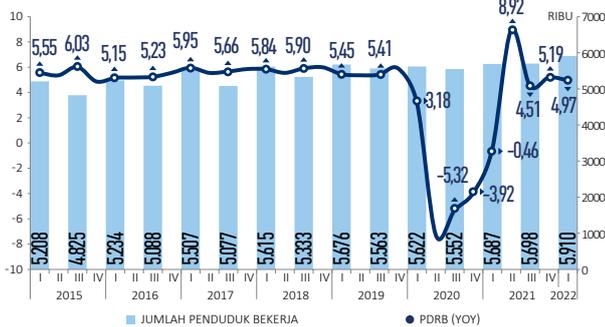


Sinyal pemulihan ekonomi Banten semakin menguat yang ditandai dengan membaiknya kondisi tenaga kerja di Provinsi Banten. Hal ini ditunjukkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten pada periode Februari 2022 yang membaik menjadi sebesar 8,53%. Hal ini salah satunya didorong oleh meningkatnya aktivitas korporasi walau belum seperti kondisi sebelum pandemi.

Namun demikian, kesejahteraan hidup masyarakat di Provinsi Banten tercatat masih belum pulih, hal ini dicerminkan oleh meningkatnya angka kemiskinan baik di Perkotaan maupun di Pedesaan selama pandemi Covid-19. Garis kemiskinan pada September 2021 sebesar 852,28 dengan Persentase Penduduk Miskin sebesar 6,50%.

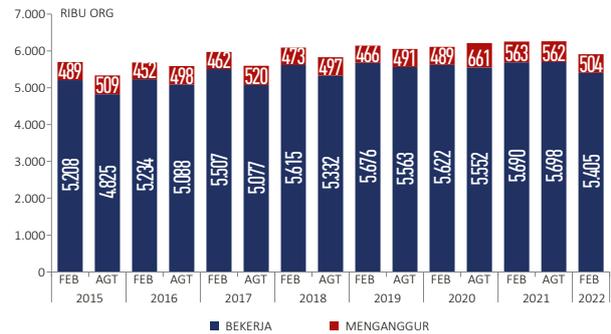
Kenaikan angka kemiskinan tersebut pada akhirnya mendorong Gini ratio menjadi sebesar 0,363. Kesenjangan kualitas hidup masyarakat wilayah Banten Utara dengan Banten Selatan masih menjadi permasalahan struktural Provinsi Banten. Hal ini ditunjukkan oleh perbedaan yang signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kedua wilayah tersebut. Oleh karena itu upaya bersama antar pemangku kebijakan guna mengatasi masalah struktural tersebut menjadi hal ini membutuhkan solusi kebijakan struktural untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.





Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik VI.1 Pertumbuhan PDRB dan Jumlah Penduduk Bekerja di Provinsi Banten



Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik VI.2 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Banten

6.1 KETENAGAKERJAAN

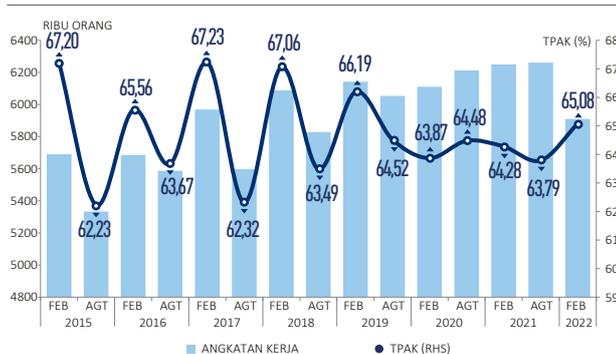
Kondisi tenaga kerja di Provinsi Banten pada tahun 2022 kembali mengalami perbaikan seiring dengan pemulihan ekonomi Banten yang semakin menguat. Pemulihan kinerja korporasi menjadi pendorong peningkatan penduduk bekerja walaupun secara keseluruhan status pekerjaan utama masih didominasi oleh wirusahawan.

Trend pemulihan ekonomi Banten terus menunjukkan perbaikan, pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan I 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,97% (yoy). Pemulihan ekonomi Banten juga ditandai dengan membaiknya Tingkat Pengangguran Terbuka, walaupun jumlah penduduk bekerja masih belum meningkat seperti sebelum pandemi. BPS Provinsi Banten mencatat jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 5,91 juta orang atau turun sebesar 5,45% secara *year on year*.

Penurunan jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu

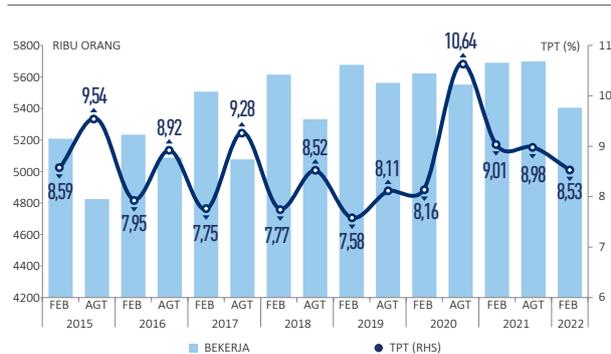
tercatat lebih rendah jika dibandingkan penurunan pengangguran. Pengangguran tercatat turun sejumlah 10,4% dibandingkan Februari 2021 yang mencapai 562 ribu orang. Hal ini mendorong Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi di Provinsi Banten yakni 8,53% pada Februari 2022. Meskipun demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja naik sebesar 0,80% dibandingkan periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya, khususnya periode selama pandemi Covid-19, TPT menunjukkan penurunan sebesar 0,48%. Pengangguran yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 pada Februari 2021 sebesar 104,31 ribu orang dan pada Februari 2022 menurun menjadi 51,38 ribu orang sehingga secara total Penduduk Usia Kerja (PUK) yang terdampak Covid-19 turun sebesar 53,09% dibandingkan Februari 2021.

Apabila dibandingkan dengan TPT Nasional dan kawasan regional lainnya, TPT Provinsi Banten tetap masih lebih tinggi. Pada periode Februari 2022, angka TPT Provinsi Banten masih lebih tinggi dibandingkan



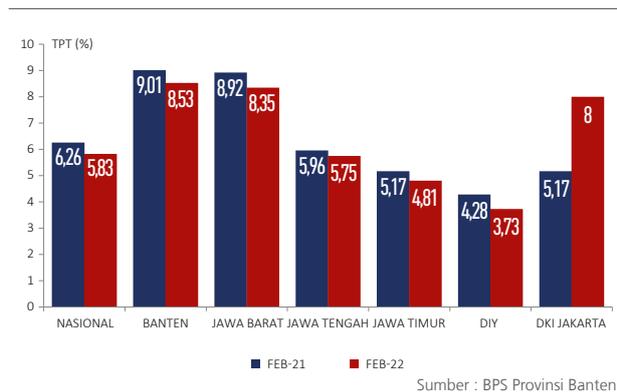
Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik VI.3 Angkatan Kerja dan TPAK Provinsi Banten



Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

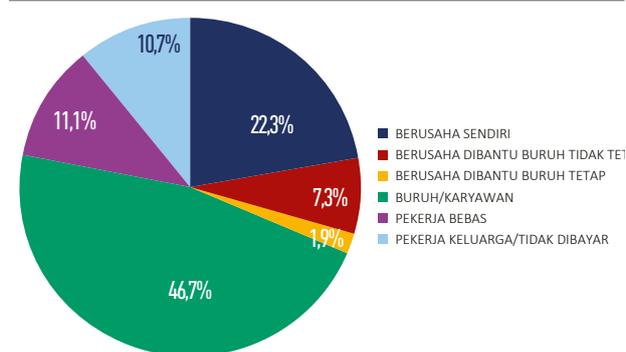
Grafik VI.4 Penduduk Bekerja dan TPT Provinsi Banten



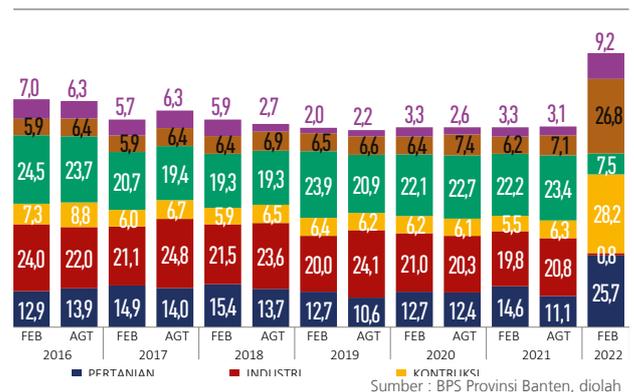
Grafik VI.5 TPT Provinsi di Jawa dan Nasional

dengan TPT Nasional yang tercatat sebesar 5,83%. Oleh karena itu, guna melanjutkan *trend* penurunan TPT maka dibutuhkan upaya bersama untuk memastikan ketersediaan lapangan kerja dan investasi di Provinsi Banten. Disisi lain, perlu juga adanya penyesuaian (*matching*) antara kebutuhan Industri dengan kurikulum pendidikan atau pelatihan SDM sehingga mendorong tingkat penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor usaha, terutama di sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, *real estate* serta transportasi dan pergudangan.

Selanjutnya, dari sisi penyerapan tenaga kerja berdasarkan struktur lapangan pekerjaan utama di Provinsi Banten, lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja pada Februari 2022 adalah sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Pertanian dengan masing-masing pangsa sebesar 20,48%, 19,43%, dan 18,66%. Tingginya penyerapan pada sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan sejalan dengan dominasi sektor tersebut pada PDRB Provinsi Banten. Pada I 2022 yaitu



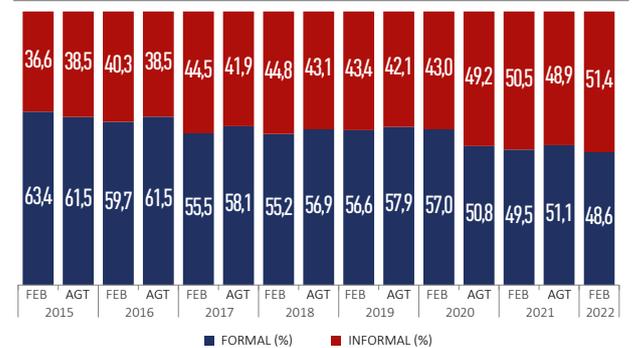
Grafik VI.7 Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan



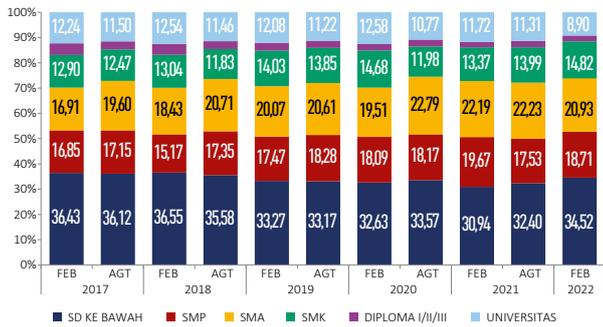
Grafik VI.6 Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja per Provinsi Banten

Industri Pengolahan dengan pangsa sebesar 31,42%, diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 12,72%. Sektor Pertanian tercatat sebagai sektor yang mengalami peningkatan tertinggi pada kategori penduduk bekerja. Pada tahun 2021, jumlah penduduk bekerja di sektor ini sebesar 829,5 ribu orang sedangkan pada tahun 2022 tercatat sebesar 1008,56 ribu orang atau naik 4,07% secara *year on year*.

Sementara itu, pangsa lapangan usaha Pertanian terhadap PDRB Provinsi Banten berada di posisi ke-5 yaitu dengan pangsa 6,22%, setelah Konstruksi dan *Real Estate* dengan kontribusi sebesar 12,21% dan 8,42%. Meskipun kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Banten relatif kecil, pangsa penyerapan tenaga kerjanya termasuk yang tertinggi ketiga setelah sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor Pertanian masih menjadi sektor yang potensial untuk menyerap tenaga kerja, didukung oleh ketersediaan lahan pertanian yang tersedia di Banten. Dibandingkan dengan periode yang



Grafik VI.8 Perkembangan Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan



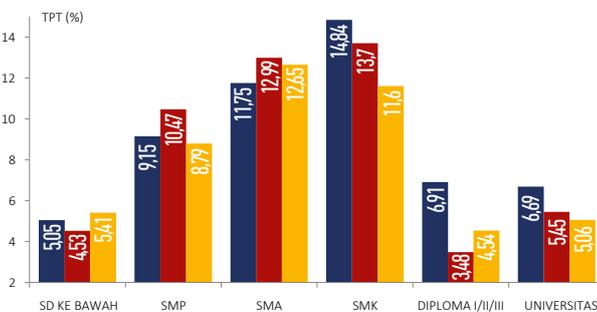
Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik VI.9 Pangsa Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi

sama pada tahun 2021, porsi tenaga kerja di Sektor Pertanian meningkat menjadi 25,7% atau tertinggi ketiga setelah sektor Konstruksi dan Transportasi.

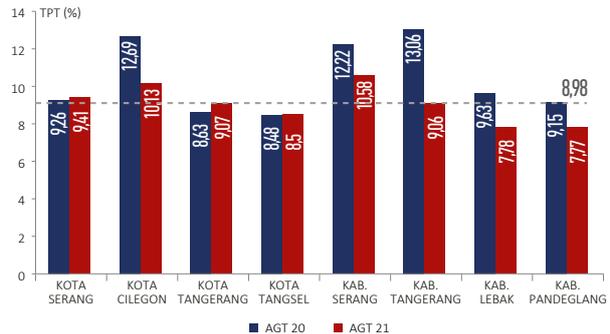
Berdasarkan status pekerjaan, pada Februari 2022, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 46,7%, diikuti oleh status berusaha sendiri atau sebanyak 22,3% dan paling sedikit merupakan penduduk bekerja dengan status berusaha dibantu buruh atau 21,9%.

Secara spasial, pengangguran tertinggi pada periode Agustus 2021 ditempati oleh Kabupaten Serang, yaitu dengan TPT sebesar 10,58%, diikuti oleh Kota Cilegon dan Kota Serang dengan TPT masing-masing sebesar 10,13% dan 9,41%. Sementara itu untuk kabupaten yang menjadi sentra industri seperti Kabupaten Tangerang dan Cilegon menunjukkan penurunan tingkat pengangguran yang signifikan dibandingkan periode Agustus 2020.



Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik VI.11 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan Tertinggi

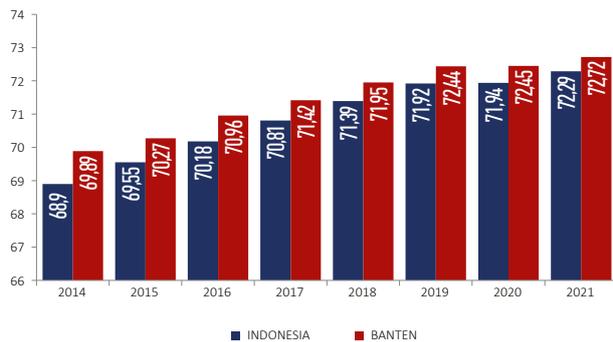


Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik VI.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota posisi Agustus 2021

Selanjutnya, berdasarkan latar belakang pendidikan, TPT tertinggi masih berasal dari lulusan SMA dengan TPT sebesar 12,65% diikuti lulusan SMK sebesar 11,6%. Pola ini tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya TPT pada jenjang pendidikan tersebut mengindikasikan penyerapan tenaga kerja SMK dan SMA belum optimal, sehingga dapat menyebabkan terjadinya *mismatch* atau kesenjangan antara kualifikasi yang dipersyaratkan oleh industri dengan kompetensi para pencari kerja, terlebih untuk industri pengolahan padat modal, yang relatif memerlukan keahlian tenaga kerja tertentu. Sementara itu TPT terendah berasal dari lulusan Diploma sebesar 4,54% diikuti lulusan Universitas sebesar 5,06%.

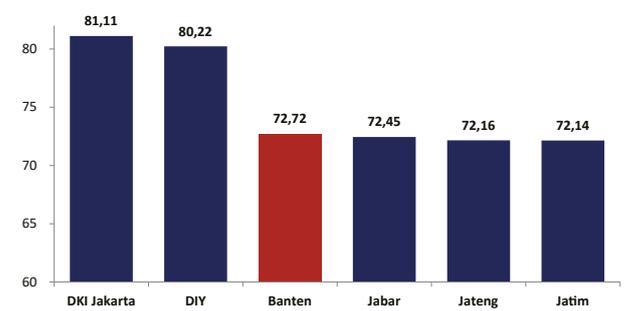
Selain itu, tingginya angka pengangguran di Provinsi Banten juga disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk migran yang datang ke Provinsi Banten untuk mencari pekerjaan. Lokasi geografis Provinsi Banten yang strategis yaitu sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera, didukung oleh banyaknya Industri skala besar dan menengah serta relatif tingginya Upah Minimum Regional (UMR) dan adanya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) menjadi daya tarik utama bagi pencari kerja dari daerah lain. Meskipun demikian, tingginya minat penduduk migran untuk datang ke Provinsi Banten tidak selalu diiringi dengan tingkat keterampilan dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan lowongan kerja yang ada sehingga pada akhirnya menambah jumlah pengangguran di Provinsi Banten.



Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik VI.12 IPM Banten dan Nasional

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Banten, Pemerintah perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang bersifat padat karya, baik industri pengolahan maupun industri lainnya, tanpa mengabaikan industri padat modal. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendorong perkembangan dan masuknya investasi dengan memberikan berbagai insentif ataupun kemudahan perizinan maupun fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, upaya peningkatan kualitas dan penyesuaian kualifikasi pendidikan menjadi hal yang harus terus menjadi fokus perhatian pemerintah, terutama pada sekolah kejuruan. Program *Link and Match* yang dilakukan Kementerian Perindustrian, yaitu penandatanganan MoU kerjasama antara SMK dengan dunia usaha dan industri di Provinsi Banten untuk memberikan keterampilan bagi lulusan SMK sesuai kebutuhan industri perlu didorong dan diawasi sehingga mampu mencetak lulusan-lulusan yang siap kerja. Terkait dengan pengembangan SDM di Banten, pemerintah daerah tengah menggencarkan pemanfaatan skema insentif *Super Tax Deduction* (STD). Fasilitasi oleh pemerintah daerah melalui pembentukan klinik STD sehingga mempermudah bagi industri yang akan memanfaatkan insentif dimaksud dan selaras dengan program kampus merdeka yang telah diinisiasi sebelumnya. Selain itu, guna meningkatkan eksistensi peran sektor pertanian agar produktivitas dan pendapatan sektor pertanian dapat bersaing dengan sektor-sektor lainnya, maka dibutuhkan suatu inovasi di bidang pertanian seperti program tani milenial yang memberikan fasilitas kepada petani muda terpilih berupa pemberian pinjaman lahan untuk bertani.



Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

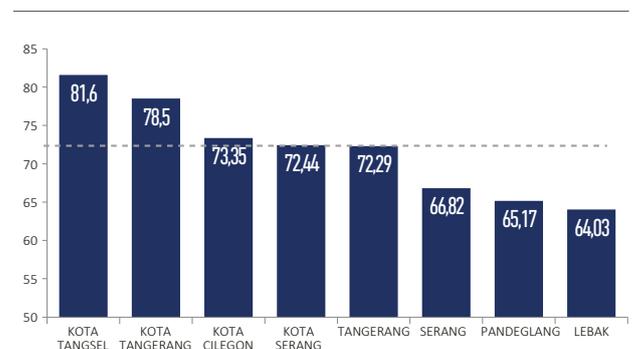
Grafik VI.13 IPM Provinsi di Jawa

6.2. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

6.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

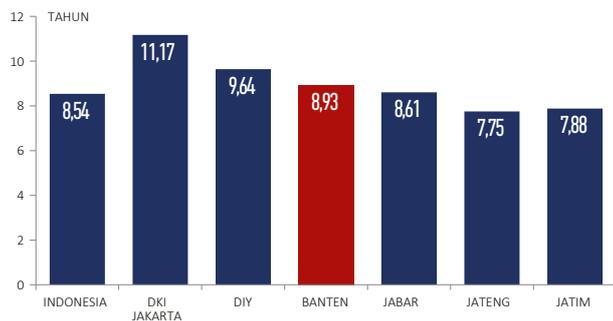
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten secara konsisten terus mengalami peningkatan dan mencatatkan angka yang lebih tinggi dari IPM nasional.

Secara konsep, IPM merupakan suatu indikator untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia yang menunjukkan akses penduduk terhadap hasil pembangunan antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya di dalam suatu wilayah. IPM mencakup 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Dimensi pengetahuan dicerminkan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Sementara dimensi standar hidup layak



Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik VI.14 IPM per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten



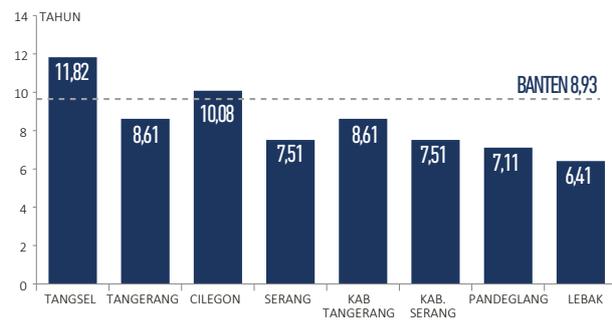
Sumber: BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik VI.15 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Di Jawa

digambarkan oleh rata-rata PDB perkapita riil yang telah disesuaikan.

IPM Provinsi Banten secara konsisten terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2021 mencapai level 72,72. Sejak tahun 2015, status pembangunan Banten berubah dari kategori “Sedang” ($60 < \text{IPM} < 70$) menjadi kategori “Tinggi” ($70 < \text{IPM} < 80$). Angka tersebut mengindikasikan adanya kemajuan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat di Provinsi Banten. Secara spasial di pulau Jawa, IPM Provinsi Banten pada tahun 2021 berada di posisi tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Secara nasional, IPM Provinsi Banten berada di posisi delapan dan selalu tercatat lebih tinggi dari angka nasional.

Namun demikian, jika dilihat secara spasial bahwa Provinsi Banten masih menghadapi kesenjangan IPM yang lebar antara Banten Utara dengan Banten Selatan. Hal ini terlihat dari kesenjangan antara IPM Tangerang Raya, Cilegon, dan Kota Serang dengan Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang. IPM Kota Tangerang Selatan adalah yang tertinggi yaitu mencapai 81,6 pada tahun 2021 dengan status pembangunan “Sangat Tinggi”. Status tersebut diperoleh Kota Tangerang Selatan sejak tahun 2016 seiring meningkatnya IPM dari 79,38 pada tahun 2015. Selanjutnya, terdapat 4 (empat) Kabupaten/kota di Provinsi Banten yang berada pada kategori “Tinggi” yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Tangerang. Pada kategori “Sedang” terdapat 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Kabupaten Serang,



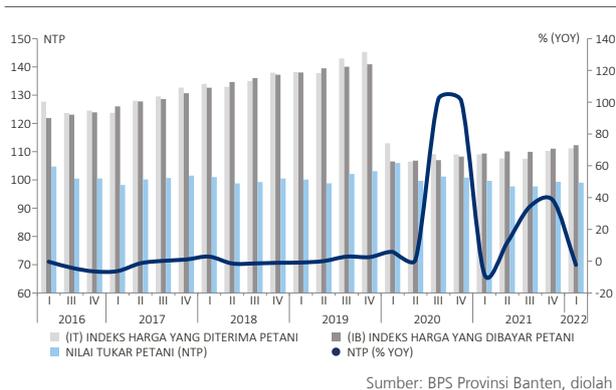
Sumber: BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik VI.16 Rata-rata Lama Sekolah per Kabupaten Kota di Provinsi Banten

Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Kondisi ini tidak mengalami perubahan dibanding periode sebelumnya. Relatif tingginya kesenjangan tersebut menjadi salah satu indikator yang menggambarkan masih adanya kesenjangan kualitas hidup antara masyarakat di Banten Utara dengan di wilayah Banten Selatan, terutama di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.

Salah satu komponen yang digunakan dalam perhitungan IPM adalah angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Dengan pencapaian tersebut mencerminkan bahwa rata-rata pelajar di Banten menamatkan sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama kelas 3 (tiga). Dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau Jawa, RLS Provinsi Banten berada di posisi terbesar ketiga setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang tercatat sebesar 11,17 tahun dan 9,64 tahun. RLS Banten pada tahun 2021 tercatat lebih tinggi dari angka Rata-rata Lama Sekolah nasional yaitu sebesar 8,54 tahun.

Sejalan dengan angka IPM, angka RLS di Kota Tangerang Selatan merupakan yang tertinggi di Provinsi Banten, yaitu sebesar 11,82, diikuti oleh Kota Tangerang dan Kota Cilegon memiliki angka RLS terbesar kedua dan ketiga di Provinsi Banten, masing-masing 10,68 tahun dan 10,08 tahun. RLS di Kota Tangerang Selatan tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan RLS di DKI Jakarta dan menunjukkan bahwa rata-rata pelajar menamatkan sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Atas kelas 3. Sementara itu, RLS terendah dialami oleh kabupaten Lebak sebesar 6,41



Sumber: BPS Provinsi Banten, diolah
Grafik VI.17 Nilai Tukar Petani Provinsi Banten

tahun yang mencerminkan bahwa rata-rata pelajar di kabupaten Lebak hanya menamatkan sekolah pada tingkat sekolah dasar.

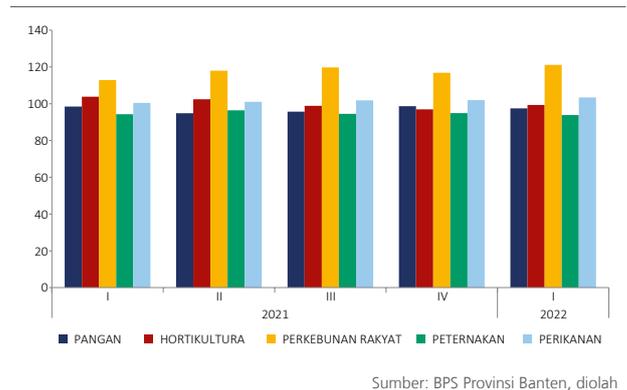
6.2.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Di tengah penigktatak kinerja sektor pertanian, posisi Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan I 2022 tercatat mengalami penurunan tipis. Faktor penahan pergerakan NTP tersebut dipicu oleh dua subsektor yaitu pangan dan peternakan, sementara faktor pendorongnya yaitu subsektor Perkebunan Rakyat, Hortikultura, dan Perikanan.

Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani karena mencerminkan daya beli masyarakat di pedesaan. NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP yang meningkat menunjukkan kemampuan petani untuk membeli barang dan jasa yang dikonsumsi semakin menguat, namun jika NTP melambat dapat mengindikasikan penurunan kemampuan petani untuk membeli barang dan jasa yang dikonsumsi.



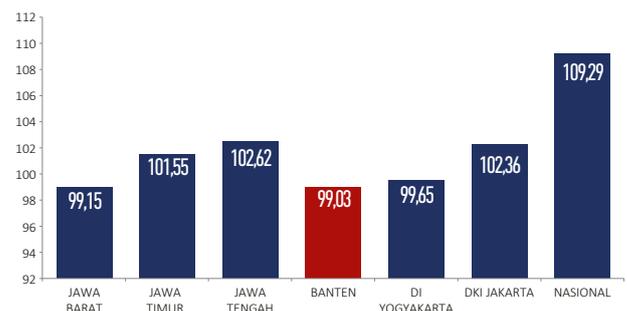
Sumber: BPS Provinsi Banten, diolah
Grafik VI.19 Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan NTP Provinsi Banten



Sumber: BPS Provinsi Banten, diolah
Grafik VI.18 Nilai Tukar Petani Berdasarkan Subsektor

NTP di Provinsi Banten pada triwulan I 2022 tercatat mengalami penurunan tipis di tengah peningkatan kinerja sektor pertanian, yakni sebesar 99,03. Faktor penahan laju NTP pada triwulan I 2022 dipicu oleh penurunan pada sektor Pangan dan Peternakan. Sektor pangan mengalami penurunan tertinggi dibanding triwulan sebelumnya, menjadi 97,47 diikuti sektor peternakan menjadi 93,85. Sementara itu sektor Perkebunan Rakyat mencatat kenaikan tertinggi diantara sektor lainnya yang mengalami peningkatan. Sektor Perkebunan meningkat menjadi 121,12 diikuti sektor Hortikultura menjadi 99,31. Demikian pula dengan sektor Perikanan yang meningkat 1,50 point menjadi 103,44.

Berdasarkan komponen pembentuk, meningkatnya NTP dikarenakan adanya peningkatan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang lebih kecil dibandingkan kenaikan pada Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib). Adapun It tercatat sebesar 111,20 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yakni 110,27. Sementara Ib mengalami peningkatan menjadi sebesar 112,28 setelah pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 111,06.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah
Grafik VI.20 Nilai Tukar Petani Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional

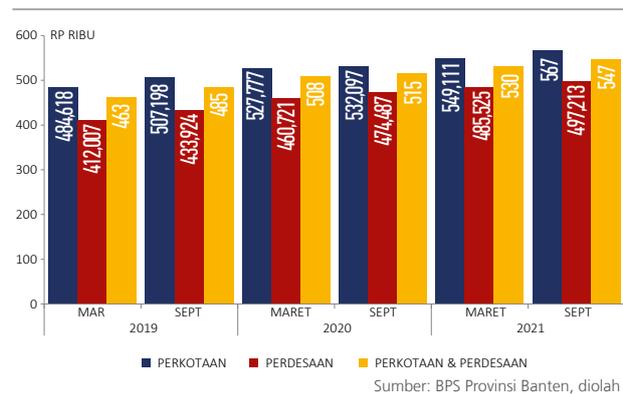
Secara Nasional, hanya 5 provinsi dengan angka NTP berada di bawah angka 100, termasuk Provinsi Banten masih berada dibawah angka 100. Peningkatan kinerja sektor Pertanian secara nasional berkorelasi positif dengan kenaikan NTP namun hal ini tidak terjadi di Banten. Biaya yang dikeluarkan petani masih lebih besar dibandingkan hasil yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan petani di Banten masih perlu ditingkatkan. Terlebih, sektor Pertanian merupakan sektor padat karya yang mendominasi jumlah pekerja di Provinsi Banten.

6.2.3 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan menjadi tantangan serius yang harus diperhatikan pemerintah, terutama di masa Pandemi COVID-19. Hal ini mengingat jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten mengalami penurunan menjadi 6,50%. Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah¹.

Garis kemiskinan di Provinsi Banten pada bulan September 2021 sebesar Rp547.483,00 per kapita per bulan meningkat sebesar 3,23% dibandingkan Maret 2021 yang mencapai Rp530.363,00 per kapita per bulan. Berdasarkan wilayah, Garis Kemiskinan Provinsi Banten di perkotaan Rp567.000 sementara di pedesaan sebesar Rp497.213 per kapita per bulan, masing-masing meningkat sebesar 3,26% dan 2,41% dibandingkan posisi Maret 2021.

Berdasarkan komponennya, Garis Kemiskinan di Provinsi Banten pada September 2021 didominasi oleh komponen Makanan senilai Rp395,258 dengan pangsa 72,19%, sementara komponen Non Makanan sebesar Rp152,225 dengan pangsa 27,81%. Lebih dominannya GK Makanan terjadi di perkotaan maupun di pedesaan masing-masing sebesar 71,52% dan 74,30%. Komoditas yang menjadi penyumbang terbesar di komponen Makanan antara lain adalah beras, rokok kretek filter, daging dan telur ayam ras,



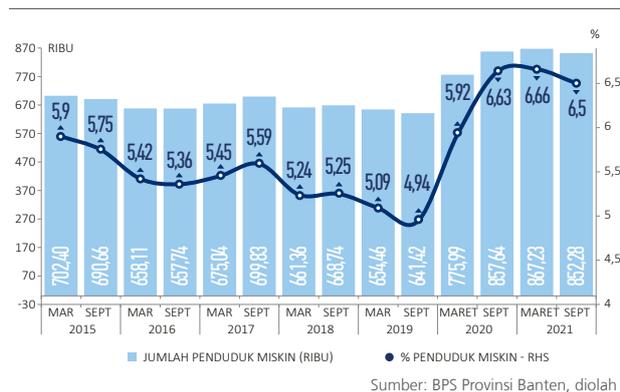
Grafik VI.21 Garis Kemiskinan di Provinsi Banten

kopi bubuk dan instan, serta roti. Selanjutnya komponen utama GK Non Makanan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada bulan September 2021 sebanyak 852,28 ribu orang, mengalami peningkatan sebanyak 285,05 ribu orang dibandingkan posisi bulan Maret 2021 sebanyak 867,23 ribu orang. Namun angka persentase kemiskinan pada bulan September 2021 Menurun yaitu sebesar 6,50% dari sebelumnya 6,66% pada Maret 2021 dan merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan data lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin pada yang tercatat pada September 2021 merupakan yang terbesar di Provinsi Banten terjadi sejak periode Maret 2021 yaitu sebanyak 867 ribu orang dengan presentase 6,66%. Jumlah penduduk miskin setelah itu terus mengalami tren penurunan dan mencapai jumlah terendah pada September 2021 yang mencapai 852,28 ribu orang dengan tingkat kemiskinan 6,50%. Selanjutnya penduduk miskin di Provinsi Banten mengalami peningkatan pada tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19.

Berdasarkan wilayah, peningkatan angka kemiskinan di Banten, didorong oleh meningkatnya jumlah penduduk miskin baik di perkotaan maupun pedesaan. Di perkotaan jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 6,04% dengan jumlah penduduk

¹ BPS menggunakan konsep kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam melakukan pengukuran kemiskinan. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang pengeluaran rata-ratanya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pengeluaran untuk kebutuhan dasar tersebut terdiri dari bahan makanan dan bukan makanan yang secara nominal diukur sebagai garis kemiskinan.



Sumber: BPS Provinsi Banten, diolah
Grafik VI.22 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Banten

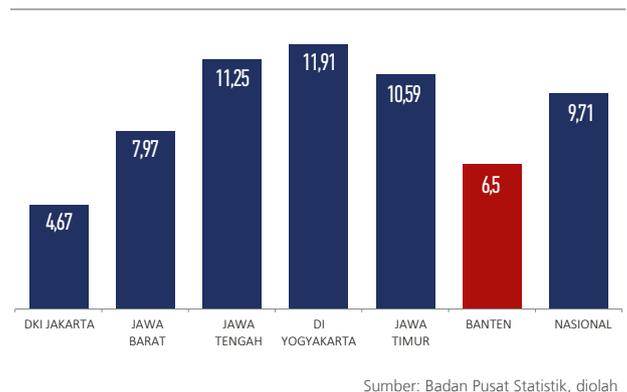
miskin sebanyak 576,62 ribu sedangkan di pedesaan peningkatan jumlah penduduk miskin mencapai 7,72% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 275,66 ribu dibandingkan data Maret 2021.

Di wilayah regional Jawa, persentase penduduk miskin di Provinsi Banten berada di posisi terendah kedua setelah DKI Jakarta, yaitu dengan angka kemiskinan 6,63%. Tingkat kemiskinan di Banten tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang sebesar 10,19%. Angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa pada periode September 2021 terjadi di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan presentase sebesar 12,8% dan 11,84%.

Perlu upaya bersama untuk mengoptimalkan realisasi berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di tengah meningkatnya jumlah dan persentase penduduk miskin akibat Pandemi COVID-19 antara lain pemberian Bantuan Sosial yang berasal dari APBN dan APBD. Program Bantuan Sosial yang berasal dari APBN adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sementara Bantuan Sosial yang berasal dari APBD yaitu Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu).

6.2.4 Perkembangan *Gini Ratio*

Tingkat Ketimpangan di Provinsi Banten pada periode September 2021 tercatat stabil dibandingkan periode Maret 2021. Ketimpangan meningkat di wilayah perkotaan dan menurun di wilayah pedesaan. Hal ini sejalan dengan

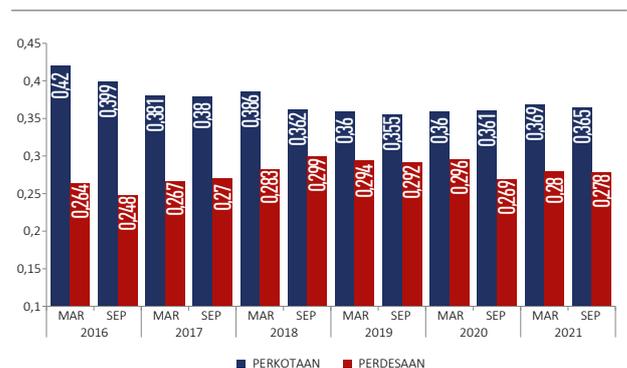


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah
Grafik VI.23 Persentase Kemiskinan per Provinsi di Pulau Jawa

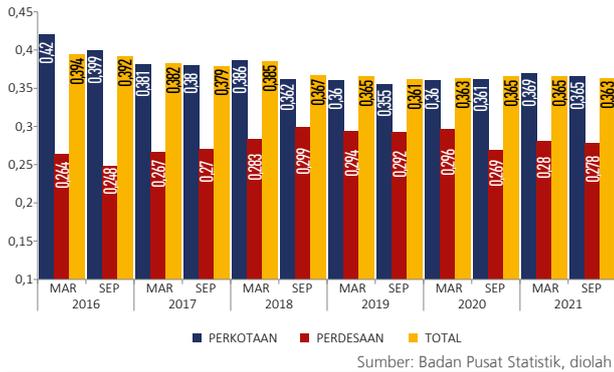
meningkatnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten.

Salah satu indikator yang kerap digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah tingkat ketimpangan ekonomi di suatu wilayah. Semakin besar ketimpangan di suatu daerah mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merata di seluruh wilayah sehingga terjadi deviasi dari rata-rata pengeluaran per kapita antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dalam satu negara. Ketimpangan masyarakat ini diukur salah satunya dengan *gini ratio* yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selama dua kali dalam satu tahun, yaitu di bulan Maret dan September.

Angka *gini ratio* Provinsi Banten pada bulan September 2021 sebesar 0,363 meningkat dibandingkan posisi Maret 2021 sebesar 0,365. Tingkat ketimpangan di Provinsi Banten secara konsisten terus mengalami penurunan meskipun akibat Pandemi COVID-19 mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan



Sumber: BPS Provinsi Banten, diolah
Grafik VI.24 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Banten dan Nasional



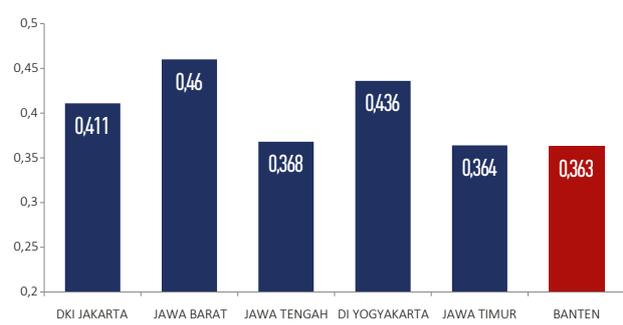
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik VI.25 Perkembangan Gini Ratio berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal

jumlah penduduk miskin. Sejak Maret 2015, tingkat ketimpangan di Provinsi Banten selalu lebih rendah dibandingkan nasional. Hal ini dapat diartikan adanya perbaikan pada tingkat kesenjangan ekonomi di Provinsi Banten dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten yang juga menunjukkan akselerasi.

Berdasarkan wilayah, menurunnya ketimpangan di Provinsi Banten terutama terjadi di daerah perkotaan yaitu dari 0,369 pada Maret 2021 menjadi 0,365 pada September 2021. Angka *gini ratio* di pedesaan mengalami penurunan yaitu 0,296 pada September 2020 menjadi 0,280 pada Maret 2021. Lebih lanjut diketahui bahwa angka *gini ratio* di pedesaan Provinsi Banten sepanjang 5 tahun terakhir selalu lebih rendah dibandingkan di perkotaan yang menunjukkan bahwa pendapatan maupun pengeluaran masyarakat di wilayah pedesaan relatif lebih merata dibandingkan di perkotaan.

Secara regional Jawa, dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa pada bulan September 2021, nilai *gini ratio* Provinsi Banten berada di posisi terendah sebesar 0,365. Sementara itu, Provinsi DI Yogyakarta mencatatkan angka *gini ratio* tertinggi di Pulau Jawa sebesar 0,436 diikuti Provinsi Jawa Barat sebesar 0,46, Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,411, Provinsi Jawa Timur sebesar 0,364, dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,368.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik VI.26 Perkembangan Gini Ratio per Provinsi di Pulau Jawa



Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB VII

Prospek Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan II 2022 diperkirakan akan terus berlanjut, hal ini didorong oleh mobilitas masyarakat yang semakin meningkat seiring pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat khususnya pada momen Idul Fitri. Lebih lanjut pemulihan ekonomi pada triwulan II 2022 yang didorong oleh peningkatan kapasitas utilisasi korporasi utama dan kinerja ekspor yang tetap baik seiring perekonomian negara mitra dagang yang terjaga meskipun tantangan ketidakpastian global masih terjadi serta Adapun konsumsi pemerintah akan mendorong akselerasi ekonomi sebagaimana pola historisnya.

Dari sisi penawaran, berlanjutnya pertumbuhan ekonomi didorong diperkirakan masih akan didorong oleh sektor unggulan Banten, seperti sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Konstruksi. Sektor transportasi juga diperkirakan akan meningkat seiring syarat perjalanan yang semakin mudah.

Dari sisi pergerakan harga, inflasi diperkirakan meningkat dibandingkan akhir tahun 2021 didorong oleh tren kenaikan harga komoditas global serta implementasi kebijakan kenaikan tarif yang ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2022, inflasi Banten diperkirakan berada pada kisaran $3,0 \pm 1\%$ (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.



PERTUMBUHAN
GLOBAL

3,50%

2022*

5,70%

2021



PERTUMBUHAN
NASIONAL

4,5%-5,3%

2022*

3,69%

2021



PERTUMBUHAN
BANTEN

5%-5,8%

2022*

4,44%

2021



INFLASI
BANTEN

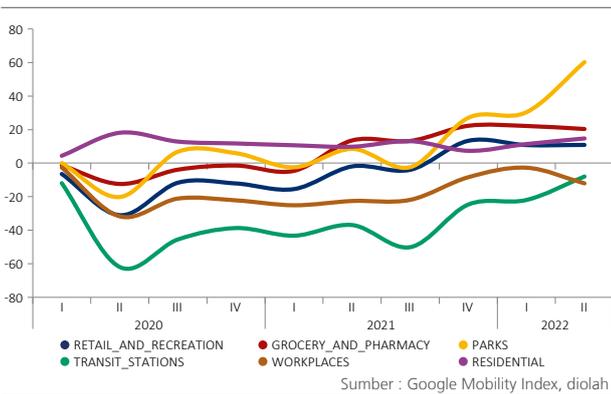
3% \pm 1%

2022*

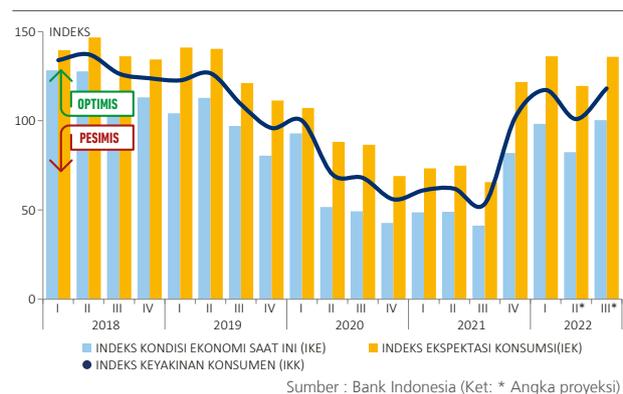
1,91%

2021





Grafik VII.1 Mobilitas Masyarakat Provinsi Banten



Grafik VII.2 Indeks Keyakinan Konsumen Provinsi Banten

7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2022

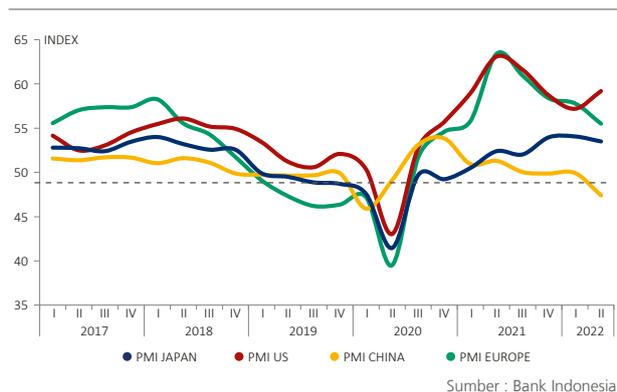
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten diperkirakan akan tumbuh membaik melanjutkan perbaikan kinerja ekonomi di tahun 2021, baik dari sisi penggunaan maupun penawaran. Pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2022 Provinsi Banten diprakirakan akan berada pada kisaran 5,0%-6,0% secara *year on year*. Menggeliatnya perekonomian negara mitra dagang seiring kondisi pandemi Covid-19 yang semakin membaik, mendorong ekspor Banten tetap tumbuh kuat didukung investasi dan konsumsi pemerintah sejalan dengan penyelesaian proyek *multiyears* pemerintah. Di sisi penggunaan, pertumbuhan positif pada triwulan I 2022 pada komponen Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan akan berlanjut, seiring kenaikan keyakinan masyarakat terhadap prospek kondisi ekonomi yang terus menunjukkan perbaikan mobilitas yang meningkat seiring pelonggaran PPKM ke level 1 pada triwulan berjalan.

Di sisi penggunaan, seluruh komponen diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan dengan tahun 2021. Konsumsi masyarakat, yang memiliki pangsa terbesar dari PDRB Provinsi Banten, merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten. Daya beli masyarakat diperkirakan terus menguat seiring perbaikan prospek pendapatan masyarakat pada tahun 2022. Berbagai stimulus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, salah satunya melalui Bantuan Sosial yang diperkirakan dapat menjadi pendorong pertumbuhan komponen

ini akan terus berlanjut pada tahun 2022. Peran sektor Pemerintah juga diperkirakan mengalami peningkatan pada tahun 2022 seiring penetapan anggaran APBD dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang masih terus dilanjutkan.

Berdasarkan *Google Mobility Index*, dari bulan April hingga pertengahan bulan Mei 2022, mobilitas masyarakat Provinsi Banten meningkat seiring adanya HBKN. Tercatat nilai indeks kunjungan ke pusat retail dan rekreasi dan taman meningkat menjadi masing-masing sebesar 10,9%, 60,2%, dan 14,7%. Adapun mobilitas menuju pusat-pusat transportasi umum meskipun masih berada dibawah *baseline*, tercatat meningkat menjadi -8% dari triwulan I 2022 yang tercatat -22%. Di sisi lain, penurunan mobilitas terjadi pada toko bahan makanan hingga 20,3% dan apotek serta tempat kerja -12,4%. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia Provinsi Banten, indeks keyakinan konsumen hingga bulan Mei 2022 tercatat meningkat menjadi sebesar 118,1 dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 101,83. Kondisi ini terutama ditopang oleh kenaikan indeks ekspektasi ekonomi yang juga telah berada pada level optimis (>100). Adapun indeks kondisi ekonomi saat ini juga sudah tercatat berada pada level optimis pertama kali selama pandemi, yakni sebesar 100,3. Hal ini didukung kondisi ekonomi yang semakin baik dan ketersediaan lapangan kerja.

Kinerja ekspor pada tahun 2022 diprakirakan melanjutkan tren pertumbuhan yang kuat didukung permintaan global dan kinerja

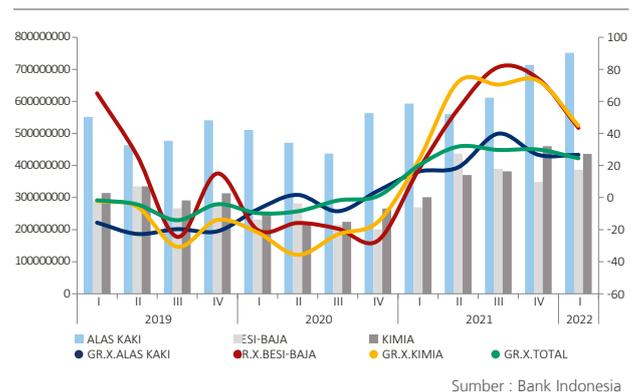


Grafik VII.3 Purchasing Managers Index (PMI) Negara Mitra Dagang Provinsi Banten

korporasi domestik. Net Ekspor triwulan II 2022 diprakirakan kembali tumbuh seiring peningkatan kapasitas utilisasi industri utama Provinsi Banten serta permintaan global yang berangsur pulih. Kinerja ekspor luar negeri diperkirakan membaik seiring proyeksi perbaikan volume perdagangan dunia dan masih kuatnya demand global. Ekspor ke negara tujuan utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa dan Jepang diperkirakan masih berpeluang untuk terus tumbuh seiring proyeksi pertumbuhan beberapa negara tersebut yang juga nampak terus membaik.

Kapasitas utilisasi industri petrokimia diprakirakan kembali meningkat pasca tekanan kenaikan harga bahan baku kimia global serta penurunan kapasitas utilisasi industri kimia hulu seiring adanya maintenance rutin pada triwulan I 2022. Sementara itu, industri Alas Kaki dan Industri Baja mulai melakukan ekspansi ekspor ke negara-negara non tradisional. Sampai dengan triwulan I 2022, kinerja ekspor non migas tumbuh positif sebesar 24,45% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 29,95% (yoy). Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penyebaran Covid-19 varian omicron di berbagai negara mitra dagang yang membuat negara kembali membatasi mobilitas.

Dari sisi investasi, investasi swasta masih akan menjadi motor penggerak pertumbuhan disamping pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Mengingat letak geografis yang strategis, menjadikan Provinsi Banten salah satu provinsi tujuan



Grafik VII.4 Ekspor Komoditas Utama Banten

penanaman modal terbesar di Indonesia. Saat ini investasi swasta yang masih berjalan merupakan proyek investasi yang bersifat *multiyears*, seperti pembangunan pabrik di sektor petrokimia, kimia, alas kaki, baja, otomotif, makanan minuman, dan sebagainya. Di sisi investasi pemerintah, proyek pembangunan Pembangkit listrik 9-10 Suralaya dan PLTU Jawa 7 unit 2, diperkirakan masih akan terus berlangsung pada tahun 2022. Demikian juga dengan proyek infrastruktur pemerintah yang termasuk sebagai PSN yang masih dalam proses penyelesaian, antara lain Tol Serpong-Balaraja Seksi II (Legok-Tigaraksa Selatan) dan Seksi III (Tigaraksa Selatan-Balaraja) dengan total nilai investasi sebesar Rp14,37 triliun dan biaya konstruksi sebesar Rp6,17 triliun, pembangunan Bendungan Karian, dan Sarana dan Prasarana Air Baku Karian serta pembangunan Kota Baru Maja.

Peran sektor konsumsi Pemerintah diprakirakan akan memberikan kontribusi positif sebagaimana pola historisnya. Pada tahun 2022, nominal pagu pendapatan pada APBD pemerintah daerah se-Provinsi Banten tercatat sedikit mengalami kenaikan walaupun pagu belanja mengalami penurunan. Sementara itu, nominal realisasi pendapatan mengalami penurunan dan realisasi belanja meningkat. Secara nominal capaian realisasi belanja modal pemprov Banten pada triwulan I 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja modal tercatat Rp299,69 miliar dibandingkan Rp1,74 miliar pada triwulan I 2021. Peningkatan belanja ini seiring persentase realisasi yang lebih tinggi pada belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.

Dari sisi penawaran, kinerja sektor utama Provinsi Banten diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Sektor industri pengolahan sebagai sektor dengan pangsa terbesar diperkirakan melanjutkan tren perbaikan seiring kuatnya kinerja komoditas utama didorong perdagangan negara mitra dagang yang Hal ini terkonfirmasi dari peningkatan *Purchasing Manager Index* dan *retail sales* negara mitra dagang utama yang tetap kuat, meskipun tercatat penurunan PMI pada negara Eropa dan Tiongkok hingga triwulan II 2022. Adapun sektor industri pengolahan masih tetap ditopang oleh kinerja sektor utama, yakni Industri Alas kaki, Industri Besi-Baja, maupun Industri Petrokimia. Kinerja industri Alak kaki akan tetap terjaga seiring *demand* alas kaki akibat limpahan order dan persiapan event olahraga internasional seperti Piala Dunia dan Asian Games 2022 serta pelaksanaan sekolah tatap muka. Adapun potensi peningkatan kinerja industri baja ditopang oleh ekspor komoditas baja ke pasar non tradisional dengan harga kompetitif serta *outlook* permintaan baja global diprakirakan meningkat hingga 2,7%.¹

Selain alas kaki dan baja, kinerja industri unggulan lainnya yaitu Petrokimia tetap kuat. Hal ini seiring dengan penambahan kapasitas utilisasi korporasi dan peningkatan permintaan domestik terutama pada kemasan berbahan plastik untuk makanan dan minuman.

Sementara itu, kinerja sektor perdagangan diproyeksikan terus membaik seiring terjaganya daya beli, sementara peningkatan kinerja transportasi didorong penambahan jumlah penerbangan, pelonggaran kebijakan mobilitas antara lain syarat karantina, PCR dan sebagainya, serta pelaksanaan beberapa event internasional. Namun demikian, beberapa risiko penahan kinerja meliputi kondisi geopolitik global serta transmisinya ke harga produk domestik.

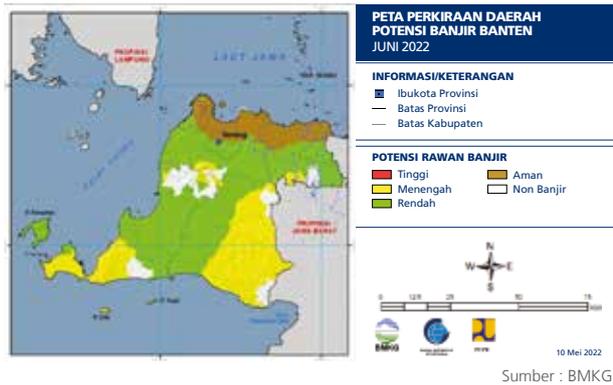
7.2 PROSPEK PERTUMBUHAN INFLASI TAHUN 2022

Inflasi Provinsi Banten pada tahun 2022 diparkirakan akan meningkat namun masih berada sasaran inflasi nasional sebesar 3,0% ± 1%. Angka tersebut diperkirakan mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2021. Akselerasi pemulihan ekonomi yang didorong program vaksinasi akan menyebabkan peningkatan ekspektasi konsumsi masyarakat. Meski demikian, penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah, serta kebijakan pemerintah untuk menjaga harga di level stabil diperkirakan dapat menjaga inflasi Provinsi Banten berada dalam koridor sasaran inflasi nasional selama momen pemulihan ekonomi.

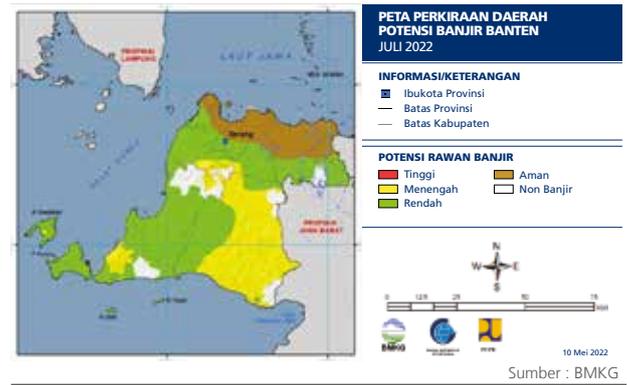
Peningkatan tekanan inflasi provinsi Banten pada tahun 2022 ditopang oleh naiknya daya beli masyarakat seiring akselerasi pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Tingginya mobilitas masyarakat ditengah masa HBKN yang semakin longgar, mendorong permintaan masyarakat semakin tinggi khususnya pada kelompok *volatile food*. Beberapa hal yang menjadi pendorong tekanan inflasi pada tahun 2022 antara lain dari kenaikan komoditas minyak goreng pada triwulan I yang masih berlanjut hingga triwulan berjalan. Lebih lanjut pelonggaran mobilitas saat HBKN termasuk pemberlakuan Pertemuan Tatap Muka (PTM) sekolah mendorong kelompok *Core Inflation*. Meningkatnya permintaan *volatile food*, khususnya minyak goreng seiring dengan masih tingginya harga komoditas global (CPO dan kedelai). Selain itu, risiko peningkatan tekanan harga Bahan Bakar Minyak dan bahan bakar rumah tangga serta transmisi CHT kepada harga rokok diperkirakan memberikan tekanan inflasi pada komoditas rokok sepanjang tahun 2022 dan memberikan *upside risk* pada kelompok *Administered Price*. Adapun pasokan komoditas beras yang cukup sepanjang tahun, produktivitas tanaman pangan khususnya hortikultura, serta moderasi harga emas global diprakirakan akan menjadi penahan inflasi lebih lanjut.

Berdasarkan kelompok disagregasinya, inflasi Provinsi Banten tahun 2022 diperkirakan didorong

1 Market Intelligence, OECD September 2021



Gambar VII.1 Perkiraan Banjir Provinsi Banten Bulan Juni 2022



Gambar VII.2 Perkiraan Banjir Provinsi Banten Bulan Juli 2022

utamanya oleh kelompok *Core Inflation* diikuti kelompok *Volatile Food*, lebih lanjut kebijakan pemerintah dalam penyesuaian cukai rokok dan harga bahan bakar minyak diperkirakan akan mendorong peningkatan laju inflasi pada kelompok *Administered Price*.

Dari kelompok *Core Inflation*, harga emas global di tahun 2022 diperkirakan akan meningkat seiring dengan memanasnya kondisi geopolitik, khususnya setelah invasi Rusia ke Ukraina pada awal Maret. Adapun pemberlakuan PPN 11% diperkirakan juga mendorong tekanan harga, khususnya pada komoditas makanan jadi. Dari kelompok *volatile food*, peningkatan tekanan didorong oleh kenaikan daya beli masyarakat serta pelonggaran mobilitas pada periode HBKN. Adapun kenaikan harga komoditas global, seperti kedelai serta gandum dapat mendorong kenaikan harga produk turunannya. Sementara dari kelompok *administered price*, diperkirakan akan meningkat seiring penetapan kenaikan harga bahan bakar rumah tangga. Peningkatan tekanan harga seiring dengan kebijakan Pemerintah kembali menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak dengan naiknya harga minyak global. Peningkatan harga Pertamina hingga 38% ditengah pulihnya mobilitas masyarakat mendorong tekanan inflasi komoditas bensin dimaksud. Selain itu, peningkatan harga LPG nonsubsidi akan mendorong tekanan inflasi. Adapun

transmisi dampak kenaikan cukai rokok diperkirakan telah dirasakan secara gradual. Namun demikian, secara umum inflasi pada tahun 2022 diperkirakan berada dalam sasaran inflasi nasional $3,0\% \pm 1\%$.

Inflasi lebih lanjut akan tertahan oleh kebijakan stabilisasi harga oleh pemerintah serta kondisi cuaca yang kondusif. Pemerintah telah mengambil langkah strategis melalui penerapan Harga Eceran Tertinggi minyak goreng secara nasional, namun demikian pada pertengahan Maret 2022 penerapan HET minyak goreng kemasan resmi dicabut dan hanya mengatur HET minyak goreng curah. Selanjutnya, pemerintah memberlakukan juga kebijakan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng guna menjaga ketersediaan pasokan domestik. Lebih lanjut, dari kelompok *administered price*, keputusan pemerintah untuk tetap memberikan subsidi listrik selama pandemi COVID-19 diperkirakan akan dapat menahan peningkatan tekanan kelompok Perumahan, Air, Listrik Gas dan Bahan Bakar. Peningkatan inflasi dari kelompok Bahan Makanan pada tahun 2022 dapat ditahan dengan kesiapan infrastruktur pertanian, seperti sarana pengairan dan konektivitas, telah adanya BUMD agribisnis milik Pemerintah Daerah, serta cuaca yang lebih kondusif.

7.3 FAKTOR PENDORONG DAN PENAHAN TAHUN 2022

Beberapa hal yang dapat menjadi faktor pendorong (*upside risk*) maupun faktor penahan (*downside risk*) pertumbuhan ekonomi serta inflasi Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

A. Faktor Pendorong

- 1) Kinerja industri unggulan Banten kembali melanjutkan perbaikan. Industri pengolahan seperti Industri alas kaki masih mendapatkan peningkatan *order*, Industri kimia masih meningkat untuk perlengkapan kesehatan serta kemasan plastik makanan. Sementara dari sisi penjualan domestik, kinerja industri logam berpotensi meningkat seiring pertumbuhan sektor konstruksi.
- 2) Proyek padat karya pembangunan infrastruktur di tahun 2022 terus berlanjut, antara lain pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas jalan, Pusat Distribusi Regional, dan lainnya.
- 3) Relaksasi LTV dan PPhBM yang mendorong peningkatan sektor Real Estate dan sektor Perdagangan.
- 4) Mulai membaiknya Indeks Keyakinan Konsumen seiring ekspektasi terhadap pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.
- 5) Pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat seiring terbentuknya *herd immunity* sehingga mendorong konsumsi masyarakat dan sektor transportasi maupun perdagangan.

B. Faktor Penahan

- 1) Kenaikan harga komoditas dunia yang berpengaruh kepada kenaikan harga bahan makanan pokok, seperti kenaikan harga minyak goreng, kedelai dan gandum.
- 2) Kenaikan harga bahan bakar rumah tangga yakni LPG nonsubsidi serta BBM berpotensi menekan daya beli masyarakat.
- 3) Invasi Rusia ke Ukraina yang menyebabkan tekanan geopolitik sehingga meningkatkan tekanan pada harga emas dunia dan harga minyak dunia.



Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Istilah

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
Belanja Bagi Hasil	Anggaran belanja yang dialokasikan sebagai dana bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja Bantuan Sosial	Anggaran belanja untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Belanja Hibah	Anggaran belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
Belanja Langsung	Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Belanja Tidak Langsung	Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
BI-RTGS (Real Time Gross Settlement)	Penyelesaian kewajiban bayar-membayar (settlement) yang dilakukan secara online atau seketika untuk setiap instruksi transfer dana
CDD (Customer Due Diligence)	Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna.
Dana Alokasi Khusus	Dana alokasi dari APBN dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, terutama untuk membantu membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Dana Alokasi Umum	Dana alokasi dari APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang penggunaannya ditetapkan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah (block grant) berdasarkan Peraturan Presiden
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Dana otonomi khusus adalah dana yang diberikan untuk daerah otonomi khusus yaitu Provinsi Papua dan Aceh. Sedangkan Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat.
Dana Perimbangan	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No.55 Tahun 2005.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan, dan simpanan berjangka.
Disagregasi inflasi	Pengelompokkan inflasi ke tiga komponen yaitu Volatile Food, Administered Prices, dan Core.
EDD (Enhanced Due Diligence)	Kegiatan CDD yang lebih mendalam pada saat melakukan transaksi dengan dan/ atau memberikan jasa kepada nasabah yang yang tergolong berisiko tinggi termasuk politically exposed persons, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Ekspor Impor	Perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar daerah
Financing to Deposit Ratio (FDR)	Rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank syariah, baik dalam rupiah dan valas.
Garis Kemiskinan	Batas pengeluaran kebutuhan pengeluaran minimum.
Indeks Ekspektasi Konsumen	Komponen pembentuk IKK, indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, skala 1-100.
Indeks Keyakinan Konsumen	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, skala 1-100.
Indeks Kondisi Ekonomi	Komponen pembentuk IKK, indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, skala 1-100.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indikator kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.
Inflasi Administered Prices	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) berupa kebijakan Harga Pemerintah, seperti Harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll.

Inflasi Core (inti)	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan- penawaran; lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang; atau ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen.
Inflasi Volatile food	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan.
Kliring	Penyelesaian utang piutang antar bank-bank peserta kliring yang berbentuk surat-surat berharga.
Kredit	Penyediaan uang atau tagihan sejenis, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Kredit Investasi	Kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin- mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai.
Kredit Konsumsi	Pemberian fasilitas kredit dari pihak bank ke konsumen yang digunakan untuk pembelian barang berupa rumah/kendaraan yang digunakan secara langsung oleh konsumen.
Kredit Modal Kerja	Fasilitas kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun namun dapat diperpanjang
KUPVA BB (Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank)	Kegiatan jual dan beli uang kertas asing serta pembelian cek pelawat (traveller's cheque).
Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.
Loan to Deposit Ratio (LDR)	Rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, baik dalam rupiah dan valas. Terminologi FDR digunakan untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.
mtm	Month to Month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
Nilai Tukar Petani	Indikator kesejahteraan petani yang membandingkan antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani.
Non Performing Loan (NPL)	Rasio pembiayaan atau kredit macet terhadap total penyaluran pembiayaan atau kredit oleh bank, baik dalam rupiah dan valas. Kriteria NPL adalah (1) kurang lancar, (2) diragukan, dan (3) macet
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi atau biasa disebut investasi.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh melalui aktivitas ekonomi suatu daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Rasio Gini	Koefisien yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan di suatu daerah
Sektor Utama	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Sisa anggaran tahun lalu yang digunakan sebagai komponen pembiayaan APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Perbandingan jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (15-64 tahun)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Perbandingan jumlah pengangguran dengan penduduk angkatan kerja
Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK)	Upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh kepala daerah.
Warkat Kliring	Alat atau sarana yang dipakai dalam lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam kliring, terdiri atas cek, biyet giro, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota (kiriman uang), wesel bank untuk transfer atau wesel unjuk, nota debit atau kredit dan jenis-jenis warkat lain yang telah disetujui penyelenggara
yoy	Year on Year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya



Halaman ini sengaja dikosongkan



KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI BANTEN
Jl. Raya Serang-Pandeglang KM.7 (Palima)
Serang 42163